

**PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH TAHUN 2024 DI PULAU BULANG
LINTANG, KECAMATAN BULANG
KOTA BATAM**

SKRIPSI



SABRINA JANNETI

NPM:22.11.60.002

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU POLITIK DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
KOTA BATAM
2026**

**PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH TAHUN 2024 DI PULAU BULANG
LINTANG, KECAMATAN BULANG
KOTA BATAM**

SKRIPSI



SABRINA JANNETI

NPM:22.11.60.002

Proposal Skripsi ini disusun untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Mendapatkan
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU POLITIK DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
KOTA BATAM
2026**

ABSTRAK

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu indikator penting keberhasilan penyelenggaraan demokrasi. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kecamatan Bulang terjadi penurunan tingkat partisipasi pemilih dari 83,65% pada Pilkada 2020 menjadi 72,28% pada Pilkada 2024, meskipun angka tersebut masih tergolong tertinggi di Kota Batam. Kondisi geografis kepulauan yang terpencil menjadikan peran tokoh masyarakat sangat strategis sebagai jembatan antara penyelenggara pemilu dan warga. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik pada Pilkada 2024 di Pulau Bulang Lintang, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 11 informan yang dipilih secara purposive sampling, terdiri dari Ketua RT, Ketua RW, anggota KPPS, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta masyarakat baik yang menggunakan maupun tidak menggunakan hak pilihnya. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan tokoh masyarakat menjalankan tiga peran utama: (1) pendidik politik, memberikan pemahaman mengenai hak pilih dan prosedur Pilkada; (2) motivator politik, mendorong warga datang ke TPS melalui ajakan langsung dan keteladanan; serta (3) mediator politik, menjadi penghubung antara masyarakat dan penyelenggara sekaligus menjaga keharmonisan sosial. Faktor pendukung meliputi kepercayaan masyarakat, komunikasi yang baik, dan kerja sama dengan penyelenggara pemilu, sedangkan faktor penghambat meliputi kondisi geografis kepulauan, rendahnya kesadaran politik sebagian warga, kesibukan bekerja, dan penyebaran informasi yang belum merata. Penelitian ini merekomendasikan agar KPU mengoptimalkan keterlibatan tokoh masyarakat sebagai mitra sosialisasi dan tokoh masyarakat meningkatkan kapasitas kepemimpinan demokratis mereka.

Kata Kunci: tokoh masyarakat, partisipasi politik, pemilihan kepala daerah, modal sosial, Pulau Bulang Lintang

ABSTRACT

Political participation of society is one of the important indicators of the success of democratic governance. In the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Bulang District, there was a decrease in voter participation from 83.65% in the 2020 Pilkada to 72.28% in the 2024 Pilkada. This condition indicates the importance of the role of community leaders in increasing political awareness and participation, particularly in island areas such as Pulau Bulang Lintang. This study aims to analyze the role of community leaders in increasing political participation in the 2024 Regional Head Election in Pulau Bulang Lintang, Bulang District, Batam City.

This study aims to analyze the role of community leaders in increasing political participation in the 2024 Regional Head Election in Pulau Bulang Lintang, Bulang District, Batam City. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation involving 10 informants consisting of traditional leaders, religious leaders, neighborhood leaders (RT/RW), youth leaders, Pilkada organizers, and the community as voters. Data analysis was conducted using the interactive analysis model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data validity was tested through source triangulation.

The results of the study show that community leaders play roles as political educators, political motivators, and political mediators in increasing community political participation. These roles are carried out through providing political education, conducting Pilkada socialization, encouraging citizens to exercise their voting rights, and acting as a bridge between the community and election organizers. Supporting factors include high levels of public trust, strong Malay cultural values, and close social networks, while inhibiting factors include the geographical conditions of island areas, low political literacy among some members of the community, and the continued existence of money politics practices.

Based on the research findings, it can be concluded that community leaders have an important role in increasing community political participation in the 2024 Regional Head Election in Pulau Bulang Lintang. Therefore, continuous synergy between community leaders, local government, and election organizers is needed to improve the quality of community political participation.

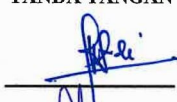
Keywords: Community Leaders, Political Participation, Regional Head Election, Bulang Lintang Island, Local Democracy.

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024 DI PULAU BULANG LINTANG
KECAMATAN BULANG KOTA BATAM

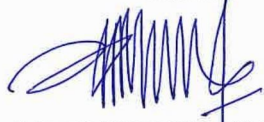
SABRINA JANNETI
NPM: 221160002

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau Kepulauan
Tanggal: 5 Agustus 2026

No	Nama	NIDN	TANDA TANGAN
1	<u>Dendi Sutarto, S.Sos., M. Si</u> (Pimpinan Sidang)	<u>1026048402</u>	
2	<u>Winda Roselina Effendi, S.IP.,M.IP</u> (Penguji I)	<u>1006069002</u>	
3	<u>Assoc. Prof. Linayati Lestari, M.A., Ph.D</u> (Penguji II)	<u>1009078602</u>	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau Kepulauan


Askarmin Harun, S.Sos., M. Si
NIDN.1013128701

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau Kepulauan


Dendi Sutarto, S.Sos., M. Si
NIDN.1026048402

HALAMAN PENGESAHAN PERBAIKAN
SEMINAR TUGAS AKHIR / SKRIPSI

PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024 DI PULAU BULANG LINTANG
KECAMATAN BULANG KOTA BATAM

SABRINA JANNETI
NPM: 221160002

Pimpinan Sidang	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dendi Sutarto, S.Sos., M. Si</u> NIDN.1026048402		20/8-20
Dosen Penguji I <u>Winda Roselina Effendi, S.IP., M.IP</u> NIDN.1006069002		20/8-20
Dosen Penguji II <u>Assoc. Prof. Linayati Lestari, M.A., Ph.D</u> NIDN.1009078602		

PERSETUJUAN AKHIR SKRIPSI

**PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024 DI PULAU BULANG LINTANG
KECAMATAN BULANG KOTA BATAM**

**SABRINA JANNETI
NPM: 221160002**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dihadapkan kepada Dewan Penguji
Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal

Dendi Sutarto, S.Sos., M.Si
NIDN.1026048402



20/8-20

Pembimbing II

Assoc. Prof. Linayati Lestari, M.A., Ph. D
NIDN.1009078602



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau Kepulauan



Dendi Sutarto, S. Sos., M. Si
NIDN.1026048402

v

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah menyatakan bahwa:

v

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul “Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Pulau Bulang Lintang Kecamatan Bulang Kota Batam” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Riau Kepulauan, maupun diperguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam tulisan ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Batam, 01 Mei 2026

Sabrina Janneti
221160002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan berkahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran**

Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Pulau Bulang Lintang Kecamatan Bulang Kota Batam". Laporan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) pada Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Riau Kepulauan.

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan laporan skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E.,MM, selaku Rektor Universitas Riau Kepulauan;
2. Bapak Askarmin Harun, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan
3. Bapak Dendi Sutarto, S.Sos.,M.Si Selaku Kepala Program Studi Universitas Riau Kepulauan, Sekaligus Selaku Dosen Pembimbing I,yang telah dengan penuh kesabaran dan ketulusan memberikan ilmu dan bimbingan terbaik kepada peneliti;
4. Ibu Assoc Prof Linayati Lestari, Ph.D Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah dengan penuh kesabaran dan ketulusan memberikan ilmu dan bimbingan terbaik kepada peneliti;
5. Bapak/Ibu Dosen, BAAK Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan;
6. Cinta pertama sekaligus panutan hidupku, Ayahnda Ahmad Sobur dan Pintu Surgaku Ibunda Zaleha. yang selama ini tiada henti selalu mendoakan penulis, memberikan kasih sayang, serta dukungan moral dan material yang selalu menguatkan langkah penulis. Setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari doa dan restu beliau;

7. Kepada seluruh keluarga tercinta nenek,tante,paman dan sepupu-sepupu, terima kasih atas perhatian, dukungan dan pengertian yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran keluarga menjadi tempat pulang yang selalu memberi ketenangan ketika penulis berada dititik lelah dan ragu;
8. Kepada adik laki-laki tercinta Sobran Zidan Nugraha yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta berusaha menjadi panutan di masa yang akan datang kelak.
9. Kepada pasangan tercinta yang tak kalah penting kehadirannya, Sawal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini baik tenaga, waktu, maupun materi. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidup saya, selalu menemani dan meluangkan waktunya, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah untuk meraih impian.
10. Sahabat-sahabat tersayang, Rosita, Diana dan Asafina. Terima kasih telah mendukung, memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Lurah Bulang Lintang dan masyarakat yang membantu dalam memberikan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Rekan-rekan mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan;
13. Serta pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, terima kasih buat semuanya;
14. Pada bagian terakhir ini, peneliti ingin menyampaikan apresiasi kepada diri sendiri yang kerap terlupakan. Terima kasih, Sabrina Janneti, telah bertahan di tengah keraguan dan kelelahan, tetap melangkah meski berkali-kali ingin menyerah, dan bangkit kembali meski hati masih terluka. Perjalananmu terbentuk dari keterbatasan dan situasi yang menuntutmu tumbuh lebih cepat.

Namun kamu tetap berdiri belajar tegar dalam kesunyian dan tabah dalam kepedihan. Setiap air mata yang kamu simpan dan doa yang kamu bisikkan telah menempa dirimu menjadi sosok yang kuat. Perjalanan ini belum berakhir dan mungkin masih ada tantangan yang menanti, tetapi kamu sudah membuktikan bahwa kamu sanggup bertahan. Teruslah melangkah dengan keyakinan bahwa kamu berhak dicintai, meraih mimpi, dan tiba di tujuan yang diperjuangkan. Terima kasih karena kamu tidak pernah menyerah pada dirimu sendiri.

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata sederhana yang dapat kupersembahkan kepada kalian semua; namun di dalamnya tersemat doa, harap, dan rasa syukur yang tak terhingga. Terima kasih yang tulus kuucapkan atas setiap dukungan, ketulusan, dan doa yang mengiringi setiap langkah perjuanganku. Hidup ini terasa berat bila dijalani seorang diri, tetapi dengan pertolongan Allah S.W.T dan kehadiran kalian, setiap lelah menjadi ringan, setiap ragu berubah menjadi keyakinan.

Batam, 01 Mei 2026

Sabrina Janneti
221160002

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN HASIL REVISI.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. Kajian Teori.....	18
1. Teori Peran.....	12
2. Teori Partisipasi Politik.....	20
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	22
C. Definisi Konseptual.....	27
D. Definisi Operasional.....	30
E. Kerangka Berpikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	3
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Kota Batam.....	40
B. Gambaran Umum Kelurahan Bulang Lintang.....	44

C. Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Pulau Bulang Lintang Kecamatan Bulang Kota Batam.....	45
BAB V PENUTUP.....	80
A. KESIMPULAN.....	80
B. SARAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2024	4
--	---

Tabel 1.2 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Masyarakat Kota Batam pada Pilkada Tahun 2015.....	5
Tabel 1.4 Tingkat Partisipasi Pemilih di Kota Batam.....	8
Tabel 1.5 Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Batam pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	9
Tabel 1.7 Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Batam pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.....	11
Tabel 1.9 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Bulang	12
Tabel 1.10 Rekapitulasi Data Pemilih Tetap.....	13
Tabel 1.11 Rekapitulasi Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.....	14
Tabel 1.12 Rekapitulasi Suara Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam.....	14
Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan.....	23
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian.....	33
Tabel 4.3 Profil Informan.....	45
Tabel 4.5 Ringkasan Temuan Peran Tokoh Masyarakat sebagai Pendidik.....	52
Tabel 4.7 Ringkasan Temuan Peran Tokoh Masyarakat sebagai Motivator.....	59
Tabel 4.9 Ringkasan Temuan Peran Tokoh Masyarakat sebagai Mediator.....	67
Tabel 4.10 Data Partisipasi Pemilih Kelurahan Bulang Lintang Tahun 2024.....	69
Tabel 4.12 Ringkasan Temuan Partisipasi Politik Masyarakat.....	72
Tabel 4.13 Penggunaan Hak Pilih masyarakat Kelurahan Bulang Lintang pada Pilkada Tahun 2024.....	74

Tabel 4.15 Ringkasan Temuan Memggunakan Hak Pilih	80
Tabel 4.17 Temuan Ringkasan Mengikuti Kempanye.....	87
Tabel 4.19 Ringkasan Temuan Terlibat Diskusi Politik	92
Tabel 4.20 Ringkasan Temuan Faktor Pendukung.....	95
Tabel 4.21 Ringkasan Temuan Faktor Penghambat.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3 Persentase Partisipasi Masyarakat Kota Batam pada Pilkada Tahun 2015	6
Gambar 1.6 Persentase Partisipasi Masyarakat Kota Batam pada Pilkada Tahun 2020	10

Gambar 1.8 Persentase Partisipasi Masyarakat Kota Batam pada Pilkada Tahun 2024	12
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	30
Gambar 4.1 Peta Kota Batam.....	39
Gambar 4.2 Lambang Kota Batam.....	40
Gambar 4.4 Ketua RT.....	49
Gambar 4.6 Ketua RW.....	55
Gambar 4.8 Apel kesiapan dan bimbingan teknis Pantarlih dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang di dukung oleh tokoh masyarakat sebagai penghubung antara masyarakat dan penyelenggara pemilu.....	62
Gambar 4.11 Masyarakat Kelurahan Bulang Lintang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS)...	70
Gambar 4.14 Masyarakat Kelurahan Bulang Lintang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS)...	75
Gambar 4.16 Masyarakat Kelurahan Bulang Lintang mengikuti kegiatan kampanye/sosialisasi pasangan calon dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah 2024	81
Gambar 4.18 Kegiatan Diskusi Politik dan Silaturahmi antara Masyarakat Kelurahan Bulang Lintang dengan Calon Kepala Daerah pada Pilkada 2024.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip kedaulatan rakyat ini menempatkan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah dan pemimpin, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Salah satu wujud nyata dari kedaulatan rakyat tersebut adalah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diterapkan untuk pertama kalinya di Indonesia sejak bulan Juni tahun 2005 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.¹ Melalui Pilkada, masyarakat diberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk memilih pemimpin daerah yang dianggap paling mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi daerahnya.

Namun demikian, pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi persoalan serius, yakni rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Rendahnya angka partisipasi pemilih atau yang dikenal dengan fenomena golongan putih (Golput) menjadi indikasi bahwa kesadaran politik masyarakat masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator kualitas demokrasi, sehingga

¹ Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

semakin tinggi partisipasi, semakin tinggi pula legitimasi kepemimpinan yang terpilih.²

Dalam konteks ini, peran tokoh masyarakat menjadi sangat strategis dan tidak dapat diabaikan. Tokoh masyarakat yang meliputi tokoh agama, tokoh adat, ketua RT/RW, dan tokoh pemuda memiliki kedekatan emosional, kepercayaan, dan pengaruh yang kuat di tengah komunitasnya.³ Mereka mampu menjangkau lapisan masyarakat yang paling bawah sekalipun, yang sulit dijangkau oleh mekanisme formal pemerintah maupun penyelenggara pemilu. Dengan kewibawaan dan pengaruh sosial yang dimilikinya, tokoh masyarakat berpotensi besar untuk menggerakkan warga agar ikut berpartisipasi aktif dalam Pilkada.

Tokoh masyarakat dapat berperan sebagai agen sosialisasi politik yang efektif dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak pilih, menjelaskan mekanisme dan prosedur pemungutan suara, serta mendorong warga untuk tidak bersikap apatis terhadap proses demokrasi. Selain itu, tokoh masyarakat juga dapat berperan sebagai jembatan komunikasi antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat umum, sehingga informasi terkait Pilkada dapat tersampaikan secara lebih merata dan mudah dipahami.

Pada Pilkada serentak tahun 2024, seluruh daerah di Indonesia termasuk wilayah kepulauan seperti Pulau Bulang Lintang turut menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada di wilayah kepulauan sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat yang aktif dan sadar akan pentingnya hak pilih mereka.

Pulau Bulang Lintang merupakan salah satu wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis tersendiri, yakni terisolasi dari pusat pemerintahan daratan. Kondisi geografis yang demikian menimbulkan berbagai tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada, mulai dari distribusi logistik pemilu, keterbatasan akses informasi, hingga rendahnya kesadaran politik sebagian

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 367.

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 242.

masyarakat. Berdasarkan data penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024, tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Bulang mengalami penurunan dari 83,65% pada Pilkada 2020 menjadi 72,28% pada Pilkada 2024,⁴ meskipun angka ini masih menjadi yang tertinggi di Kota Batam.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, keberadaan tokoh masyarakat di Pulau Bulang Lintang memiliki peran yang sangat strategis. Tokoh masyarakat baik tokoh agama, tokoh adat, maupun tokoh pemuda merupakan figur yang dipercaya dan dihormati oleh warga setempat. Pengaruh dan kedekatan mereka dengan masyarakat menjadikan tokoh masyarakat sebagai agen sosialisasi politik yang paling efektif,⁵ mengingat pendekatan personal dan kultural lebih mudah diterima oleh masyarakat kepulauan dibandingkan pendekatan formal yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Salah satu cara yang ditempuh tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik warga adalah melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik informal. Sosialisasi ini dilakukan dengan pendekatan persuasif melalui aktivitas seperti pengajian, pertemuan adat, musyawarah kampung, serta komunikasi langsung dari mulut ke mulut. Pendekatan semacam ini terbukti lebih efektif di komunitas kepulauan seperti di Pulau Bulang Lintang, di mana kepercayaan terhadap figur lokal jauh lebih kuat dibandingkan pendekatan formal dari lembaga penyelenggara pemilu.

Namun demikian, upaya peningkatan partisipasi politik di Pulau Bulang Lintang pada Pilkada 2024 tidak lepas dari berbagai tantangan. Kondisi geografis kepulauan yang terpencil menyebabkan terbatasnya akses informasi terkait calon kepala daerah, jadwal pemungutan suara, dan prosedur pencoblosan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan sebagian warga dan sikap apatisme terhadap politik praktis menjadi hambatan tersendiri yang harus dihadapi oleh para tokoh masyarakat dalam menjalankan peran mereka sebagai penggerak partisipasi pemilih.

⁴ Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Data Partisipasi Pemilih Pilkada Kota Batam Tahun 2020 dan 2024 (Batam: KPU Kota Batam, 2024).

⁵ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, hlm. 243.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, berikut ini disajikan data mengenai pasangan calon yang berkompetisi pada Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2024:

Tabel 1. 1 Nama Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2024

NO	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung
1	Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra	Partai Nasdem Partai Demokrat Partai Golongan Karya Partai Amanat Nasional Partai Keadilan Sejahtera Partai Hati Nurani Rakyat Partai Kebangkitan Bangsa Partai Solidaritas Indonesia Partai Kebangkitan Nusantara Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Persatuan Pembangunan
2	Nuryanto-Hardi Selamat Hood	Partai Buruh Partai Gelombang Rakyat Indonesia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Sumber: KPU Kota Batam

Seluruh masyarakat Kota Batam yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berhak ikut serta dalam Pilkada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat (6) menyebutkan bahwa pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.⁶Berdasarkan dari Undang-undang tersebut, partisipasi pemilih bukan partisipasi semua warga Negara, tatapi warga

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pasal 1 Ayat (6).

Negara yang memenuhi syarat sebagaimana yang diatur undang-undang. Pemilih yang dimaksud adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT), Daftar Pindah Memilih (DPPH) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang telah memiliki KTP setempat berdasarkan *dejure*, yaitu pemilih hanya bisa memilih ditempat sesuai dengan alamat KTP dan bisa memilih diluar domisili KTP disebabkan oleh keadaan tertentu yang telah diatur oleh undang-undang dengan mengurus pindah memilih dari tempat asal tempat tujuan.

Partisipasi politik masyarakat merupakan hal penting dalam pelaksanaan demokrasi, terutama dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tingginya tingkat partisipasi pemilih menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian dan keterlibatan dalam proses politik.⁷ Namun, pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 yang dilaksanakan pada 9 Desember 2015 di Kota Batam, tingkat partisipasi masyarakat belum mencapai target nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 77,5%. Kenyataannya, tingkat partisipasi pemilih di Kota Batam hanya mencapai 50,65%. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam Pilkada masih tergolong rendah.

Table 1.2 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Masyarakat Kota Batam pada Pilkada Tahun 2015

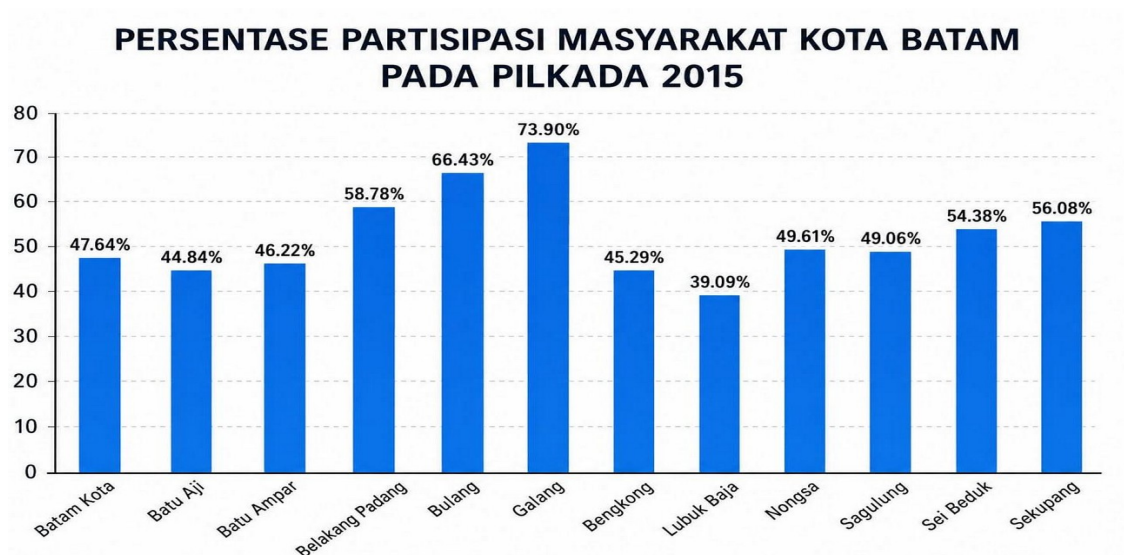
NO	Kecamatan	TPS	Data DPT			Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih	Persentase Hak Pilih Per Kecamatan
			L	P	Total		
1	Batam Kota	244	45.562	46.190	91.752	43.711	47.64%
2	Batu Aji	220	37.435	37.675	75.092	33.675	44.84%
3	Batu Ampar	96	21,718	20.208	41.926	19.380	46.22%

⁷ Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* (Cambridge: Harvard University Press, 1976), hlm. 3–4.

4	Belakang Padang	47	7.919	8.055	15.974	9.390	58.78%
5	Bulang	24	3.985	3.606	7.564	5.025	66.43%
6	Galang	45	5.838	4.998	10.836	8.008	73,90%
7	Bengkong	177	34.414	33.342	67.756	30.687	45,29%
8	Lubuk Baja	130	26.937	26. 576	53.513	20.916	39,09%
9	Nongsa	103	21.186	19. 074	40.260	19.974	49,61%
10	Sagulung	252	58.156	52.126	110.282	54.104	49,06%
11	Sei Beduk	143	21.841	21.698	43.539	23.678	54,38%
12	Sekupang	157	36.977	35.986	72.963	40.920	56,08%
	Total	1.638	321.941	309.516	631.457	309.468	49,01%

Sumber: KPU Kota Batam

Gambar 1.3 Persentase Partisipasi Masyarakat Kota Batam pada Pilkada Tahun 2015



Sumber: KPU Kota Batam

Pada Gambar 1.3 di atas Pilkada tahun 2015 tercatat hanya 309.468 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Sekitar 49.01% dari 631.457 data pemilih di DPT. Angka ini menunjukkan bahwa kurang dari separuh pemilih terdaftar berpartisipasi secara aktif dalam Pilkada 2015. Partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2015 menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. Kecamatan Galang mencatat tingkat penggunaan hak pilih tertinggi sebesar 73,90%, diikuti Kecamatan Bulang 66,43% dan Belakang Padang 58,78%. Sebaliknya, beberapa Kecamatan menunjukkan tingkat partisipasi yang relatif rendah, seperti Kecamatan Lubuk Baja sebesar 39,09%, Kecamatan Batu Aji 44,84% dan Bengkong 45,29%.

Rendahnya partisipasi di Pilkada Batam tahun 2015 disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi oleh KPU yang efektif dibandingkan pemilu serentak (2019), kurangnya sinergi antar lembaga, serta pemilih yang merasa pilihan kandidat tidak ada yang menarik, yang mengakibatkan warga memilih golput atau apatis.

Pada Pilkada Kota Batam tahun 2020, tingkat partisipasi menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dari 587.527 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, sebanyak 377.339 pemilih menggunakan hak pilihnya, dengan persentase partisipasi mencapai 64,22%. Berikut data partisipasi masyarakat Pada Pilkada Kota Batam tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Batam menetapkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam terpilih. Pasangan ini memperoleh sebanyak 267.497 suara atau sebesar 73,1% dari total suara sah. Hasil tersebut menunjukkan adanya dukungan besar dari masyarakat terhadap pasangan terpilih, sekaligus menggambarkan dinamika partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Batam.

Tingkat partisipasi pemilih di Kota Batam pada Pilkada tahun 2024 mencatat rekor terendah sepanjang Sejarah pemilu dan pemilihan, dengan hanya 46,76%. Dari 899.666 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya 420.694 orang yang menggunakan hak pilih mereka. Tingkat partisipasi pemilih menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pemilu, karena menunjukkan

tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi dan legitimasi pemimpin terpilih.

Di Kota Batam rekor partisipasi pemilih tertinggi terdapat pada Pemilu tahun 2019 dengan 84,37%. Sementara rekor partisipasi pemilih terendah terjadi pada Pilkada tahun 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1. 4 Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Batam

No	Jenis Pemilihan	Tahun Pelaksanaan	Persentase
1	PILKADA	2015	49,01%
2	PEMILU	2019	84,37%
3	PILKADA	2020	64,22%
4	PEMILU	2024	74,12%
5	PILKADA	2024	48,29%

Sumber: KPU Kota Batam

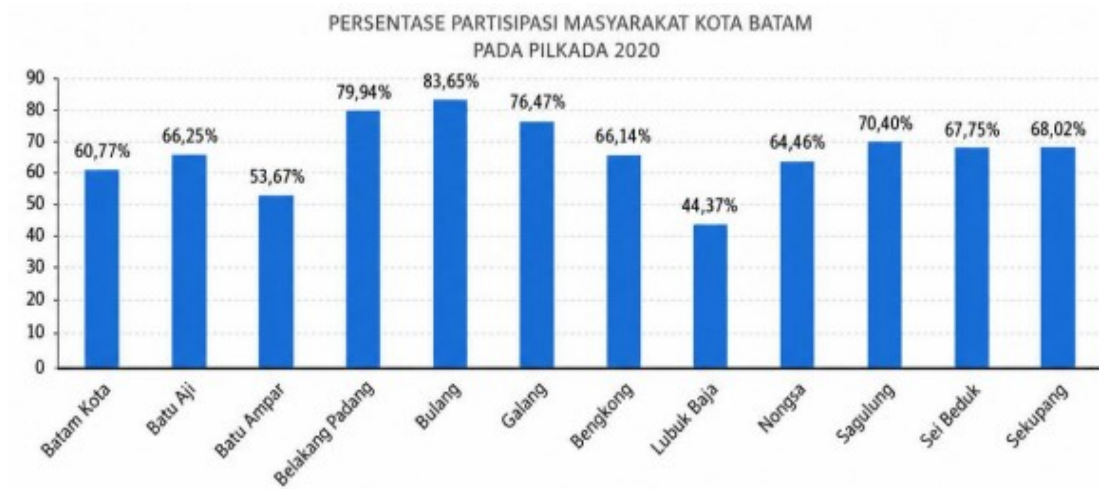
Berdasarkan data yang tersaji pada tabel diatas, tingkat partisipasi pemilih di Kota Batam menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Pada pemilu 2019, partisipasi masyarakat berada pada angka 84,37%, menjadi yang tertinggi dalam periode tersebut. Namun, pada pilkada 2020 partisipasi turun signifikan menjadi 64,22%, menunjukkan rendahnya antusiasme masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah dibanding pemilihan nasional. Penurunan ini berlanjut pada periode berikutnya. Pada Pemilu 2024, tingkat partisipasi kembali menurun menjadi 74,12%, dan mencapai titik terendah pada Pilkada 2024 yaitu hanya 48,29%.

Pada tahun 2020 tercatat Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Batam yaitu 587.527 pemilih, namun yang menggunakan hak pilihnya hanya 377.339 pemilih, dengan persentase partisipasi masyarakat mencapai 64,22%, pemilih yang menggunakan hak pilih 377.339. Berikut partisipasi masyarakat Kota Batam pada Pilkada Kota Batam Tahun 2020:

NO	Kecamatan	TPS	Data DPT			Jumlah Pemilih Menggunakan Hak Pilih	Persentase Hak Pilih Per Kecamatan
			L	P	Total		
1	Batam Kota	360	44.261	47.447	91.708	55.727	60,77%
2	Batu Aji	233	29.195	29.246	58.441	38.875	66,25%
3	Batu Ampar	125	17.754	17.309	35.063	18.817	53,67%
4	Belakang Padang	50	6.994	6.807	13.801	11.033	79,94%
5	Bulang	26	3.811	3.553	7.364	6.160	83,65%
6	Galang	42	6.459	5.598	12.057	9.220	76,47%
7	Bengkong	224	27.508	27.593	55.101	36.443	66,14%
8	Lubuk Baja	187	27.593	28.496	55.825	24.770	44,37%
9	Nongsa	146	21.276	20.459	41.735	26.904	64,46%
10	Sagulung	354	48.429	48.081	96.510	67.941	70,40%
11	Sei Beduk	170	22.681	22.670	45.352	30.724	67,75%
12	Sekupang	260	36.734	37.743	74.571	50.725	68,02%
	Total	2.177	292.440	295.087	587.527	377.339	64,22%

Sumber: KPU Kota Batam

Gambar 1.6 Persentase Partisipasi Masyarakat Kota Batam Pada Pilkada Tahun 2020



Sumber: KPU Kota Batam

Berdasarkan data diatas Kecamatan Bulang merupakan kecamatan dengan persentase partisipasi tertinggi dengan daftar pemilih tetap yaitu 7.364, pemilih yang menggunakan hak pilih 6.160 pemilih, dengan persentase partisipasi 83,65%. Sedangkan Kecamatan Lubuk Baja paling terendah partisipasi masyarakat dari 12 kecamatan di Kota Batam dengan jumlah daftar pemilih tetap 22.825 pemilih, pemilih yang menggunakan hak pilih 24.770 pemilih dengan persentase 44,37%.

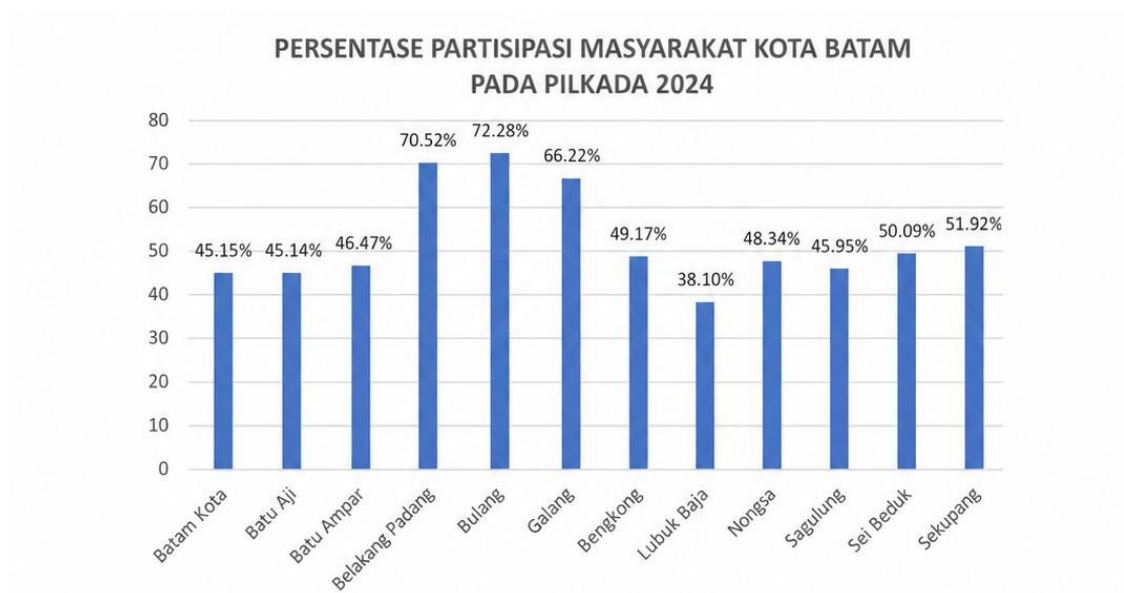
Pada Pilkada Kota Batam Tahun 2020 partisipasi masyarakat tergolong cukup tinggi. Berdasarkan data per kecamatan, Sebagian besar wilayah mencatat tingkat penggunaan hak pilih di atas 60-70%, bahkan di kecamatan Bulang mencapai 83,65%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020 antusiasme masyarakat terhadap proses demokrasi lokal masih relative kuat. Namun, situasi berbeda terjadi pada Pilkada Kota Batam tahun 2024. Data resmi KPU Kota Batam menunjukkan bahwa dari 899.666 pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, hanya 430.079 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Tingkat partisipasi pemilih hanya 46,76%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020. Berikut partisipasi masyarakat Kota Batam pada Pilkada Kota Batam Tahun 2024:

Tabel 1.7 Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Batam Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024

N O	Kecamatan	TPS	Data DPT			Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih	Persentase Hak Pilih Per Kecamatan
			L	P	Total		
1	Batam Kota	281	69.160	74.094	143.254	64.673	45,15%
2	Batu Aji	198	49.975	48.866	98.823	44.609	45,4%
3	Batu Ampar	87	22.773	22.343	45.166	20.966	46,47%
4	Belakang Padang	43	7.624	7.673	15.297	10.788	70,52%
5	Bulang	25	4.426	4.100	8.526	6.163	72,28%
6	Galang	44	7.445	6.642	14.087	9.328	66,22%
7	Bengkong	188	46.071	46.398	92.469	45.464	49,17%
8	Lubuk Baja	143	32.913	34.682	67.775	25.824	38,10%
9	Nongsa	137	34.860	33.268	68.128	32.931	48,34%
10	Sagulung	301	78.071	75.344	153.45	70.489	45,95%
11	Sei Beduk	136	34.203	33.95	68.58	34.138	50,09%
12	Sekupang	238	61.462	63.156	124.68	64.709	51,92%
	Total		448.965	450.701	899.666	430.079	46,76%

Sumber: KPU Kota Batam (2024)

Gambar 1.8 Persentase Partisipasi Masyarakat Kota Batam pada Pilkada Tahun 2024



Sumber: KPU Kota Batam

Berdasarkan data pada Gambar 1.8 diatas Kecamatan Bulang masih menjadi kecamatan yang memiliki persentase partisipasi tertinggi di Kota Batam dengan total Daftar Pemilih Tetap 8.526 pemilih, pemilih yang menggunakan hak pilihnya yaitu 6.163 pemilih dengan persentase partisipasi 72,28%.

Di Kecamatan Bulang terdapat 25 TPS yang terdiri dari 6 Kelurahan yaitu, Kelurahan Pulau Bukuh 5 TPS, Kelurahan Bulang Lintang 4 TPS, Kelurahan Batu Legong 3 TPS, Kelurahan Temoyong 3 TPS, Kelurahan Pantai Gelam 3 TPS, Kelurahan Setokok 7 TPS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.9 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Bulang

No	Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Bulang Lintang	4	654	620	1.274

2	Batu Legong	3	484	410	894
3	Pulau Buluh	5	1.123	1.054	2.177
4	Temoyong	3	543	509	1.052
5	Pantai Gelam	3	416	394	810
6	Setokok	7	1.206	1.113	2.319

Sumber: KPU Kota Batam

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kelurahan Bulang Lintang Kecamatan Bulang. Keterlibatan masyarakat di dalam pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024 yang lalu merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin untuk lima tahun mendatang. Kelurahan Bulang Lintang terdapat 4 TPS dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.274 jiwa, yang terdiri dari 654 jiwa pemilih laki-laki dan 620 jiwa pemilih Perempuan. Jumlah pemilih Kelurahan Bulang Lintang dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1.10 Rekapitulasi Data Pemilih Tetap

No	Nomor TPS	Jumlah Pemilih		
		L	P	L+P
1	1	200	200	400
2	2	114	107	221
3	3	304	280	582
4	4	38	33	71
TOTAL		654	620	1.274

Sumber: KPU Kota Batam

Pada tanggal 27 November 2024 masyarakat di Kecamatan Bulang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap memberikan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam mulai pukul 07.00-13.00 WIB. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, pemilihan diikuti 2 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam ini perolehan suaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.11 Rekapitulasi Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Paslon	Nama Pasangan Calon	Suara
1	Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura	3.141
2	Muhammad Rudi-Aunur Rafiq	2.787

Sumber: KPU Kota Batam

Hasil rekapitulasi KPU untuk di wilayah Kecamatan Bulang paslon 01 Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura unggul dengan perolehan suara 3.141 sedangkan Muhammad Rudi dan Aunur Rafiq memperoleh 2.787 suara.

Tabel 1.12 Rekapitulasi Suara Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam

Paslon	Nama Pasangan Calon	Suara
1	Nuryanto-Hardi Selamat Hood	1.244
2	Amsakar Achmad-Li ClaudiaChandra	4.636

Sumber: KPU Kota Batam

Data rekapitulasi hasil Pilkada Tahun 2024 menunjukkan bahwa masyarakat Pulau Bulang Lintang memiliki tingkat kehadiran yang cukup baik dalam menggunakan hak pilihnya. Tingkat partisipasi tersebut menjadi indikator bahwa masyarakat memiliki kesadaran politik yang relatif tinggi dalam menentukan pemimpin daerah. Meskipun demikian, capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung, salah satunya adalah peran tokoh masyarakat yang

aktif mengajak, memberikan pemahaman, serta membangun kesadaran warga mengenai pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada.⁸

Tokoh masyarakat di Pulau Bulang Lintang yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, Ketua RT/RW, dan tokoh pemuda memiliki posisi yang strategis dalam kehidupan sosial masyarakat. Kedekatan mereka dengan warga menjadikan tokoh masyarakat sebagai figur yang dipercaya dan dihormati. Kepercayaan tersebut memungkinkan pesan-pesan mengenai pentingnya menggunakan hak pilih dapat diterima dengan lebih baik oleh masyarakat dibandingkan melalui sosialisasi formal yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.⁹

Selain itu, kondisi geografis Pulau Bulang Lintang sebagai wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan informasi menjadikan peran tokoh masyarakat semakin penting. Dalam situasi tersebut, tokoh masyarakat berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat. Mereka membantu menyampaikan informasi mengenai tahapan Pilkada, jadwal pemungutan suara, lokasi TPS, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik dalam pembangunan daerah.¹⁰

Peran tokoh masyarakat juga terlihat dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan menciptakan suasana yang kondusif selama pelaksanaan Pilkada. Melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan, tokoh masyarakat mengajak warga untuk tetap menjaga persatuan meskipun memiliki pilihan politik yang berbeda. Dengan demikian, proses demokrasi dapat berlangsung secara damai, tertib, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

Meskipun demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di wilayah kepulauan, khususnya di Pulau Bulang Lintang. Padahal, karakteristik sosial dan geografis wilayah tersebut memiliki keunikan tersendiri

⁸ Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Rekapitulasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Kecamatan Bulang (Batam: KPU Kota Batam, 2024).

⁹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 242–243.

¹⁰ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 367–369.

yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk peran tokoh masyarakat, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran tersebut, serta kontribusinya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Pulau Bulang Lintang Kecamatan Bulang Kota Batam."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah “Bagaimana Peran tokoh Masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Peilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Pulau Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam”?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis peran tokoh Masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 di Pulau Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam, melalui pendekatan deduktif yang menghubungkan teori pasrtisipasi politik umum dengan konteks lokal spesifik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya literatur ilmu pemerintahan dan politik, khususnya dalam bidang partisipasi politik di daerah kepulauan terpencil. Hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dengan memberikan wawasan mendalam tentang dinamika partisipasi politik di konteks pulau kecil, yang sering kali kurang dieksplorasi dalam studi sebelumnya. Secara spesifik, penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghubungkan teori umum partisipasi politik dengan fenomena lokal, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini terfokus pada aplikasi langsung temuan di lapangan, khususnya untuk meningkatkan efektivitas Pilkada dan partisipasi politik di daerah serupa. Temuan mengenai strategi mobilisasi oleh tokoh masyarakat dan rekomendasi untuk mengatasi tantangan geografis dapat diterapkan oleh praktisi dan pihak terkait untuk mendorong keterlibatan warga yang lebih tinggi, sehingga memperkuat demokrasi lokal dan pembangunan berkelanjutan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Peran

Teori peran menjelaskan bahwa setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat memiliki kedudukan atau status sosial tertentu yang disertai dengan seperangkat harapan perilaku. Harapan tersebut membentuk bagaimana seseorang seharusnya bertindak, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan posisi yang dimilikinya. Menurut Biddle (1986), peran merupakan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi atau kedudukannya dalam struktur sosial. Artinya, peran tidak hanya berkaitan dengan tindakan individu secara pribadi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh norma, nilai, serta ekspektasi sosial yang berkembang di masyarakat.¹¹

Dalam konteks kehidupan sosial dan politik, tokoh masyarakat menempati posisi yang penting karena memiliki status sebagai pemimpin informal yang diakui dan dihormati oleh warga. Pengakuan tersebut tidak selalu bersifat formal atau struktural, namun terbentuk melalui proses sosial yang panjang, seperti keteladanan, pengalaman, pengaruh moral, serta kedekatan dengan masyarakat.¹² Oleh karena itu, tokoh masyarakat sering kali dijadikan panutan dan rujukan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menentukan sikap dan pilihan politik.

Status sosial yang dimiliki tokoh masyarakat menyebabkan mereka menjalankan peran tertentu yang melekat pada kedudukannya. Peran ini memungkinkan tokoh masyarakat untuk memengaruhi pandangan, sikap, dan perilaku politik masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

¹¹ Bruce J. Biddle, *Recent Developments in Role Theory* (California: Annual Review of Sociology, 1986), hlm. 67.

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 243.

Masyarakat cenderung mempertimbangkan arahan, imbauan, atau contoh yang diberikan oleh tokoh masyarakat karena adanya kepercayaan dan hubungan sosial yang kuat.

Teori peran menekankan bahwa perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh harapan masyarakat terhadap peran yang dijalankannya. Tokoh masyarakat diharapkan mampu memberikan arahan, membangun kesadaran, serta menjaga keharmonisan sosial, termasuk dalam proses politik seperti pemilihan kepala daerah.¹³ Oleh sebab itu, peran tokoh masyarakat menjadi faktor penting dalam membentuk dan meningkatkan partisipasi politik warga, khususnya pada momen Pilkada.

Dalam penelitian ini, teori peran digunakan untuk menjelaskan bagaimana tokoh masyarakat menjalankan peran sosial dan politiknya dalam mendorong keterlibatan masyarakat pada Pilkada 2024 di Pulau Bulang Lintang. Tokoh masyarakat tidak bertindak sebagai aktor formal negara, tetapi sebagai figur sosial yang memiliki pengaruh normatif dan moral. Peran tokoh masyarakat dianalisis melalui beberapa bentuk peran utama yang relevan dengan konteks politik lokal, yaitu:

- a. Peran sebagai Pendidik Politik: Tokoh masyarakat berfungsi memberikan pemahaman dan pengetahuan politik kepada masyarakat. Melalui komunikasi sehari-hari, pertemuan warga, maupun kegiatan sosial, tokoh masyarakat dapat menjelaskan pentingnya Pilkada, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta dampak pilihan politik terhadap pembangunan daerah. Peran ini membantu masyarakat, khususnya pemilih awam, agar tidak bersikap apatis dan lebih memahami proses demokrasi.
- b. Peran sebagai Motivator Politik: Tokoh masyarakat berperan mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam Pilkada. Tokoh masyarakat memberikan dorongan moral, ajakan, serta contoh nyata dalam menggunakan hak pilih. Peran ini sangat penting

¹³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 367.

untuk meningkatkan semangat partisipasi politik, terutama di daerah yang tingkat partisipasinya cenderung menurun.

- c. Peran sebagai Mediator Politik: Tokoh masyarakat menjadi penghubung antara masyarakat dengan pihak terkait dalam Pilkada, seperti penyelenggara pemilu, pemerintah, maupun kandidat. Dalam peran ini, tokoh masyarakat membantu menyampaikan aspirasi, keluhan, atau kebutuhan masyarakat, sekaligus menjembatani perbedaan pandangan politik agar tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

2. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik yang bertujuan untuk memengaruhi pemilihan pemimpin serta pengambilan kebijakan publik.¹⁴ Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada kegiatan memberikan suara saat pemilihan umum, tetapi juga mencakup berbagai bentuk keterlibatan lain yang menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap kehidupan politik. McClosky (1968) menyatakan bahwa partisipasi politik meliputi aktivitas seperti memberikan suara, mengikuti kampanye, menghadiri pertemuan politik, serta berdiskusi dan menyampaikan pendapat mengenai isu-isu publik.

Huntington dan Nelson (1976) mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktivitas warga negara yang bertujuan memengaruhi pemilihan pejabat publik maupun kebijakan pemerintah. Definisi ini menekankan bahwa partisipasi bersifat sukarela dan berorientasi pada pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan politik. Dalam konteks Pilkada 2024, partisipasi politik masyarakat menjadi indikator penting untuk menilai kualitas demokrasi di tingkat lokal.¹⁵

Di Pulau Bulang Lintang, yang merupakan wilayah kepulauan di Kecamatan Bulang Kota Batam, tingkat partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi geografis yang terpisah dari pusat pemerintahan, keterbatasan akses layanan publik, minimnya informasi politik, serta dinamika sosial dan budaya masyarakat setempat.

¹⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 180-182.

¹⁵ Herbert McClosky, "Political Participation," dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* (New York: Macmillan, 1968).

Selain faktor geografis, kedekatan sosial masyarakat dengan tokoh lokal yang mereka percayai juga sangat memengaruhi partisipasi politik. Tokoh masyarakat memiliki posisi strategis karena dianggap memahami kondisi dan kebutuhan warga. Oleh karena itu, pandangan dan sikap politik yang disampaikan oleh tokoh masyarakat cenderung lebih mudah diterima dibandingkan informasi yang datang dari aktor politik formal. Hal ini menjadikan tokoh masyarakat sebagai penghubung penting antara masyarakat dan proses politik.

Untuk mengukur tingkat partisipasi politik masyarakat, digunakan beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Voting atau Pemilihan Umum: Merupakan bentuk partisipasi politik paling dasar dalam sistem demokrasi. Tingkat partisipasi pemilih dapat dilihat dari persentase warga yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada.
- b. Keanggotaan Partai Politik atau Organisasi: Partisipasi politik juga dapat diwujudkan melalui keanggotaan dalam partai politik, organisasi kemasyarakatan, serikat pekerja, atau kelompok advokasi.
- c. Partisipasi dalam Kampanye: Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kampanye, seperti menghadiri pertemuan kampanye atau menjadi relawan bagi kandidat tertentu.
- d. Protes dan Demonstrasi: Bentuk partisipasi politik yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan atau tuntutan terhadap kebijakan publik.
- e. Aktivisme Daring: Seiring dengan perkembangan teknologi, partisipasi politik juga berkembang dalam bentuk aktivitas daring melalui media sosial untuk membahas isu-isu politik.
- f. Kontak dengan Pejabat Publik: Partisipasi yang diwujudkan melalui penghubungan warga dengan pejabat publik untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan.
- g. Partisipasi Komunitas: Keterlibatan dalam kegiatan lokal seperti rapat warga, pemilihan kepala desa, atau inisiatif lingkungan yang memiliki

dimensi politik, seperti rapat warga, musyawarah desa, pemilihan kepala desa, atau inisiatif lingkungan.

Kajian teori ini menunjukkan bahwa peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik pada Pilkada 2024 di Pulau Bulang Lintang memiliki landasan teoritis yang kuat. Berbagai teori yang digunakan, seperti teori partisipasi politik, teori peran saling melengkapi dalam menjelaskan posisi strategis tokoh masyarakat dalam kehidupan politik lokal.¹⁶

Secara keseluruhan, tokoh masyarakat berfungsi sebagai pemimpin informal yang memiliki pengaruh besar terhadap sikap dan perilaku politik warga. Tokoh masyarakat berperan sebagai opinion leader, penyampai informasi politik, pemberi motivasi, sekaligus penggerak partisipasi masyarakat.¹⁷ Kepercayaan yang dimiliki tokoh masyarakat menjadikan mereka mampu menjembatani kepentingan masyarakat dengan proses politik formal, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada.

Faktor geografis dan budaya masyarakat Pulau Bulang Lintang semakin memperkuat pentingnya peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik. Kondisi wilayah kepulauan, keterbatasan akses informasi, serta kuatnya ikatan sosial membuat masyarakat lebih mudah menerima arahan dari tokoh lokal yang mereka kenal dan percayai.¹⁸

Oleh karena itu, keberhasilan peningkatan partisipasi politik pada Pilkada 2024 sangat dipengaruhi oleh sejauh mana tokoh masyarakat mampu menjalankan perannya secara efektif dalam mendorong keterlibatan warga.¹⁹

B. Kajian Yang Relevan

Penelitian mengenai peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik, khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024,

¹⁶ Bruce J. Biddle, *Recent Developments in Role Theory* (California: Annual Review of Sociology, 1986), hlm. 69; dan Herbert McClosky, "Political Participation," dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* (New York: The Macmillan Company & The Free Press, 1968), hlm. 252.

¹⁷ Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson, dan Hazel Gaudet, *The People's Choice* (New York: Columbia University Press, 1944), hlm. 151.

¹⁸ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 194.

¹⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 183.

telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa tokoh masyarakat memainkan peran penting sebagai penggerak partisipasi politik, penyampai informasi, sekaligus pemengaruh orientasi politik masyarakat di tingkat lokal.

Tabel 2. 1 Penelitian yang Relevan

NO	Judul Penelitian	Tahun	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEMPENGARUHI AFILIASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PILKADA 2024(Studi Kasus Kecamatan Panji, Situbondo)	2025	Farid Abdillah & Baktiawan Nusanto (Universitas Muhammadiyah Jember).	Kualitatif	Tokoh agama berperan signifikan sebagai opinion leader yang memengaruhi afiliasi politik warga; faktor kultural dan legitimasi agama memperkuat pengaruh tersebut sehingga memengaruhi pola dukungan pada Pilkada 2024
2	Komunikasi Politik Tokoh Masyarakat dalam Menghadapi Pemilu 2024 (Studi Kasus pada Tokoh Pemuka Pendapat Desa Jatimulyo, Jember).	2023	Mh. Sahal Ali Syabana & Suyono (Universitas Muhammadiyah Jember).	Kualitatif	Tokoh masyarakat berfungsi sebagai penyampai informasi, penafsir isu politik, dan gatekeeper; model komunikasi dua-langkah terlihat jelas: media → tokoh → masyarakat, meningkatkan pemahaman dan (pada beberapa kelompok) partisipasi.

NO	Judul Penelitian	Tahun	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3	Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu 2024 (artikel analisis/field report) studi aspek keterlibatan warga dan faktor pengaruh loka	2025	S. Kamuli dkk. (jurnal/analisis lokal).	Deskriptif analitis (data lapangan dan wawancara).	Menemukan hambatan partisipasi (literasi politik rendah, politik uang, keterbatasan outreach); rekomendasi termasuk penguatan peran tokoh lokal sebagai fasilitator sosialisasi untuk mengatasi hambatan tersebut.
4	Penguatan Peran Politik Masyarakat dalam Pemilihan (pengabdian/pelatihan) — studi lapangan (IAIN Lhokseumawe).	2024	Tim pengabdian civitas akademika IAIN Lhokseumawe.	Kuantitatif	program edukasi/pelatihan yang melibatkan tokoh masyarakat meningkatkan kesadaran dan niat partisipasi warga; peningkatan terukur setelah intervensi (sebagai bukti efektivitas keterlibatan tokoh lokal).
5	Upaya KPU Kota Serang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Serentak 2024 — evaluasi peran lembaga dan	2025	Y. Oci (Journal Unas / studi lapangan).	Kualitatif	Ditemukan sinergi antara KPU dan tokoh masyarakat (sebagai mitra sosialisasi) efektif meningkatkan partisipasi; rekomendasi memperkuat pelibatan tokoh dalam strategi outreach KPU.

NO	Judul Penelitian	Tahun	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	aktor lokal.				
6	Indeks & Analisis Partisipasi Pemilih (dokumen KPU / bahan ajar terkait Pemilu 2024) sumber teknis berisi faktor-faktor partisipasi.	2024	KPU (dokumen resmi / bahan ajar).	Kuantitatif	Menyebutkan faktor pendorong: literasi politik, akses informasi, mobilisasi lokal di mana tokoh masyarakat disebut sebagai salah satu aktor penting dalam mobilisasi lokal.
7	Peran Tokoh Masyarakat dalam Mempengaruhi Perilaku Memilih Warga (studi desa/komunitas) artikel-jurnal/ejournal terkait perilaku memilih (kasus lain, relevan metodologinya).	2025	Fariz Aditya & Raja S. Pratama (Unimed).	Kualitatif	Hasil menunjukkan variasi peran tokoh (formal vs keagamaan); beberapa tokoh aktif memobilisasi, sementara tokoh keagamaan kerap bersikap netral untuk menjaga keharmonisan implikasinya terhadap partisipasi bersifat kontekstual.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaannya terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas peran tokoh masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu maupun Pilkada. Sebagian besar penelitian terdahulu juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami pengaruh tokoh masyarakat terhadap perilaku politik warga.

Perbedaan sekaligus kebaruan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian spesifik, yakni di wilayah kepulauan terpencil Pulau Bulang Lintang dengan karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang unik. Penelitian ini tidak hanya meneliti satu jenis tokoh tertentu, melainkan mengkaji secara komprehensif seluruh kategori tokoh masyarakat yang ada, meliputi tokoh adat, tokoh agama, ketua RT/RW, tokoh pemuda, dan tokoh nelayan.

C. Definisi Konseptual

1. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah individu yang memiliki status sosial, pengaruh, dan legitimasi di tengah masyarakat karena kedudukan formal maupun informalnya.²⁰ tokoh masyarakat dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti tokoh adat, tokoh agama, ketua RT/RW, atau figur lokal yang dihormati oleh warga. Pengaruh yang dimiliki tokoh masyarakat tidak selalu bersumber dari jabatan resmi, tetapi lebih banyak berasal dari kepercayaan, keteladanan, pengalaman, serta peran aktifnya dalam kehidupan sosial masyarakat.²¹

2. Peran Tokoh Masyarakat

Peran tokoh masyarakat merupakan serangkaian perilaku, fungsi, dan tindakan yang dijalankan oleh tokoh masyarakat sesuai dengan status dan harapan sosial yang melekat padanya. Konsep ini merujuk pada Teori Peran yang dikemukakan oleh Biddle (1986), yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh ekspektasi sosial terhadap peran yang dimilikinya.

Dalam penelitian ini, peran tokoh masyarakat dianalisis melalui tiga bentuk

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 213.

²¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 150.

peran utama, yaitu sebagai pendidik politik, motivator politik, dan mediator politik.

Dalam penelitian ini, peran tokoh masyarakat dianalisis melalui beberapa bentuk peran utama sebagai berikut:

- a. Pendidik Politik: Tokoh masyarakat berperan sebagai pendidik politik dengan memberikan pemahaman, informasi, dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban politik,²² pentingnya Pilkada, serta proses pemilihan kepala daerah. Pendidikan politik ini dilakukan melalui pertemuan warga, percakapan sehari-hari, kegiatan keagamaan, atau forum sosial lainnya.
- b. Mediator Politik: Tokoh masyarakat juga berperan sebagai mediator politik, yaitu menjadi penghubung antara masyarakat dengan penyelenggara pemilu²³ atau aktor politik lainnya. Dalam peran ini, tokoh masyarakat membantu menyampaikan aspirasi, keluhan, atau kebutuhan masyarakat, sekaligus menjelaskan kebijakan atau aturan pemilu kepada warga.
- c. Motivator politik: Sebagai motivator politik, tokoh masyarakat berperan mendorong dan membangkitkan kesadaran serta kemauan masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik, khususnya dalam menggunakan hak pilih.²⁴ Tokoh masyarakat memberikan dorongan moral, ajakan persuasif, dan contoh nyata dalam partisipasi pada Pilkada.

3. Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik masyarakat adalah keterlibatan warga negara secara sukarela dalam kegiatan politik untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan politik.²⁵ Konsep ini merujuk pada teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh (Huntington & Nelson). Yang menyatakan bahwa Partisipasi politik merupakan aktivitas warga Negara yang bertujuan memengaruhi

²² Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations* (Princeton: Princeton University Press, 1963), hlm. 14.

²³ Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951), hlm. 25.

²⁴ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* (Cambridge: Harvard University Press, 1976), hlm. 3.

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 367.

pemilihan pejabat publik maupun kebijakan pemerintah.²⁶ Partisipasi ini mencerminkan tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kehidupan politik, yang dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk aktivitas politik.²⁷

Partisipasi politik tidak hanya sebatas pada pemberian suara dalam pemilu, tetapi juga mencakup berbagai bentuk keterlibatan lain yang menunjukkan kepedulian terhadap proses politik.²⁸

4. Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2024

Partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 adalah perwujudan konkret dari partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Partisipasi ini ditunjukkan melalui perilaku politik masyarakat selama tahapan Pilkada berlangsung.

- a. Menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara.
- b. Mengikuti kegiatan kampanye atau sosialisasi Pilkada
- c. Terlibat dalam diskusi atau pembivaraan politik terkait Pilkada

Dengan menggunakan Teori peran Teori partisipasi politik, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran tokoh masyarakat sebagai pendidik, mediator, dan motivator politik dapat memengaruhi tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di Pulau Bulang Lintang. Pengukuran peran tokoh masyarakat dan partisipasi politik dilakukan melalui instrument penelitian lapangan yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan geografis di wilayah kepulauan.²⁹

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran konsep-konsep penelitian ke dalam indikator yang dapat diamati dan diukur secara empiris di lapangan.

²⁶ Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* (Cambridge: Harvard University Press, 1976), hlm. 3–4.

²⁷ Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations* (Princeton: Princeton University Press, 1963), hlm. 13.

²⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 180.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 142.

Dalam penelitian kualitatif, definisi operasional berfungsi sebagai panduan pengumpulan dan analisis data secara sistematis.

Tokoh masyarakat dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai individu yang diakui memiliki pengaruh sosial di lingkungan Pulau Bulang Lintang, dengan indikator:

1. Diakui oleh warga sebagai tokoh adat, tokoh agama, ketua RT/RW, tokoh pemuda, atau tokoh informal
2. Memiliki keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial, adat, keagamaan, atau kepemimpinan setempat
3. Menjadi rujukan warga dalam mengambil keputusan sosial maupun politik
4. Memiliki kemampuan mempengaruhi pandangan atau perilaku masyarakat.

Peran tokoh masyarakat dioperasionalkan melalui tiga dimensi:

- a. Peran sebagai Pendidik Politik, yang meliputi kegiatan penyampaian informasi tentang Pilkada, penjelasan prosedur pemungutan suara, dan pemberian pemahaman mengenai pentingnya menggunakan hak pilih
- b. Peran sebagai Motivator Politik, yang meliputi ajakan langsung kepada warga untuk hadir ke TPS, pemberian dorongan moral, dan keteladanan dalam berpartisipasi
- c. Peran sebagai Mediator Politik, yang meliputi fungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan penyelenggara Pilkada, serta upaya menjaga keharmonisan sosial selama proses pemilihan.

Partisipasi politik dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui empat dimensi:

- a) Bentuk Partisipasi, meliputi kehadiran di TPS dan keterlibatan dalam sosialisasi
- b) Motivasi Memilih, meliputi alasan masyarakat berpartisipasi dan pengaruh tokoh masyarakat
- c) Hambatan Partisipasi, meliputi kendala geografis, informasi, dan sosial-ekonomi

- d) Pengalaman Pemilih, meliputi persepsi masyarakat mengenai Pilkada 2024.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah alur pemikiran yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan bagaimana penelitian ini dilaksanakan sejak tahap awal hingga tahap akhir. Kerangka berpikir berfungsi sebagai pedoman dalam memahami hubungan antarkonsep dan variabel yang diteliti, sehingga penelitian yang dilakukan memiliki arah yang jelas, logis, dan rasional.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Dalam penelitian ini, kerangka berpikir dimulai dari keberadaan tokoh masyarakat yang memiliki status sosial dan legitimasi di tengah masyarakat. Tokoh masyarakat dipandang sebagai individu yang dihormati, dipercaya, dan memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan sosial, termasuk dalam bidang politik. Kedudukan tersebut menjadikan tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam membentuk sikap, pandangan, dan perilaku politik masyarakat di lingkungannya.

Selanjutnya, peran tokoh masyarakat dianalisis berdasarkan Teori peran (Biddle), yang menekankan bahwa setiap individu memiliki peran sesuai dengan

kedudukan sosial yang melekat padanya.³⁰ Dalam konteks penelitian ini, tokoh masyarakat menjalankan peran sebagai pendidik politik, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya demokrasi dan pemilihan kepala daerah, selain itu tokoh masyarakat juga berperan sebagai motivator politik, yang mendorong masyarakat agar tidak bersikap apatis, serta sebagai mediator politik yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan penyelenggara maupun aktor politik.

Peran tersebut berpengaruh terhadap proses sosialisasi dan peningkatan kesadaran politik masyarakat. Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik individu melalui interaksi sosial.³¹

Peningkatan kesadaran politik kemudian mendorong partisipasi politik masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam teori partisipasi politik oleh Huntington dan Nelson, yang menyatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga Negara yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi politik dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk penggunaan hak pilih, keterlibatan dalam kampanye, serta diskusi politik di lingkungan masyarakat.³² Tingkat partisipasi pemilih kemudian menjadi indikator kualitas demokrasi lokal³³

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

³⁰ Bruce J. Biddle, *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors* (New York: Academic Press, 1979), hlm. 3–5.

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 213.

³² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 180.

³³ Robert A. Dahl, *On Democracy* (New Haven: Yale University Press, 1998), hlm. 37.

Jenis penelitian yang dilakukan penelitian adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif menurut Bongdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁴ Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut sebagai metode penelitian kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.³⁵

Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Pulau Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami fenomena sosial-politik yang terjadi di lapangan secara lebih komprehensif dan kontekstual, termasuk makna-makna yang dilekatkan oleh para informan terhadap peran mereka dalam proses demokratisasi di tingkat lokal.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pulau Bulang Lintang, Kelurahan Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah ini termasuk kawasan kepulauan dengan akses transportasi dan informasi yang terbatas serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang didominasi oleh sektor kelautan dan pekerjaan informal.

Dalam kehidupan sosial dan politik, masyarakat Pulau Bulang Lintang masih sangat dipengaruhi oleh peran tokoh lokal dan hubungan kekerabatan yang kuat. Kondisi tersebut berpengaruh signifikan terhadap perilaku politik masyarakat, khususnya dalam hal partisipasi pada pemilihan kepala daerah. Tokoh

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm 4.

³⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm 16.

masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, ketua RT/RW, dan tokoh pemuda memiliki pengaruh besar dalam menggerakkan warga untuk turut serta dalam proses demokrasi lokal.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu untuk mengkaji peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Pulau Bulang Lintang pada Pilkada Tahun 2024. Kondisi geografis kepulauan yang khas menjadikan peran tokoh masyarakat semakin strategis sebagai jembatan komunikasi antara penyelenggara pemilu dan warga setempat.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama berupa pengamatan atau observasi secara langsung yang didukung oleh wawancara terhadap informan atau pihak-pihak yang bersangkutan.³⁶ Adapun yang menjadi objek dalam sumber data ini adalah tokoh masyarakat dan warga di Pulau Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam. Pengambilan data melalui wawancara akan dilakukan di Pulau Bulang Lintang, dimana akan diwawancarai sebanyak 11 orang informan.

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

N O	Informan	Jumlah
1	Tokoh Masyarakat (Ketua RT, Ketua RW)	2
2	Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda	3
3	Penyelenggara Pemilu (KPPS)	1
4	Masyarakat Pemilih	3
5	Masyarakat Tidak Ikut Memilih	2

³⁶ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2019. hlm 218.

Adapun teknik penentu informan menggunakan (purposive sampling), yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas tujuan tertentu, (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel). Kriteria informan yaitu: mereka yang mengetahui dan terlibat langsung dalam peran tokoh masyarakat terhadap partisipasi politik warga pada Pilkada Tahun 2024 di Pulau Bulang Lintang. Adapun key informan yang akan dimintai data, informasi, informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu:

- a. Informan kunci (key informant), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini Ketua RT dan Ketua RW yang menjadi informan kunci sebanyak 2 orang.
- b. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda, sebanyak 2 orang.
- c. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan data walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan dalam penelitian ini terdiri dari Tokoh Adat, Masyarakat yang tidak mengikuti memilih, anggota KPPS, serta masyarakat pemilih, sebanyak 7 orang.
- d. Berdasarkan uraian di atas, maka informan ditentukan dengan teknik purposive, yaitu penentuan informan tidak didasarkan pedoman atau berdasarkan perwakilan populasi, namun berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan, yaitu dengan menemukan informan kunci yang kemudian akan dilanjutkan dengan informan lainnya dengan tujuan mengembangkan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya, tetapi diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, profil Kota Batam, dan profil Pulau Bulang Lintang. Data sekunder merupakan data atau informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang berhubungan dengan masalah penelitian, rekapitulasi jumlah pemilih, jumlah TPS, maupun aktivitas sosial dan politik masyarakat yang terangkum dalam aktivitas partisipasi politik warga pada Pilkada Tahun 2024 di Pulau Bulang Lintang.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan. Menurut Moleong (2018), observasi adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi sosial masyarakat Pulau Bulang Lintang, meliputi:

- a. Interaksi tokoh masyarakat dengan warga
- b. Aktivitas sosial masyarakat
- c. Kondisi geografis wilayah penelitian
- d. Situasi sosial yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2019), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan pedoman wawancara, namun tetap memberi

kebebasan kepada informan untuk menjelaskan secara lebih luas sesuai pengalaman dan pengetahuannya. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi mengenai:

- a. Peran tokoh masyarakat dalam Pilkada 2024
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat
- c. strategi tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik
- d. hambatan yang dihadapi tokoh masyarakat dalam menjalankan perannya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen tertulis, arsip, foto, maupun data resmi yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Arikunto (2019), dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan:

- a. Data Jumlah Pemilih tetap (DPT) Pilkada 2020 dan 2024
- b. Data tingkat partisipasi politik masyarakat
- c. Dokumen resmi dari PPS/KPU
- d. Foto kegiatan masyarakat
- e. Arsip kegiatan sosialisasi Pilkada.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman dan kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai dilakukan.

Menurut Miles and Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai data mencapai titik jenuh.³⁷ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis interaktif yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

³⁷ Miles and Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (California: Sage Publications, 1994), hlm. 10.

1. Pengumpulan Data (Data Collection): Tahap pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai peran tokoh masyarakat dalam Pilkada 2024, tingkat partisipasi politik masyarakat, faktor penyebab perubahan partisipasi, dan hambatan yang dihadapi tokoh masyarakat.
2. Reduksi Data (Data Reduction): Proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian akan disederhanakan atau tidak digunakan dalam analisis.
3. Penyajian Data (Data Display): Data disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, grafik, maupun bagan untuk mempermudah peneliti dalam memahami hasil penelitian secara keseluruhan dan melihat hubungan antara peran tokoh masyarakat dengan tingkat partisipasi politik.
4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification): Penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan data baru yang lebih kuat selama proses penelitian berlangsung. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasikan kembali dengan data lapangan agar hasil penelitian memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2018), triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

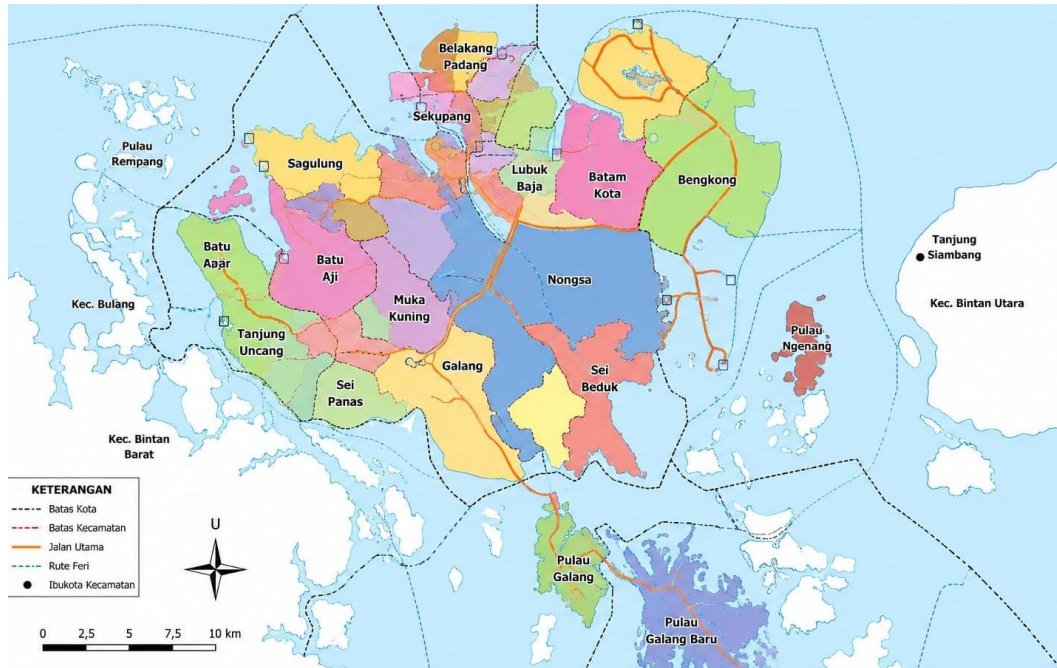
1. Membandingkan hasil wawancara antara informan yang satu dengan informan yang lain
2. Membandingkan hasil observasi dengan data dokumentasi
3. Membandingkan data lapangan dengan teori yang digunakan. Teknik-teknik ini diterapkan secara bersamaan dan saling melengkapi untuk menghasilkan temuan penelitian yang valid dan dapat dipercaya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Batam

Gambar 4. 1 Peta Kota Batam



Kota Batam yang berada di Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu kota dengan potensi pertumbuhan terpesat di Indonesia. Letaknya yang sangat strategis, berdekatan dengan Singapura, menjadikan Kota Batam sebagai salah satu destinasi utama bisnis dan perdagangan internasional.

Awalnya, pada tahun 1970 pemerintah membangun Kota Batam dan mengembangkannya sebagai kawasan industri dan perdagangan. Saat itu kota ini dihuni sekitar 6.000-an penduduk. Dalam tempo 40 tahun, penduduk Batam bertambah hingga 170 kali lipat, sebagai dampak masifnya pembangunan infrastruktur dan properti di kota Batam. Luas wilayah Kota Batam seluas 423.463,28 Ha, terdiri dari luas wilayah darat 108.265 Ha dan luas wilayah laut/perairan 318.298,28 Ha. Kota Batam meliputi lebih dari 400 pulau, 329 di

antaranya telah bernama, termasuk pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan negara.

Dalam hal ini kota batam berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Singapura dan Malaysia
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga
- Sebelah Barat : Kabupaten Karimun dan Laut Internasional
- Sebelah Timur : Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang

Kota Batam sekarang merupakan kota dalam arti sebagai suatu daerah otonom yang bersama 7 kabupaten provinsi riau berdasarkan UU no 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Sengingi dan Kota Batam. Lembaga Kota Batam merupakan logo Kota Batam yang menjadi identitas dan jati diri Kota Batam dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.2 Lambang Kota Batam



Arti dari Lambang Kota Batam adalah sebagai berikut:

- 1 Bintang : Melambangkan masyarakat Batam yang religius dan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2 Keris : Simbol keperkasaan dan kepahlawanan Laksamana Hang Melayu Nadim, serta lambang kebenaran.

- 3 Jembatan : Ikon kota yang mewakili kegiatan pembangunan, Barelang menjembatani kemajuan industri, perdagangan, pariwisata, dan alih kapal.
- 4 Gelombang : Melambangkan bahwa masyarakat Batam bekerja dengan Lima Lapis dasar Pancasila, serta posisi geografis Batam yang dikelilingi lautan.
- 5 Perahu : Simbol keperkasaan di laut dan penguasaan wilayah perairan. Dendang
- 6 Rantai : Melambangkan persatuan dan kesatuan antar masyarakat yang heterogen

Arti Warna Lambang Daerah Kota Batam yaitu:

1. Arti Warna Lambang Daerah

a. Warna Utama

- a) Merah: Melambangkan keberanian dan kekuatan.
- b) Kuning: Melambangkan keagungan dan kejayaan.
- c) Hijau: Melambangkan kesuburan dan kemakmuran.

b. Warna Pendukung

- a) Hitam: Keabadian
- b) Putih: Kesucian
- c) Biru: Ketenangan

a) Visi dan Misi Kota Batam

1) Visi Kota Batam

“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”

b) Misi Kota Batam

Misi digunakan dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah di paparkan diatas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan diatas, akan ditempuh melalui 5 misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Mensukseskan misi pemerintah untuk mengembangkan Kota Batam sebagai Bandar Modern berskala internasional sebagai kawasan investasi dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan, kawasan industri besar, menengah kecil, koperasi, usaha rumah tangga, industri pariwisata, pusat perbelanjaan dan kuliner, hiburan, pengelolaan sumberdaya kelautan melalui kerjasama dengan Pengelola Kawasan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya.
- 2) Mengembangkan sistem pendukung strategis penataan ruang terpadu meliputi komponen fasilitas sarana dan prasarana sistem transportasi darat laut dan udara yang memadai, sistem telekomunikasi dan teknologi informasi (ICT) modern dan prima, ekosistem hutan kota, penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, aman, nyaman dan lestari.
- 3) Meningkatkan pelayanan prima dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, ketenagakerjaan, sosial budaya, fasilitasi keimanan dan ketaqwaan, kepemudaan dan olahraga agar kualitas hidup manusia dan kecerdasan seluruh lapisan masyarakat meningkat serta pengentasan kemiskinan.
- 4) Menumbuhkan kehidupan yang harmonis dan berbudi pekerti atas dasar nilai multi etnis, multi kultur, multi agama dan melestarikan nilai-nilai seni budaya melayu, kearifan lokal dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.
- 5) Mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa.

2. Kondisi Sosial Politik Masyarakat Pulau Bulang Lintang

Kondisi sosial masyarakat Pulau Bulang Lintang mencerminkan karakteristik masyarakat kepulauan yang memiliki tingkat kohesivitas sosial tinggi. Ikatan kekeluargaan dan ketetanggaan yang kuat menjadikan setiap keputusan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hal politik, kerap dipengaruhi oleh figur-figur yang dihormati dan dipercaya. Tokoh masyarakat, baik yang berperan sebagai pemimpin informal maupun formal, memegang otoritas moral yang besar di hadapan warga.

Dalam konteks politik, masyarakat Pulau Bulang Lintang menunjukkan dinamika yang unik. Di satu sisi, terdapat antusiasme warga untuk ikut serta dalam proses demokrasi, terutama karena mereka berharap pemimpin yang terpilih mampu membawa perubahan nyata bagi kondisi infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat kepulauan.

Di sisi lain, keterbatasan akses informasi dan jarak geografis menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Tidak jarang warga mengaku kurang mengenal kandidat yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah karena minimnya kampanye yang menjangkau pulau-pulau terluar. Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Batam Tahun 2024, Pulau Bulang Lintang termasuk dalam salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus oleh penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam. Keterpencilan wilayah, minimnya akses transportasi, serta keterbatasan infrastruktur komunikasi menjadi faktor yang berpotensi memengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Dalam kondisi demikian, keberadaan tokoh masyarakat menjadi jembatan penting antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan masyarakat pemilih.

3. Gambaran Umum Kelurahan Bulang Lintang

Kelurahan Bulang Lintang merupakan satu dari 6 Kelurahan yang berada di Kecamatan Bulang, dengan luas wilayah $\pm 54,6$ Ha dan berbatasan langsung dengan Kelurahan Kasu di sebelah Utara, Kelurahan Batu Legong di sebelah Selatan, Kelurahan Sungai Langkai di sebelah Timur dan Kelurahan Pantai Gelam di sebelah Barat. Cukup 20 menit dari Pelabuhan Sagulung anda akan sampai di Bulang Lintang yang merupakan pusat pemerintahan Kelurahan

Bulang Lintang yang dikepalai seorang Lurah yaitu M. IRWAN, S.IP dengan jumlah penduduk sebanyak 1.854 jiwa dalam 536 Kepala Keluarga (KK). Kelurahan ini dibagi dalam 2 Rukun Warga (RW) dan 9 Rukun Tetangga (RT) yang meliputi 3 Pulau yaitu Pulau Bulang Lintang, Pulau Bulang Kebam dan Pulau Tanjung Kubu.

Mayoritas penduduk di Kelurahan ini bekerja sebagai nelayan, namun sarana di Kelurahan ini bisa dibilang sudah maju terbukti tersedianya sarana pendidikan yang lengkap mulai dari PAUD, TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri serta Madrasah Tsanawiyah Swasta dan Madrasah Aliyah Swasta ada disini. Anak-anak yang berasal dari Kelurahan-kelurahan lain di Kecamatan Bulang pun ada sebagian yang bersekolah di Bulang Kebam untuk tingkat SD dan SMP. Untuk anak Bulang Lintang dengan senang hati menyebrang untuk bersekolah di Bulang Kebam dengan jarak yang dekat dan transportasi yang mudah. Untuk sarana peribadatan juga tersedia seperti Masjid dan Musholla.

Masyarakat disini termasuk masyarakat yang ramah dan senang berolahraga terutama olahraga volly, dengan tersedianya berbagai sarana dan prasarana olahraga seperti lapangan sepakbola, lapangan Volly serta lapangan Takraw dirasa cukup untuk menyalurkan hobi olahraga masyarakat disini.

Untuk sarana Kesehatan di Kelurahan Bulang Lintang memiliki 2 Pustu (Puskesmas Pembantu), Pustu Melati 1 yang bertempat di Pulau Bulang Lintang dan Pustu Melati 2 yang bertempat di Pulau Bulang Kebam.

4. Profil Informan Penelitian

Penelitian ini melibatkan 11 orang informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan fokus penelitian. Informan terdiri atas Ketua RW, Ketua RT, anggota KPPS, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, Ketua Kelompok Nelayan, masyarakat yang mengikuti Pilkada, serta masyarakat yang tidak mengikuti Pilkada Tahun 2024.

Table 4.3 Tabel Profil Informan

NO	Nama Infrman	Jabatan/Kedudukan	Keterangan
1	Bapak Gani	Ketua RW	Memberikan informasi mengenai peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Tahun 2024.
2	Bapak Ahmad Sobur	Ketua RT	Memberikan informasi mengenai peran tokoh masyarakat sebagai pendidik, motivator, dan mediator politik.
3	Bapak Syukur Andila	Anggota KPPS	Memberikan informasi mengenai pelaksanaan Pilkada dan kerja sama dengan tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pemilih.
4	Bapak Abu Bakar	Tokoh Agama	Memberikan informasi mengenai peran tokoh agama dalam memberikan pendidikan politik dan motivasi kepada masyarakat.
5	Bapak Rahim	Tokoh Adat	Memberikan informasi mengenai peran tokoh adat dalam membangun kesadaran politik masyarakat.
6	Bapak Idas Rizal	Tokoh Pemuda	Memberikan informasi mengenai peran tokoh pemuda dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda.
7	Ibu Zaleha	Masyarakat Pemilih	Memberikan informasi mengenai pengalaman menerima sosialisasi

			dan pendidikan politik dari tokoh masyarakat.
8	Ibu Rukiah	Masyarakat Pemilih	Memberikan informasi mengenai pengalaman menerima sosialisasi dan pendidikan politik dari tokoh masyarakat serta alasan menggunakan hak pilih pada Pilkada Tahun 2024.
9	Ibu Ida Lela	Masyarakat Pemilih	Menjelaskan pengaruh motivasi yang diberikan tokoh masyarakat terhadap partisipasi politik.
10	Bapak Awie	Masyarakat(Tidak Mengikuti Pilkada)	Tidak menggunakan hak pilih karena kesibukan bekerja sebagai nelayan sehingga tidak dapat hadir di TPS pada hari pemungutan suara.
11	Ibu Zunaidah	Masyarakat(Tidak Mengikuti Pilkada)	Tidak menggunakan hak pilih karena kurang memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Pilkada dan jadwal pemungutan suara.

Tokoh masyarakat dipilih karena memiliki peran strategis dalam memberikan pendidikan politik, memotivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih, serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan penyelenggara pemilu. Sementara itu, anggota KPPS dipilih karena memiliki pengetahuan mengenai pelaksanaan teknis Pilkada dan berinteraksi langsung dengan masyarakat selama tahapan pemilihan berlangsung. Informan dari kalangan masyarakat yang mengikuti Pilkada dipilih untuk mengetahui pengaruh peran tokoh masyarakat terhadap partisipasi politik mereka.

Adapun informan yang tidak mengikuti Pilkada dipilih untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya, seperti kondisi kesehatan, kesibukan bekerja, maupun keterbatasan informasi.

Keberagaman latar belakang informan memberikan data yang lebih komprehensif sehingga peneliti dapat memperoleh berbagai sudut pandang mengenai peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kelurahan Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 11 informan, dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat memiliki peran yang penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui fungsi sebagai pendidik politik, motivator politik, dan mediator politik. Selain itu, keberadaan informan yang mengikuti maupun tidak mengikuti Pilkada memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat. Dengan demikian, data yang diperoleh dari berbagai latar belakang informan saling melengkapi dan memperkuat hasil penelitian melalui triangulasi sumber, sehingga temuan penelitian menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pilkada Tahun 2024 di Pulau Bulang Lintang

Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 27 November 2024 tidak hanya merepresentasikan proses pemilihan kepala daerah, tetapi juga menggambarkan dinamika hubungan politik yang berkembang di tingkat lokal. Di Kelurahan

Bulang Lintang, kontestasi politik berlangsung dalam struktur sosial masyarakat yang masih ditandai oleh kuatnya relasi personal, kedekatan sosial, serta ketergantungan masyarakat terhadap tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh ekonomi maupun sosial.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, ditemukan bahwa tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam kehidupan sosial dan politik warga Pulau Bulang Lintang terdiri dari beberapa kategori, yaitu:

1. Tokoh adat
2. Tokoh agama (imam masjid)
3. Tokoh pemerintahan lokal (ketua RT/RW)
4. Tokoh pemuda dan organisasi kemasyarakatan

1. Peran Tokoh Masyarakat sebagai Pendidik Politik

Peran tokoh masyarakat sebagai pendidik politik merupakan salah satu bentuk peran yang penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat. Dalam penelitian ini, peran tersebut dilihat dari kemampuan tokoh masyarakat dalam menyampaikan informasi mengenai Pilkada, memberikan pemahaman mengenai proses pemilihan, menjelaskan pentingnya menggunakan hak pilih, serta membantu masyarakat memahami informasi politik yang diterima. Hal ini sesuai dengan indikator operasional penelitian yang mencakup penyampaian informasi Pilkada, penjelasan prosedur pemungutan suara, dan pemberian pemahaman mengenai pentingnya menggunakan hak pilih.

Gambar 4.4 Ketua RT mendampingi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam kegiatan pencocokan penelitian data pemilih (Coklit) di Kelurahan BulangLintang, Kecamatan Bulang,



Gambar 4.4 menunjukkan Ketua RT bersama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sedang melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih (Coklit). Dalam kegiatan tersebut, Ketua RT berperan membantu Pantarlih dalam memberikan informasi mengenai data warga serta mengarahkan masyarakat agar terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada Tahun 2024. Selain membantu kelancaran pendataan pemilih, Ketua RT juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak pilih dalam Pilkada. Keterlibatan Ketua RT dalam kegiatan ini menunjukkan perannya sebagai tokoh masyarakat yang turut mendukung penyelenggaraan demokrasi dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, peran tersebut dilakukan oleh beberapa tokoh masyarakat dengan cara yang berbeda sesuai dengan kedudukan dan lingkungan sosialnya.

Bapak Gani selaku Ketua RW menjelaskan bahwa dirinya bersama para Ketua RT berperan sebagai perpanjangan tangan pihak kelurahan dalam menyampaikan informasi mengenai Pilkada kepada masyarakat.

Bapak Gani selaku ketua RW menyatakan:

*"Saya selalu mengingatkan warga bahwa ikut memilih dalam Pilkada itu penting. Saya mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak golput, karena suara masyarakat sangat berpengaruh dalam menentukan pemimpin daerah untuk lima tahun ke depan."*³⁸

³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Gani selaku Ketua RW Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 30 Mei 2026

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Ketua RW tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai arti penting penggunaan hak pilih.

Hal yang hampir sama disampaikan Bapak Ahmad Sobur selaku Ketua RT. Ia menjelaskan bahwa informasi mengenai jadwal Pilkada dan kegiatan COKLIT disampaikan kepada warga melalui pertemuan di lingkungan masyarakat.

Bapak Ahmad Sobur selaku Ketua RT menyatakan:

*"Kami selalu mengajak warga untuk datang ke TPS dan ikut berpartisipasi dalam Pilkada. Kami juga menyarankan masyarakat agar mencari informasi yang benar mengenai calon pemimpin sebelum menentukan pilihannya."*³⁹

Temuan ini memperlihatkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan Ketua RT tidak hanya berkaitan dengan kapan masyarakat harus memilih, tetapi juga diarahkan pada bagaimana masyarakat memperoleh informasi yang benar sebelum menentukan pilihan.

Sementara itu, Bapak Abu Bakar selaku tokoh agama memberikan pendidikan politik melalui pendekatan moral dan sosial. Ia menyampaikan:

*"Saya selalu mengingatkan masyarakat bahwa memilih pemimpin merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu masyarakat harus menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana dan memilih berdasarkan pertimbangan yang baik."*⁴⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tokoh agama memberikan pemahaman mengenai hak pilih melalui nilai tanggung jawab dan pertimbangan yang baik dalam menentukan pilihan.

Berbeda dengan tokoh agama, Bapak Rahim selaku tokoh adat lebih menekankan pada kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi politik. Ia menyampaikan:

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Sobur selaku Ketua RT Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 30 Mei 2026

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Abu Bakar selaku tokoh agama Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 30 Mei 2026

*"Kami memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar. Masyarakat harus mencari informasi yang jelas dan memahami program calon sebelum menentukan pilihan."*⁴¹

Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan politik tidak hanya berupa penyampaian informasi, tetapi juga mendorong masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi politik.

Selanjutnya, Bapak Idas Rizal selaku tokoh pemuda menyoroti kelompok pemilih muda. Ia menjelaskan bahwa sebagian pemilih muda masih kurang peduli terhadap hak pilih sehingga perlu diberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai politik

Bapak Idas Rizal selaku tokoh pemuda menjelaskan:

*"Kami mengajak pemilih muda untuk lebih peduli terhadap politik dan memahami bahwa suara mereka memiliki peran penting dalam menentukan masa depan daerah."*⁴²

Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan politik juga diarahkan untuk mengatasi rendahnya pemahaman politik pada kelompok pemilih muda.

Selain tokoh masyarakat, Bapak Syukur Andila selaku anggota KPPS memperkuat temuan tersebut dengan menjelaskan bahwa sebelum pemungutan suara masyarakat diberikan informasi mengenai jadwal pemungutan suara, tata cara pencoblosan, dan persyaratan yang harus dipenuhi pemilih.

Bapak Awie selaku Masyarakat yang tidak hadir saat Pilkada mengatakan:

*"Ye, tokoh masyarakat sudah memberikan penjelasan kepada warga tentang pentingnya menggunakan hak pilih. Mereka juga mengingatkan jadwal pemungutan suara dan mengajak kami datang ke TPS. Namun, saya tidak bisa ikut memilih karena sedang melaut."*⁴³

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahim selaku Tokoh adat Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 30 Mei 2026

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Idas selaku Tokoh pemuda Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 30 Mei 2026

⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak Awie selaku Masyarakat yang tidak hadir saat Pilkada Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 30 Mei 2026

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Awie dapat diketahui bahwa tokoh masyarakat telah menjalankan perannya sebagai pendidik politik dengan memberikan informasi mengenai Pilkada, jadwal pemungutan suara, serta mengajak masyarakat menggunakan hak pilih. Ketidakhadiran beliau dalam Pilkada bukan disebabkan oleh kurangnya edukasi politik, melainkan karena faktor pekerjaan sebagai nelayan yang mengharuskannya melaut pada hari pemungutan suara.

Jika dibandingkan, terdapat kesamaan dan perbedaan bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh masing-masing informan. Ketua RW dan Ketua RT lebih banyak berperan dalam penyampaian informasi dan mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Tokoh agama memberikan pemahaman melalui pendekatan moral dan tanggung jawab sebagai warga negara. Tokoh adat menekankan pentingnya menyaring informasi politik, sedangkan tokoh pemuda memberikan perhatian khusus kepada pemilih muda. Sementara itu, KPPS memberikan penguatan pada aspek teknis pelaksanaan pemungutan suara.

Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik di Pulau Bulang Lintang tidak dilakukan melalui satu bentuk komunikasi saja, tetapi melalui berbagai saluran yang menyesuaikan dengan kedudukan dan hubungan sosial masing-masing tokoh masyarakat.

Tabel 4.5 Ringkasan Temuan Peran Tokoh Masyarakat sebagai Pendidik Politik

No	Informan	Bentuk Pendidikan Politik	Temuan
1	Ketua RW	Penyampaian informasi dan pemahaman	Menyampaikan informasi Pilkada dan mengingatkan pentingnya menggunakan hak pilih
2	Ketua RT	Informasi Pilkada dan penyaringan informasi	Menyampaikan jadwal serta mendorong warga mencari informasi calon yang benar

3	Tokoh Agama	Pendidikan moral politik	Menanamkan pemahaman bahwa memilih merupakan tanggung jawab bersama
4	Tokoh Adat	Penyaringan informasi politik	Mengarahkan masyarakat agar tidak mudah percaya informasi yang belum jelas
5	Tokoh Pemuda	Pendidikan politik pemilih muda	Memberikan pengetahuan dan penjelasan politik kepada pemilih muda
6	KPPS	Pendidikan teknis	Memberikan informasi mengenai jadwal, tata cara pencoblosan, dan persyaratan pemilih
7	Masyarakat	Penerima pendidikan politik	Mendapat informasi dari RT/RW, tokoh masyarakat, penyelenggara, media sosial, dan sumber lainnya

Berdasarkan perbandingan hasil wawancara tersebut, peneliti menemukan bahwa peran tokoh masyarakat sebagai pendidik politik telah dilaksanakan melalui tiga bentuk utama, yaitu penyampaian informasi, pemberian pemahaman, dan pembentukan kesadaran politik.

Penyampaian informasi membantu masyarakat mengetahui tahapan dan waktu pelaksanaan Pilkada. Pemberian pemahaman membantu masyarakat mengetahui tata cara menggunakan hak pilih, sedangkan pembentukan kesadaran mendorong masyarakat memahami bahwa memilih merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara.

Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa pendidikan politik berlangsung melalui pertemuan warga, komunikasi langsung, kegiatan sosial dan keagamaan,

serta hubungan sehari-hari antara tokoh masyarakat dengan warga. Hal ini sesuai dengan karakteristik masyarakat Pulau Bulang Lintang yang memiliki hubungan sosial dan kepercayaan terhadap tokoh lokal yang kuat. Dalam penelitianmu, tokoh masyarakat memang ditempatkan sebagai figur yang dipercaya dan menjadi rujukan masyarakat.

Jika dikaitkan dengan teori peran Biddle, peran merupakan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan kedudukan atau status sosialnya. Dalam penelitian ini, tokoh masyarakat memiliki kedudukan sebagai figur yang dihormati dan dipercaya sehingga masyarakat memiliki harapan agar mereka memberikan arahan dan pemahaman dalam kehidupan sosial, termasuk dalam bidang politik.

Perilaku Ketua RW dan Ketua RT dalam menyampaikan informasi, perilaku tokoh agama dalam memberikan nasihat mengenai tanggung jawab memilih, perilaku tokoh adat dalam mengarahkan masyarakat menyaring informasi, serta perilaku tokoh pemuda dalam memberikan pemahaman kepada pemilih muda menunjukkan adanya pelaksanaan perilaku yang sesuai dengan harapan sosial terhadap kedudukan mereka.

Peran tokoh masyarakat sebagai pendidik politik memberikan kontribusi dalam membangun pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Kontribusi tersebut terlihat dari adanya informasi dan pemahaman yang diterima masyarakat mengenai Pilkada serta kesadaran sebagian warga untuk menggunakan hak pilih. Meskipun partisipasi politik dipengaruhi pula oleh faktor lain seperti kondisi geografis, jarak TPS, karakteristik calon, dan sosialisasi penyelenggara, pendidikan politik yang dilakukan tokoh masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung yang membantu masyarakat berpartisipasi secara lebih sadar dan bertanggung jawab.

2. Peran Tokoh Masyarakat sebagai Motivator Politik

Peran tokoh masyarakat sebagai motivator politik merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan dorongan, ajakan, dan semangat kepada masyarakat agar menggunakan hak pilih serta berpartisipasi aktif dalam Pilkada Tahun 2024. Dalam penelitian ini, peran tersebut terlihat melalui ajakan kepada masyarakat untuk datang ke TPS, pemberian motivasi mengenai pentingnya menggunakan hak pilih, serta keteladanan tokoh masyarakat dalam berpartisipasi pada Pilkada. Indikator ini juga sesuai dengan definisi operasional penelitian yang meliputi ajakan langsung kepada warga, pemberian dorongan moral, dan keteladanan dalam berpartisipasi.

Gambar 4.6 Ketua RW memberikan arahan dan motivasi kepada masyarakat dalam kegiatan pertemuan warga sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik pada Pilkada Tahun 2024 di Kelurahan Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam.



Gambar 4.6 menunjukkan Ketua RW sedang memberikan arahan kepada masyarakat dalam suatu pertemuan warga. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan peran tokoh masyarakat sebagai motivator politik. Melalui pertemuan tersebut, Ketua RW mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, tidak golput, serta berpartisipasi aktif dalam Pilkada Tahun 2024. Selain itu, Ketua RW juga memberikan dorongan kepada

masyarakat agar lebih peduli terhadap proses demokrasi karena partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada dan masa depan pembangunan daerah. Upaya yang dilakukan Ketua RW tersebut menunjukkan adanya peran aktif tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, setiap tokoh masyarakat memberikan motivasi kepada masyarakat sesuai dengan peran dan kedudukannya.

Ketua RW menyampaikan bahwa dirinya selalu mengingatkan warga agar menggunakan hak pilih dan tidak golput karena setiap suara menentukan arah pembangunan daerah.

Bapak Gani selaku Ketua RW menyatakan:

"Kami terus mengajak masyarakat untuk datang ke TPS pada hari pemungutan suara. Kami mengingatkan bahwa suara masyarakat sangat penting dalam menentukan pemimpin daerah yang akan memimpin selama lima tahun ke depan."⁴⁴

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa ketua RW tidak hanya sekedar mengajak warga untuk memilih, tetapi juga menekankan bahwa satu suara memiliki pengaruh besar terhadap arah kepemimpinan daerah selama lima tahun kedepan. Hal ini menunjukkan bahwa ketua RW menjalankan fungsinya sebagai motivator politik, yaitu mendorong warga untuk bertindak sesuai dengan tanggung jawab sosial yang melekat pada kedudukannya sebagai tokoh masyarakat.

Ketua RT menjelaskan bahwa dirinya terus mengajak warga datang ke TPS serta memberikan pemahaman agar masyarakat berpartisipasi tanpa mengarahkan pilihan politik tertentu. Ia tetap menjaga netralitas sesuai aturan yang berlaku.

Bapak Ahmad Sobur selaku Ketua RT menyatakan:

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Gani selaku Ketua RW Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 30 Mei 2026

"Kami selalu mengingatkan warga agar tidak golput dan ikut berpartisipasi dalam Pilkada. Kami berharap masyarakat menyadari bahwa setiap suara memiliki arti penting bagi masa depan daerah."⁴⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa ajakan Ketua RT tidak disampaikan sebagai imbauan administratif belaka, melainkan dibingkai dengan makna yang lebih dalam, yaitu bahwa setiap suara warga punya arti penting bagi masa depan daerah. Cara penyampaian seperti ini membangun rasa urgensi, bukan sekadar mengingatkan warga untuk datang ke TPS.

Bapak Syukur Andila selaku anggota KPPS menjelaskan:

"Sebelum hari pemungutan suara, kami melihat banyak tokoh masyarakat yang aktif mengingatkan warga untuk datang ke TPS. Hal tersebut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya."⁴⁶

Dari sudut pandang penyelenggara ini menjadi bukti tambahan bahwa dorongan tokoh masyarakat memang terlihat dan berdampak di lapangan. Pengamatan langsung dari pihak yang menyelenggarakan pemungutan suara ini memperkuat kebenaran peran motivator yang selama ini diklaim oleh tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Tokoh agama memotivasi masyarakat melalui pendekatan moral dengan mengingatkan bahwa memilih pemimpin merupakan tanggung jawab bersama sehingga masyarakat diharapkan menggunakan hak pilih secara bijaksana.

Bapak Abu Bakar selaku tokoh agama menyampaikan:

"Saya sering mengingatkan masyarakat bahwa memilih pemimpin merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, masyarakat harus menggunakan hak pilihnya dan jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan yang dimiliki."⁴⁷

Sama seperti perannya dalam mendidik politik warga, tokoh agama kembali memberi motivasi lewat pendekatan tanggung jawab moral, bukan ajakan yang

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahamad Sobur selaku Ketua RT Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 30 Mei 2026

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Syukur Andila selaku Anggota KPPS Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 30 Mei 2026

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Abu Bakar selaku Tokoh agama Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 30 Mei 2026

bersifat politis secara langsung. Ini menunjukkan bahwa jalur keagamaan cukup efektif untuk memotivasi warga karena bersumber dari otoritas yang sudah dipercaya masyarakat sejak lama.

Tokoh adat memberikan dorongan kepada masyarakat melalui pertemuan warga dengan menyampaikan pandangan mengenai pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada.

Bapak Rahim selaku tokoh adat mengatakan:

*"Kami selalu memberikan semangat kepada masyarakat agar ikut memilih karena hasil Pilkada akan berpengaruh terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang."*⁴⁸

Motivasi yang disampaikan tokoh adat mengaitkan partisipasi Pilkada dengan kesejahteraan bersama dalam jangka panjang. Ini memperlihatkan bagaimana kepercayaan dan hubungan sosial yang sudah terjalin lama di antara warga dimanfaatkan untuk menggerakkan mereka agar ikut berpartisipasi secara politik.

Tokoh pemuda lebih memfokuskan motivasinya kepada pemilih muda dengan memberikan pengetahuan dan dorongan agar mereka tidak apatis terhadap politik serta bersedia menggunakan hak pilihnya.

Bapak Idas Rizal selaku tokoh pemuda menjelaskan:

*"Kami mengajak generasi muda untuk tidak apatis terhadap politik. Kami memberikan pemahaman bahwa satu suara yang mereka berikan dapat menentukan arah pembangunan daerah ke depan."*⁴⁹

Fokus motivasi di sini bergeser ke persoalan kurangnya minat politik di kalangan anak muda. Ini menunjukkan bahwa peran motivator tokoh masyarakat di Bulang Lintang tidak dijalankan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kelompok usia yang memang dikenal rawan tidak memilih.

Dari sisi masyarakat, informan menyatakan bahwa ajakan dari tokoh masyarakat cukup berpengaruh karena mereka sering mengingatkan pentingnya

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Rahim selaku Tokoh adat Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 30 Mei 2026

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Idas Rizal selaku Tokoh pemuda Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 30 Mei 2026

menggunakan hak pilih sehingga masyarakat menjadi lebih termotivasi untuk datang ke TPS.

Ibu Ida Lela selaku masyarakat menyatakan:

"Saya merasa terdorong untuk datang ke TPS karena sering diingatkan oleh tokoh masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak pilih."⁵⁰

Pengakuan langsung dari warga pemilih ini menjadi bukti penting bahwa dorongan yang selama ini diklaim oleh tokoh masyarakat benar-benar sampai dan memengaruhi keputusan warga untuk datang ke TPS, bukan hanya klaim sepihak dari tokoh yang bersangkutan.

Ibu Zunaidah selaku Masyarakat yang tidak memilih saat Pilkada mengatakan:

"Ye, Ketua RT dan tokoh masyarakat mengajak warga agar tidak golput dan menjelaskan pentingnya memilih. Saye ingin datang ke TPS, tetapi saat itu kondisi saya sedang sakit."⁵¹

Pernyataan informan menunjukkan bahwa tokoh masyarakat telah memberikan motivasi kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam Pilkada. Namun, kondisi kesehatan menjadi kendala sehingga informan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Tabel 4.7 Ringkasan Temuan Peran Tokoh Masyarakat sebagai Motivator Politik

No	Informan	Bentuk Motivasi	Temuan
1	Ketua RW	Ajakan langsung	Mengajak warga menggunakan hak pilih dan tidak golput.
2	Ketua RT	Dorongan partisipasi	Mengajak warga datang ke TPS dengan tetap menjaga

⁵⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Ida Lela selaku Masyarakat pemilih Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 30 Mei 2026

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Zunaidah selaku Masyarakat yang tidak memilih saat Pilkada Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 30 Mei 2026

			netralitas.
3	Tokoh Agama	Motivasi moral	Mengingatkan bahwa memilih merupakan tanggung jawab bersama.
4	Tokoh Adat	Dorongan melalui pertemuan warga	Menyampaikan pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada.
5	Tokoh Pemuda	Motivasi kepada pemilih muda	Memberikan pengetahuan dan dorongan agar tidak apatis terhadap politik.
6	Masyarakat	Respons terhadap motivasi	Mengaku lebih terdorong menggunakan hak pilih karena ajakan tokoh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa tokoh masyarakat menjalankan peran sebagai motivator politik melalui ajakan langsung, pemberian dorongan moral, keteladanan, serta penguatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak pilih. Meskipun bentuk motivasi yang diberikan berbeda-beda, seluruh informan menunjukkan tujuan yang sama, yaitu mendorong masyarakat agar tidak golput dan berpartisipasi dalam Pilkada Tahun 2024.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa motivasi yang diberikan tokoh masyarakat lebih bersifat persuasif daripada memaksa. Tokoh masyarakat tidak mengarahkan warga untuk memilih calon tertentu, melainkan mendorong masyarakat agar menggunakan hak pilih secara sadar sesuai hati nurani. Dengan demikian, motivasi yang diberikan tetap menjaga prinsip netralitas sekaligus meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Jika dikaitkan dengan Teori Peran Biddle (1986), tokoh masyarakat memiliki kedudukan sosial yang menimbulkan harapan agar mampu memengaruhi perilaku masyarakat ke arah yang positif. Dalam konteks Pilkada, harapan tersebut diwujudkan melalui perilaku tokoh masyarakat yang memberikan dorongan, semangat, dan ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

Perilaku Ketua RW, Ketua RT, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda dalam memotivasi masyarakat menunjukkan adanya kesesuaian antara status sosial yang dimiliki dengan perilaku yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan teori Biddle, peran sebagai motivator politik merupakan bentuk pelaksanaan peran sosial yang sesuai dengan harapan masyarakat terhadap tokoh masyarakat.

Peran tokoh masyarakat sebagai motivator politik memberikan kontribusi terhadap peningkatan partisipasi politik karena dorongan dan ajakan yang diberikan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasa lebih termotivasi datang ke TPS setelah memperoleh ajakan dan pengingat dari tokoh masyarakat.

Meskipun demikian, partisipasi politik tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi tokoh masyarakat, tetapi juga oleh faktor lain seperti kondisi geografis, kualitas sosialisasi, karakteristik calon, dan faktor sosial ekonomi. Dengan demikian, peran tokoh masyarakat sebagai motivator politik merupakan salah satu faktor yang mendukung meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Tahun 2024 di Pulau Bulang Lintang, tanpa menjadi satu-satunya faktor penentu.

3. Peran Tokoh Masyarakat sebagai Mediator Politik

Peran tokoh masyarakat sebagai mediator politik merupakan peran yang dijalankan untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan penyelenggara Pilkada maupun pemerintah, sehingga berbagai informasi, aspirasi, dan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada dapat disampaikan dan diselesaikan dengan baik. Dalam penelitian ini, peran mediator

politik meliputi penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat, penyampaian aspirasi masyarakat kepada pihak terkait, membantu penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan Pilkada, serta menjaga hubungan yang harmonis selama proses demokrasi berlangsung. Hal ini sesuai dengan indikator operasional penelitian mengenai fungsi penghubung antara masyarakat dan penyelenggara Pilkada.

Gambar 4.8 Apel kesiapan dan bimbingan teknis Pantarlih dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang didukung oleh tokoh masyarakat sebagai penghubung antara masyarakat dan penyelenggara pemilu.



Gambar 4.8 menunjukkan kegiatan Apel Kesiapan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pantarlih dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada petugas Pantarlih agar mampu melaksanakan tugas pencocokan dan penelitian data pemilih secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan tersebut, tokoh masyarakat turut berperan sebagai mediator politik dengan membantu menjembatani hubungan antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. Tokoh masyarakat memberikan dukungan kepada petugas Pantarlih dalam proses pendataan pemilih, membantu menyampaikan informasi kepada warga, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pemilu. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan ini menunjukkan adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dan penyelenggara pemilu guna menciptakan pelaksanaan pemilu yang tertib, lancar, dan demokratis. Peran tersebut sejalan dengan fungsi mediator politik, yaitu sebagai penghubung yang memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan lembaga penyelenggara pemilu sehingga informasi terkait pemilu dapat tersampaikan dengan baik.

kepada seluruh warga Berdasarkan hasil wawancara, setiap tokoh masyarakat menjalankan fungsi mediasi sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil wawancara, setiap tokoh masyarakat menjalankan fungsi mediasi sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya. Ketua RW menjelaskan bahwa dirinya membantu menyampaikan informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya menyampaikan keluhan maupun masukan masyarakat kepada pihak terkait.

Bapak Gani selaku Ketua RW menyatakan:

*"Jika ada informasi dari pemerintah atau penyelenggara pemilu, kami menyampaikan kembali kepada masyarakat agar mereka mengetahui setiap tahapan Pilkada. Sebaliknya, jika ada keluhan atau masukan dari warga, kami juga membantu menyampaikannya kepada pihak terkait."*⁵²

Berdasarkan hasil wawancara, Ketua RW tidak hanya menyampaikan informasi mengenai Pilkada kepada masyarakat, tetapi juga menerima dan meneruskan berbagai keluhan atau masukan warga kepada penyelenggara pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa Ketua RW berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan penyelenggara sehingga komunikasi dapat berjalan dua arah.

Ketua RT juga berperan sebagai penghubung ketika terdapat warga yang mengalami kendala, seperti permasalahan data pemilih atau belum menerima undangan memilih. Permasalahan tersebut kemudian diteruskan kepada pihak yang berwenang agar segera ditindaklanjuti.

Bapak Ahmad Sobur selaku Ketua RT menyatakan:

*"Ketika ada warga yang mengalami kendala terkait data pemilih atau belum menerima undangan memilih, kami membantu menyampaikan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti."*⁵³

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Ketua RT membantu masyarakat mengatasi kendala yang berkaitan dengan data pemilih. Peran tersebut membuktikan bahwa Ketua RT tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi warga selama tahapan Pilkada.

⁵² Hasil Wawancara dengan Gani selaku Ketua RW Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 31 Mei 2026

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Sobur selaku Ketua RT Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 31 Mei 2026

Anggota KPPS menyampaikan bahwa koordinasi dengan Ketua RT, Ketua RW, dan tokoh masyarakat sangat membantu penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga informasi mengenai Pilkada dapat diterima lebih cepat dan lebih luas.

Bapak Syukur Andila selaku anggota KPPS menjelaskan:

*"Kami berkoordinasi dengan Ketua RT, Ketua RW, dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. Dengan adanya kerja sama tersebut, informasi mengenai Pilkada dapat diterima masyarakat dengan lebih cepat."*⁵⁴

Berdasarkan keterangan anggota KPPS, koordinasi dengan tokoh masyarakat, khususnya RT dan RW, dilakukan untuk mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada.

Tokoh agama juga menjalankan fungsi mediasi dengan membantu menjelaskan informasi yang belum dipahami masyarakat atau mengarahkan masyarakat kepada pihak yang berwenang apabila diperlukan.

Bapak Abu Bakar selaku tokoh agama menyampaikan:

*"Masyarakat sering bertanya kepada kami mengenai pelaksanaan Pilkada. Jika ada informasi yang belum dipahami, kami membantu menjelaskan atau mengarahkan masyarakat kepada pihak yang lebih berwenang."*⁵⁵

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tokoh agama menjadi tempat masyarakat memperoleh penjelasan dan menyampaikan pertanyaan terkait Pilkada. Kepercayaan masyarakat kepada tokoh agama membuat penyampaian informasi menjadi lebih mudah diterima.

Sementara itu, tokoh adat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dengan membantu menyampaikan aspirasi serta masukan masyarakat mengenai pelaksanaan Pilkada kepada pihak terkait.

Bapak Rahim selaku tokoh adat mengatakan:

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Syukur Andila selaku Anggota KPPS Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 31 Mei 2026

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Abu Bakar selaku Tokoh agama Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 31 Mei 2026

"Kami berusaha menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Jika ada aspirasi atau masukan dari masyarakat terkait Pilkada, kami membantu menyampaikannya kepada pihak terkait."⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara, tokoh adat turut menyampaikan aspirasi dan permasalahan masyarakat kepada pihak pemerintah atau penyelenggara pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh adat berperan sebagai penghubung yang mewakili kepentingan masyarakat.

Selain itu, tokoh pemuda membantu menyampaikan informasi mengenai jadwal pemungutan suara, lokasi TPS, dan berbagai informasi penting lainnya kepada pemilih muda sehingga mereka tidak tertinggal informasi mengenai Pilkada.

Bapak Idas Rizal selaku tokoh pemuda menjelaskan:

"Kami membantu menyampaikan informasi kepada pemilih muda mengenai jadwal pemungutan suara, lokasi TPS, dan berbagai informasi penting lainnya agar mereka tidak ketinggalan informasi."⁵⁷

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tokoh pemuda berperan aktif menyampaikan informasi Pilkada kepada kalangan pemilih muda serta menjadi perantara apabila terdapat pertanyaan atau kendala dari kelompok tersebut.

Ibu Rukiah selaku masyarakat menyatakan:

"Kalau ada informasi yang belum saya pahami mengenai Pilkada, biasanya saya bertanya kepada Ketua RT atau tokoh masyarakat karena mereka lebih mengetahui informasi yang diberikan oleh pemerintah."⁵⁸

Berdasarkan pengakuan informan, masyarakat memperoleh informasi mengenai Pilkada melalui Ketua RT dan tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh masyarakat menjadi sumber informasi yang dipercaya oleh warga.

Ibu Ida Lela selaku masyarakat mengatakan:

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahim selaku Tokoh adat Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 31 Mei 2026

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Idas Rijal selaku Tokoh pemuda Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 31 Mei 2026

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Rukiah selaku Masyarakat pemilih Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 31 Mei 2026

"Tokoh masyarakat sering membantu masyarakat mendapatkan informasi mengenai Pilkada. Selain itu, mereka juga membantu menyampaikan keluhan masyarakat kepada pihak terkait."⁵⁹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menerima informasi dari tokoh masyarakat, tetapi juga dapat menyampaikan keluhan atau permasalahan untuk diteruskan kepada pihak terkait. Kondisi ini memperlihatkan bahwa peran tokoh masyarakat sebagai mediator telah berjalan dengan baik dalam mendukung pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 di Pulau Bulang Lintang.

Bapak Awie selaku Masyarakat yang tidak ikut memilih saat Pilkada mengatakan:

"Ya, Ketua RT menyampaikan informasi dari penyelenggara pemilu, seperti jadwal pemungutan suara, lokasi TPS, dan tata cara memilih. Jika ada pertanyaan, kami juga bisa menyampaikannya melalui Ketua RT."⁶⁰

Berdasarkan pernyataan informan, tokoh masyarakat telah berperan sebagai mediator politik dengan menjadi penghubung antara masyarakat dan penyelenggara Pilkada melalui penyampaian informasi serta membantu komunikasi apabila terdapat pertanyaan dari masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan adanya pola yang relatif sama, yaitu seluruh tokoh masyarakat menjalankan fungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pihak penyelenggara Pilkada. Perbedaannya terletak pada bentuk mediasi yang dilakukan. Ketua RW dan Ketua RT lebih banyak menangani penyampaian informasi serta penyelesaian permasalahan administratif. Tokoh agama membantu menjelaskan informasi yang belum dipahami masyarakat. Tokoh adat lebih berperan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, sedangkan tokoh pemuda memfokuskan penyampaian informasi kepada kelompok pemilih muda. Dengan demikian, seluruh bentuk mediasi tersebut saling melengkapi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Ida Lela selaku Masyarakat pemilih Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 31 Mei 2026

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak awie selaku Masyarakat yang tidak ikut Pilkada Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 31 Mei 2026

Tabel 4.9 Ringkasan Temuan Peran Tokoh Masyarakat sebagai Mediator Politik

No	Informan	Bentuk Mediasi	Temuan
1	Ketua RW	Penghubung masyarakat dan penyelenggara	Menyampaikan informasi kepada masyarakat serta meneruskan keluhan warga kepada pihak terkait.
2	Ketua RT	Penyelesaian permasalahan warga	Membantu menyampaikan persoalan data pemilih dan undangan memilih kepada penyelenggara.
3	KPPS	Koordinasi informasi	Bekerja sama dengan tokoh masyarakat agar informasi Pilkada cepat diterima masyarakat.
4	Tokoh Agama	Pemberian penjelasan	Membantu menjelaskan informasi Pilkada dan mengarahkan masyarakat kepada pihak yang berwenang.
5	Tokoh Adat	Penyaluran aspirasi	Menyampaikan aspirasi dan masukan masyarakat kepada pemerintah atau penyelenggara.
6	Tokoh Pemuda	Penyebaran informasi	Menyampaikan informasi mengenai jadwal pemungutan suara, lokasi TPS, dan informasi penting lainnya kepada pemilih muda.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa tokoh masyarakat telah menjalankan peran sebagai mediator politik dengan membangun komunikasi dua arah antara masyarakat dan penyelenggara Pilkada. Peran tersebut tidak hanya berupa penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat, tetapi juga penyampaian aspirasi, keluhan, dan berbagai permasalahan masyarakat kepada pihak yang berwenang.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan tokoh masyarakat mempermudah masyarakat memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan menyelesaikan berbagai kendala yang muncul selama tahapan Pilkada. Dengan

adanya komunikasi yang baik, pelaksanaan Pilkada dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan kondusif.

Jika dikaitkan dengan Teori Peran Biddle (1986), tokoh masyarakat memiliki kedudukan sosial yang menimbulkan harapan agar mampu menjadi penghubung antara masyarakat dengan lembaga atau pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Dalam konteks Pilkada, harapan tersebut diwujudkan melalui perilaku tokoh masyarakat yang menyampaikan informasi, menjelaskan berbagai ketentuan Pilkada, membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat, serta menyalurkan aspirasi kepada penyelenggara pemilu.

Peran tokoh masyarakat sebagai mediator politik memberikan kontribusi terhadap partisipasi politik masyarakat karena komunikasi yang terjalin antara masyarakat dan penyelenggara Pilkada menjadi lebih efektif. Informasi mengenai tahapan Pilkada dapat diterima masyarakat dengan lebih cepat, sementara berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dapat segera disampaikan dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Kondisi tersebut membantu menciptakan pelaksanaan Pilkada yang lebih tertib, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya kerja sama antara tokoh masyarakat dan penyelenggara pemilu dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

D. Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik masyarakat merupakan keterlibatan warga negara dalam berbagai kegiatan politik yang bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan, khususnya pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Partisipasi politik tidak hanya diukur dari kehadiran masyarakat pada hari pemungutan suara, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat selama seluruh tahapan Pilkada berlangsung.

Dalam penelitian ini, partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam dianalisis berdasarkan tiga indikator, yaitu:

1. Menggunakan hak pilih
2. Mengikuti kampanye
3. Terlibat dalam diskusi politik

Ketiga indikator tersebut dipilih karena menggambarkan bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi, mulai dari memperoleh

informasi politik, berinteraksi dan berdiskusi mengenai Pilkada, hingga menggunakan hak pilih sebagai wujud partisipasi politik secara langsung.

Berdasarkan ketiga indikator tersebut, peneliti menganalisis tingkat partisipasi politik masyarakat melalui data hasil wawancara dengan informan, dokumentasi penelitian, serta data pendukung dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam. Dengan demikian, pembahasan pada subbab ini memberikan gambaran mengenai bagaimana masyarakat Kelurahan Bulang Lintang berpartisipasi dalam setiap tahapan Pilkada Tahun 2024 serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi tersebut.

**Tabel 4.10 Data Partisipasi Pemilih Kelurahan Bulang Lintang
Tahun 2024**

Keterangan	Jumlah
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	1.274
Pengguna Hak Pilih	926
Tidak Menggunakan Hak Pilih	348
Tingkat Partisipasi Pemilih	72,68%

Sumber: KPU Kota Batam Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 4.10 data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kelurahan Bulang Lintang pada Pilkada Tahun 2024 sebanyak 1.274 pemilih. Dari jumlah tersebut, sebanyak 926 pemilih menggunakan hak pilih, sedangkan 348 pemilih tidak menggunakan hak pilih, sehingga tingkat partisipasi pemilih mencapai 72,68%. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Bulang Lintang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2024. Persentase tersebut juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih tergolong cukup baik meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang belum berpartisipasi.

Gambar 4.11 Masyarakat Kelurahan Bulang Lintang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS).



Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Sobur selaku Ketua RT Kelurahan Bulang Lintang yang menyatakan:

*"Menurut saya, partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi Pilkada 2024 cukup baik. Masyarakat terlihat antusias menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak kelurahan maupun penyelenggara pemilu. Melalui kegiatan tersebut, warga mendapatkan informasi mengenai tahapan Pilkada, tata cara pemungutan suara, serta pentingnya menggunakan hak pilih. Sebagai Ketua RT, saya juga mengimbau masyarakat untuk hadir dan mengikuti sosialisasi agar tidak kehilangan informasi terkait pelaksanaan Pilkada."*⁶¹

Berdasarkan pernyataan informan, dapat dipahami bahwa masyarakat menunjukkan keterlibatan yang cukup baik dalam mengikuti kegiatan sosialisasi Pilkada 2024. Kehadiran warga pada kegiatan tersebut menunjukkan adanya keinginan untuk memahami informasi mengenai proses dan pelaksanaan Pilkada. Selain itu, ajakan yang disampaikan oleh Ketua RT kepada masyarakat mencerminkan peran tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi politik, yaitu mengarahkan dan mengingatkan warga agar memahami pentingnya menggunakan hak pilih serta berpartisipasi dalam Pilkada.

Selain itu, Ibu Ida Lela salah seorang masyarakat pemilih juga menyampaikan:

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Sobur selaku Ketua RT Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 01 Juni 2026

*"Saya mengikuti kegiatan sosialisasi karena ingin mengetahui informasi mengenai Pilkada, terutama jadwal pemilihan dan tata cara pencoblosan. Setelah mengikuti sosialisasi, saya menjadi lebih memahami pentingnya menggunakan hak pilih dan ikut menentukan pemimpin daerah."*⁶²

Berdasarkan pernyataan informan, keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan Pilkada. Informasi yang diperoleh membuat masyarakat lebih mengetahui jadwal pemilihan, tata cara pencoblosan, serta menyadari pentingnya menggunakan hak pilih. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berperan dalam meningkatkan pengetahuan politik dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Pulau Bulang Lintang menunjukkan partisipasi politik yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi tingkat keikutsertaan masyarakat dalam Pilkada.

Masyarakat menyatakan bahwa mereka mengetahui pelaksanaan Pilkada melalui informasi yang disampaikan oleh Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, penyelenggara pemilu, serta media sosial. Informasi tersebut membantu masyarakat memahami waktu pelaksanaan pemungutan suara dan pentingnya menggunakan hak pilih.

Selain memperoleh informasi, sebagian besar masyarakat menggunakan hak pilih karena menyadari bahwa memilih merupakan hak sekaligus tanggung jawab sebagai warga negara. Mereka berharap pemimpin yang terpilih mampu membawa kemajuan bagi daerah.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan Ketua RT, Ketua RW, tokoh adat, dan tokoh pemuda menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak menggunakan hak pilih, seperti jarak menuju TPS, kondisi cuaca, kurangnya sosialisasi, rendahnya minat sebagian

⁶² Hasil Wawancara dengan Ibu Ida Lela selaku Masyarakat pemilih Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 01 Juni 2026

pemilih muda, serta kekecewaan terhadap calon atau janji politik yang tidak terpenuhi.

Hasil wawancara menunjukkan adanya persamaan bahwa sebagian besar masyarakat menggunakan hak pilih karena memiliki kesadaran sebagai warga negara serta memperoleh dorongan dari tokoh masyarakat. Namun demikian, seluruh informan juga mengakui adanya hambatan yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak berpartisipasi secara optimal, terutama faktor geografis, keterbatasan informasi, karakteristik calon, dan rendahnya minat sebagian pemilih.

Tabel 4 . 12 Ringkasan Temuan Partisipasi Politik Masyarakat

No	Aspek Partisipasi	Temuan Penelitian
1	Penggunaan hak pilih	Sebagian besar masyarakat menggunakan hak pilih pada Pilkada 2024.
2	Sumber informasi	Informasi diperoleh dari RT/RW, tokoh masyarakat, penyelenggara pemilu, dan media sosial.
3	Motivasi memilih	Kesadaran sebagai warga negara, keinginan menentukan pemimpin daerah, dan dorongan tokoh masyarakat.
4	Hambatan partisipasi	Jarak TPS, cuaca, kurangnya sosialisasi, rendahnya minat sebagian pemilih muda, dan kekecewaan terhadap calon.
5	Pengalaman memilih	Masyarakat memahami proses Pilkada dan merasa ikut menentukan masa depan daerah melalui penggunaan hak pilih.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa partisipasi politik masyarakat di Pulau Bulang Lintang tergolong cukup baik, yang ditunjukkan

oleh kesediaan masyarakat menggunakan hak pilih serta adanya kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam Pilkada. Partisipasi tersebut didukung oleh informasi dan dorongan yang diberikan oleh tokoh masyarakat maupun penyelenggara pemilu.

Namun demikian, partisipasi politik masyarakat belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh beberapa hambatan, seperti kondisi geografis wilayah kepulauan, akses menuju TPS, keterbatasan sosialisasi, serta faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk memilih.

Apabila dikaitkan dengan teori partisipasi politik Huntington dan Nelson, partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang bertujuan memengaruhi proses pengambilan keputusan politik, salah satunya melalui penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Pulau Bulang Lintang telah melaksanakan salah satu bentuk partisipasi politik, yaitu menggunakan hak pilih dalam Pilkada Tahun 2024. Selain itu, masyarakat juga berpartisipasi dengan mengikuti informasi mengenai Pilkada serta menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat terkait pelaksanaan pemilihan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek politik, tetapi juga berperan sebagai subjek yang ikut menentukan arah pemerintahan daerah melalui proses demokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi politik masyarakat di Pulau Bulang Lintang pada Pilkada Tahun 2024 berada pada kategori cukup baik. Partisipasi tersebut tercermin dari penggunaan hak pilih, keterlibatan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai Pilkada, serta kesadaran untuk menentukan pemimpin daerah melalui mekanisme demokrasi. Keberhasilan tersebut didukung oleh peran tokoh masyarakat sebagai pendidik politik, motivator politik, dan mediator politik, meskipun masih terdapat hambatan berupa kondisi geografis, keterbatasan sosialisasi, dan faktor sosial yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Data penelitian juga menunjukkan tingkat partisipasi pemilih sekitar 72,68% di Kelurahan Bulang Lintang.

1. Menggunakan Hak Pilih

Menggunakan hak pilih merupakan bentuk partisipasi politik yang paling nyata dalam pelaksanaan Pilkada. Melalui penggunaan hak pilih, masyarakat ikut menentukan pemimpin daerah secara demokratis. Dalam penelitian ini, sebagian besar informan menyatakan telah menggunakan hak pilih pada Pilkada Tahun 2024 karena menyadari bahwa memilih merupakan hak sekaligus tanggung jawab sebagai warga negara.

Berdasarkan data KPU Kota Batam Tahun 2024, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kelurahan Bulang Lintang sebanyak 1.274 pemilih, yang terdiri dari 654 pemilih laki-laki dan 620 pemilih perempuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 926 pemilih menggunakan hak pilihnya, yang terdiri dari 451 pemilih laki-laki dan 475 pemilih perempuan. Tingkat partisipasi pemilih mencapai 72,68%, sedangkan jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 348 pemilih.

Tabel 4. 13 Penggunaan Hak pilih masyarakat Kelurahan Bulang Lintang pada Pilkada Tahun 2024

Keterangan	Laki-laki	Permpuan	Jumlah
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	654	620	1.274
Pengguna Hak Pilih	451	475	926
Tidak Menggunakan Hak Pilih	203	145	384
Persentase Partisipasi	68,96%	76,61%	72,68%

Sumber: KPU Kota Batam Tahun 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Bulang Lintang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Tahun 2024. Tingkat partisipasi sebesar 72,68% menunjukkan adanya kesadaran politik masyarakat yang cukup baik terhadap pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi.

Gambar 4.14 Masyarakat Kelurahan Bulang Lintang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS).



Gambar 4.14 menunjukkan masyarakat Kelurahan Bulang Lintang sedang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Tahun 2024. Kegiatan pencoblosan merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat dalam proses demokrasi. Kehadiran masyarakat di TPS dan penggunaan hak pilih menunjukkan adanya kesadaran politik yang cukup baik untuk ikut menentukan pemimpin daerah. Tingginya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Tahun 2024 tidak terlepas dari peran tokoh masyarakat yang telah memberikan pendidikan politik, motivasi, dan menjadi mediator antara masyarakat dengan penyelenggara pemilu. Dengan demikian, penggunaan hak pilih oleh masyarakat merupakan indikator keberhasilan upaya tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik warga.

Bapak Ahmad Sobur selaku Ketua RT menyatakan:

"Menjelang hari pemilihan, kami terus mengingatkan masyarakat agar datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Kami menyampaikan bahwa suara masyarakat sangat penting dalam menentukan pemimpin daerah untuk lima tahun ke depan." ⁶³

Berdasarkan pernyataan informan, tokoh masyarakat berupaya mendorong warga untuk menggunakan hak pilih dengan terus mengingatkan pentingnya hadir di TPS pada hari pemungutan suara. Upaya tersebut menunjukkan peran

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Sobur selaku Ketua RT Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 01 Juni 2026

tokoh masyarakat sebagai motivator politik, yaitu memberikan dorongan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa setiap suara memiliki arti penting dalam menentukan pemimpin daerah. Peran ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024.

Bapak Gani selaku Ketua RW menyatakan:

*"Kami bersama Ketua RT terus mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Masyarakat diberikan pemahaman bahwa partisipasi mereka sangat menentukan keberhasilan demokrasi dan pembangunan daerah."*⁶⁴

Berdasarkan pernyataan informan, tokoh masyarakat bersama Ketua RT aktif memberikan imbauan kepada warga agar menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara. Upaya tersebut menunjukkan adanya peran tokoh masyarakat sebagai motivator politik yang berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada. Melalui motivasi yang diberikan, masyarakat diharapkan memahami bahwa keikutsertaan mereka dalam memilih merupakan bagian penting dalam mewujudkan proses demokrasi dan menentukan arah pembangunan daerah.

Bapak Abu Bakar selaku tokoh agama menjelaskan:

*"Saya mengajak masyarakat untuk tidak golput karena memilih merupakan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan menggunakan hak pilih, masyarakat ikut menentukan masa depan daerah."*⁶⁵

Berdasarkan pernyataan informan, tokoh masyarakat berupaya memberikan motivasi kepada warga agar tidak golput dan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024. Informan menekankan bahwa memilih merupakan hak sekaligus tanggung jawab sebagai warga negara. Hal ini menunjukkan peran tokoh masyarakat sebagai motivator politik, yaitu mendorong masyarakat agar

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Gani selaku Ketua RW Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 01 Juni 2026

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Abu Bakar selaku Tokoh agama Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 01 Juni 2026

menyadari pentingnya partisipasi dalam menentukan pemimpin daerah serta ikut berkontribusi terhadap masa depan daerah melalui proses demokrasi.

Bapak Rahim selaku tokoh adat menyampaikan:

*"Kami selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memilih pemimpin adalah bagian dari tanggung jawab bersama. Oleh karena itu masyarakat harus menggunakan hak pilihnya dengan baik."*⁶⁶

Berdasarkan pernyataan informan, tokoh masyarakat berperan dalam memberikan pemahaman politik kepada warga mengenai pentingnya menggunakan hak pilih dalam Pilkada. Penyampaian mengenai tanggung jawab masyarakat dalam memilih pemimpin menunjukkan adanya upaya edukasi politik agar warga memahami bahwa partisipasi dalam pemilihan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Dengan adanya peran tersebut, tokoh masyarakat membantu meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk menggunakan hak pilih secara bijak dan bertanggung jawab.

Bapak Idas Rizal selaku tokoh pemuda mengatakan:

*"Kami mengajak pemilih muda agar tidak apatis terhadap politik. Kami memberikan motivasi bahwa setiap suara memiliki arti penting dalam menentukan arah pembangunan daerah."*⁶⁷

Berdasarkan pernyataan informan, tokoh masyarakat berperan sebagai motivator politik dengan memberikan dorongan kepada pemilih muda agar memiliki kepedulian dan tidak bersikap apatis terhadap proses politik. Ajakan tersebut menunjukkan upaya untuk menumbuhkan kesadaran bahwa partisipasi setiap individu, termasuk pemilih muda, memiliki pengaruh dalam menentukan pemimpin dan arah pembangunan daerah. Dengan adanya motivasi dari tokoh masyarakat, diharapkan masyarakat lebih aktif menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024.

Bapak Syukur Andila selaku anggota KPPS menyatakan:

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahim selaku Tokoh adat Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 01 Juni 2026

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Idas Rizal selaku Tokoh pemuda Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 01 Juni 2026

*"Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, kami melihat antusiasme masyarakat cukup tinggi untuk datang ke TPS. Sebagian besar pemilih yang terdaftar hadir dan menggunakan hak pilihnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada sudah cukup baik."*⁶⁸

Beliau juga menambahkan:

"Sebelum hari pemungutan suara, kami bersama penyelenggara lainnya berupaya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jadwal pemungutan suara, tata cara pencoblosan, dan pentingnya menggunakan hak pilih agar tidak ada warga yang kehilangan kesempatan untuk memilih."

Berdasarkan pernyataan informan, dapat dilihat bahwa tokoh masyarakat bersama penyelenggara pemilu turut berperan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui penyampaian informasi terkait pelaksanaan Pilkada. Pemberian pemahaman mengenai jadwal pemungutan suara, tata cara pencoblosan, dan pentingnya menggunakan hak pilih menjadi bentuk upaya untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran politik masyarakat. Tingginya antusiasme warga yang hadir di TPS menunjukkan bahwa edukasi politik yang diberikan mampu mendorong masyarakat untuk lebih memahami dan menjalankan hak pilihnya dalam Pilkada 2024.

Ibu Zaleha selaku masyarakat menyatakan:

*"Saya datang ke TPS karena merasa memiliki tanggung jawab sebagai warga negara. Selain itu, saya ingin ikut menentukan pemimpin yang dapat membawa kemajuan bagi daerah."*⁶⁹

Berdasarkan pernyataan informan, keikutsertaan masyarakat dalam pemungutan suara didorong oleh adanya kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara. Masyarakat memahami bahwa menggunakan hak pilih merupakan bentuk partisipasi dalam proses demokrasi serta kesempatan untuk menentukan pemimpin yang dianggap mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Syukur Andila selaku Anggota KPPS Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 01 Juni 2026

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Zaleha selaku Masyarakat pemilih Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 01 Juni 2026

daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi dalam Pilkada 2024.

Hasil wawancara dengan Ketua RW dan anggota KPPS memperkuat temuan penelitian bahwa penggunaan hak pilih masyarakat di Kelurahan Bulang Lintang tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak, mulai dari tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, hingga penyelenggara pemilu. Peran tersebut terlihat melalui pemberian informasi, sosialisasi, dan ajakan kepada masyarakat untuk hadir di TPS pada hari pemungutan suara.

Dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 926 orang dari total 1.274 DPT (72,68%), partisipasi masyarakat Kelurahan Bulang Lintang dapat dikategorikan baik. Tingginya partisipasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Tahun 2024.

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa mereka menggunakan hak pilih karena ingin berpartisipasi dalam menentukan pemimpin yang mampu membawa kemajuan bagi daerah. Salah satu informan menyatakan bahwa ia datang ke TPS karena merasa memiliki tanggung jawab sebagai warga negara dan ingin ikut menentukan masa depan daerah. Selain itu, informan lain juga menyampaikan bahwa penggunaan hak pilih merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah melalui pemilihan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Tabel 4.15 Ringkasan Temuan

No	Aspek	Temuan
1	Kesadaran menggunakan hak pilih	Masyarakat menggunakan hak pilih karena menyadari hak dan tanggung

		jawab sebagai warga negara.
2	Tujuan menggunakan hak pilih	Ikut menentukan pemimpin yang diharapkan mampu membawa kemajuan daerah.
3	Dukungan tokoh masyarakat	Tokoh masyarakat mengingatkan warga untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilih.
4	Dukungan penyelenggara	KPPS memberikan informasi mengenai jadwal dan tata cara pemungutan suara.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa penggunaan hak pilih masyarakat di Pulau Bulang Lintang tidak hanya didorong oleh kesadaran pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh informasi, ajakan, dan pendampingan yang diberikan oleh tokoh masyarakat serta penyelenggara pemilu. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memahami penggunaan hak pilih sebagai bentuk tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

Menurut teori partisipasi politik Huntington dan Nelson, penggunaan hak pilih merupakan salah satu bentuk partisipasi politik konvensional yang dilakukan warga negara untuk memengaruhi proses penentuan pemimpin melalui mekanisme demokrasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Pulau Bulang Lintang telah melaksanakan bentuk partisipasi tersebut dengan hadir di TPS dan menggunakan hak pilihnya. Perilaku ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki hak politik, tetapi juga berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi di tingkat daerah.

Penggunaan hak pilih oleh masyarakat menunjukkan adanya keterlibatan warga dalam menentukan arah kepemimpinan daerah. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa informasi dan dorongan yang diberikan oleh tokoh masyarakat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya, meskipun tingkat partisipasi

masih dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi geografis, cuaca, dan karakteristik calon yang dipilih. Data penelitian menunjukkan tingkat partisipasi pemilih di Kelurahan Bulang Lintang mencapai 72,68%.

2. Mengikuti Kampanye

Mengikuti kampanye merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang termasuk dalam kegiatan pemilihan (electoral activity) menurut teori Huntington dan Nelson. Kampanye merupakan sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai visi, misi, program kerja, serta kemampuan pasangan calon yang akan dipilih dalam Pilkada. Melalui kegiatan kampanye, masyarakat dapat mengenal calon pemimpin daerah sehingga dapat menentukan pilihan secara lebih rasional dan bertanggung jawab.

Gambar 4.16 Masyarakat Kelurahan Bulang Lintang mengikuti kegiatan kampanye/sosialisasi pasangan calon dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.





Gambar 4.16 menunjukkan masyarakat Kelurahan Bulang Lintang mengikuti kegiatan kampanye atau sosialisasi politik menjelang Pilkada Tahun 2024. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kampanye merupakan salah satu bentuk partisipasi politik karena masyarakat memperoleh informasi mengenai visi, misi, serta program yang ditawarkan oleh pasangan calon. Melalui kegiatan kampanye, masyarakat dapat menambah pengetahuan politik dan memahami berbagai isu yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampanye menunjukkan adanya kepedulian terhadap proses demokrasi serta keinginan untuk menentukan pilihan politik secara lebih rasional dan berdasarkan informasi yang diperoleh.

Tingginya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan kampanye tidak terlepas dari peran tokoh masyarakat yang telah memberikan pendidikan politik, motivasi, dan dorongan kepada warga untuk aktif mengikuti berbagai tahapan Pilkada. Dengan demikian, keikutsertaan masyarakat dalam kampanye merupakan salah satu indikator keberhasilan tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Bulang Lintang.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Kelurahan Bulang Lintang menunjukkan keterlibatan yang cukup baik dalam mengikuti kampanye Pilkada Tahun 2024. Meskipun tidak seluruh masyarakat mengikuti kampanye secara langsung, sebagian besar masyarakat tetap memperoleh informasi mengenai

pasangan calon melalui kegiatan sosialisasi, media sosial, pertemuan warga, dan informasi yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Hasil Wawancara Bapak Gani selaku Ketua RW menyatakan:

*" Warga disini cukup tertarik mengikuti perkembangan Pilkada. Walaupun tidak semuanya datang langsung ke lokasi kampanye, mereka tetap dikasih tahu tentang visi misi, calon yang akan dipilih ."*⁷⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa masyarakat masih mengikuti perkembangan Pilkada walaupun tidak semuanya hadir secara langsung dalam kegiatan kampanye. Informasi mengenai calon, visi, dan misi tetap diterima oleh masyarakat melalui penyampaian dari lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi politik tetap berjalan dan membantu masyarakat memahami pilihan yang akan mereka tentukan dalam Pilkada.

Bapak Ahmad Sobur selaku Ketua RT menyatakan:

*" Warga di sini cukup peduli dengan Pilkada. Walaupun tidak semuanya datang langsung ke kegiatan kampanye, mereka tetap mencari tahu tentang calon kepala daerah beserta program-program yang ditawarkan sebelum menentukan pilihan."*⁷¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian terhadap pelaksanaan Pilkada meskipun tidak semua ikut hadir dalam kegiatan kampanye secara langsung. Masyarakat tetap berusaha memperoleh informasi mengenai calon kepala daerah dan program yang ditawarkan sebagai bahan pertimbangan sebelum memberikan suara. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran politik masyarakat dalam menentukan pilihan berdasarkan informasi yang mereka peroleh.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Gani selaku Ketua RW Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 01 Juni 2026

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Sobur selaku Ketua RT Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 01 Juni 2026

Bapak Syukur Andila selaku anggota KPPS menjelaskan:

*"Sebelum hari pemungutan suara, sebagian besar masyarakat sudah mengetahui siapa saja pasangan calon yang mengikuti Pilkada beserta program-program yang mereka tawarkan. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan selama masa kampanye sudah diterima dan dipahami oleh masyarakat dengan cukup baik."*⁷²

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat sudah mengenal pasangan calon yang maju dalam Pilkada serta mengetahui program yang mereka tawarkan sebelum hari pemilihan. Informasi yang diterima masyarakat selama masa kampanye memberikan pemahaman mengenai calon yang akan dipilih. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi politik telah membantu masyarakat dalam mempersiapkan pilihan politiknya.

Bapak Abu Bakar selaku tokoh agama menyampaikan:

*"Kami tidak pernah mengajak masyarakat untuk memilih calon tertentu. Yang kami lakukan adalah memberikan pemahaman agar masyarakat mencari tahu terlebih dahulu tentang calon yang akan dipilih sehingga mereka bisa menentukan pilihan dengan bijak.."*⁷³

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa tokoh masyarakat di Pulau Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam tidak berperan sebagai pengarah pilihan politik masyarakat kepada calon tertentu. Peran yang dilakukan lebih kepada memberikan pemahaman dan mendorong masyarakat untuk mencari informasi mengenai calon kepala daerah sebelum menentukan pilihan. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh masyarakat berperan sebagai pendidik politik dengan meningkatkan kesadaran politik warga agar dapat menggunakan hak pilih secara rasional dan bijaksana sesuai dengan pertimbangan masing-masing.

Bapak Rahim selaku tokoh adat mengatakan:

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Syukur Andila selaku Anggota KPPS Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 01 Juni 2026

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Abu Bakar selaku Tokoh agama Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 01 Juni 2026

*"Biasanya masyarakat mengikuti kampanye untuk mengetahui program dan rencana kerja yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Dari situ mereka dapat menilai calon mana yang dianggap mampu memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat kepulauan."*⁷⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Pulau Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam mengikuti kegiatan kampanye sebagai salah satu cara untuk memperoleh informasi mengenai program dan rencana kerja yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon. Melalui informasi yang diperoleh, masyarakat dapat menilai calon yang dianggap mampu memahami serta memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat kepulauan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran politik masyarakat dalam menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan terhadap program yang ditawarkan oleh calon peserta Pilkada.

Bapak Idas Rizal selaku tokoh pemuda menjelaskan:

*"Kalau pemilih muda sekarang lebih banyak mengikuti informasi kampanye melalui media sosial. Mereka sering melihat informasi tentang program calon dan berdiskusi dengan teman-temannya sebelum menentukan pilihan."*⁷⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa pemilih muda di Pulau Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam memiliki cara tersendiri dalam memperoleh informasi politik, yaitu melalui media sosial. Mereka memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mengetahui program dan informasi mengenai calon kepala daerah, serta melakukan diskusi dengan lingkungan pertemanan sebelum menentukan pilihan. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda mulai aktif dalam mencari informasi politik secara mandiri dan memiliki pertimbangan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada.

Salah satu masyarakat, Ibu Rukiah, menyatakan:

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahim selaku Tokoh adat Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 01 Juni 2026

⁷⁵

*"Saya pernah menghadiri kegiatan kampanye karena ingin mengetahui secara langsung program yang ditawarkan oleh calon kepala daerah sebelum menentukan pilihan pada saat pemungutan suara."*⁷⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat di Pulau Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam menghadiri kegiatan kampanye sebagai bentuk keinginan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai program yang ditawarkan oleh calon kepala daerah. Keikutsertaan dalam kegiatan kampanye menunjukkan adanya ketertarikan dan partisipasi politik masyarakat dalam memahami calon sebelum memberikan suara. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat berupaya menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan terhadap informasi yang diperoleh selama proses Pilkada.

Sementara itu, Ibu Zunaidah mengatakan:

*"Saya tidak sempat mengikuti kampanye secara langsung, tetapi saya tetap mencari informasi mengenai calon melalui media sosial dan informasi yang disampaikan oleh tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya."*⁷⁷

Pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat di Pulau Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam tetap berusaha memperoleh informasi politik meskipun tidak mengikuti kegiatan kampanye secara langsung. Masyarakat memanfaatkan media sosial serta informasi dari tokoh masyarakat di lingkungan sekitar untuk mengetahui calon dan program yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi politik tidak hanya berlangsung melalui kampanye formal, tetapi juga melalui peran tokoh masyarakat sebagai sumber informasi yang membantu meningkatkan pemahaman politik warga dalam menentukan pilihan pada Pilkada.

Berdasarkan hasil wawancara, tingkat partisipasi masyarakat Pulau Bulang Lintang dalam mengikuti kampanye cukup beragam. Sebagian masyarakat

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Rukian selaku Masyarakat pemilih Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 01 Juni 2026

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Zunaidah selaku Masyarakat yang tidak ikut Pilkada Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 07 Agustus 2026

mengikuti kampanye secara langsung untuk mendengarkan penyampaian visi dan misi pasangan calon, sedangkan sebagian lainnya tidak menghadiri kegiatan kampanye karena kesibukan bekerja, jarak lokasi kegiatan, maupun keterbatasan akses transportasi sebagai wilayah kepulauan. Meskipun demikian, masyarakat yang tidak hadir secara langsung tetap memperoleh informasi mengenai pasangan calon melalui Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, penyelenggara pemilu, serta media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa akses informasi politik tidak hanya diperoleh melalui kehadiran dalam kampanye, tetapi juga melalui komunikasi yang terjalin di lingkungan masyarakat.

Tabel 4.17 Temuan Ringkasan

No	Aspek	Temuan
1	Keikutsertaan masyarakat	Sebagian masyarakat mengikuti kampanye secara langsung, sebagian lainnya tidak.
2	Alasan mengikuti	Ingin mengetahui visi, misi, dan program pasangan calon.
3	Alasan tidak mengikuti	Kesibukan, jarak lokasi kampanye, dan keterbatasan akses transportasi.
4	Sumber informasi alternative	Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, penyelenggara pemilu, dan media sosial.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa keikutsertaan masyarakat Pulau Bulang Lintang dalam kegiatan kampanye belum merata, namun hal tersebut tidak berarti masyarakat tidak berpartisipasi dalam proses politik. Masyarakat yang tidak menghadiri kampanye secara langsung tetap berupaya memperoleh informasi mengenai pasangan calon melalui berbagai sumber yang dipercaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa karakteristik wilayah kepulauan memengaruhi bentuk partisipasi politik masyarakat, sehingga akses

informasi melalui tokoh masyarakat menjadi sangat penting dalam mendukung keterlibatan warga pada Pilkada.

Jika dikaitkan dengan teori partisipasi politik Huntington dan Nelson, mengikuti kampanye merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang dilakukan warga negara untuk memperoleh informasi dan terlibat dalam proses politik sebelum pemungutan suara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Pulau Bulang Lintang berpartisipasi dengan cara yang beragam, baik melalui kehadiran langsung pada kegiatan kampanye maupun melalui pencarian informasi dari tokoh masyarakat dan sumber lainnya sebelum menentukan pilihan politik.

Keikutsertaan dalam kampanye maupun upaya memperoleh informasi mengenai kampanye memberikan kontribusi terhadap partisipasi politik masyarakat karena membantu masyarakat memahami visi, misi, dan program pasangan calon. Dengan informasi yang lebih memadai, masyarakat dapat menentukan pilihan secara lebih sadar dan rasional pada saat menggunakan hak pilih dalam Pilkada Tahun 2024 di Pulau Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam.

3. Terlibat Diskusi Politik

Salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat adalah keterlibatan dalam diskusi politik. Diskusi politik merupakan kegiatan yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai isu-isu politik, program pembangunan, serta visi dan misi calon pemimpin daerah. Melalui diskusi politik, masyarakat dapat berinteraksi secara langsung dengan tokoh politik maupun calon kepala daerah sehingga dapat memahami berbagai kebijakan dan program yang ditawarkan.

Keterlibatan masyarakat dalam diskusi politik menunjukkan adanya kesadaran dan kepedulian terhadap proses demokrasi. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pihak yang aktif mencari informasi dan menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Dengan demikian, diskusi politik menjadi salah satu sarana penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat.

Tabel 4.18 Kegiatan Diskusi Politik dan Silaturahmi antara Masyarakat Kelurahan Bulang Lintang dengan Calon Kepala Daerah pada Pilkada 2024



Berdasarkan Gambar 4.18 terlihat adanya kegiatan diskusi politik yang dihadiri oleh masyarakat Kelurahan Bulang Lintang. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dan dialog antara masyarakat dengan calon kepala daerah. Dalam kegiatan tersebut masyarakat diberikan kesempatan untuk mendengarkan pemaparan program kerja, visi, dan misi calon kepala daerah sekaligus menyampaikan berbagai aspirasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan diskusi politik ini mendapatkan perhatian yang cukup baik dari masyarakat. Kehadiran masyarakat menunjukkan adanya keinginan untuk

memperoleh informasi secara langsung mengenai calon pemimpin yang akan dipilih pada Pilkada 2024. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana komunikasi antara masyarakat dan calon kepala daerah sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana program yang ditawarkan mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan yang ada di lingkungan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Sobur selaku Ketua RT di Kelurahan Bulang Lintang, beliau menyampaikan:

*"Masyarakat cukup aktif mengikuti kegiatan diskusi politik selama Pilkada 2024. Warga hadir untuk mendengarkan program yang disampaikan oleh calon kepala daerah dan mengetahui rencana pembangunan yang akan dilakukan. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan berbagai aspirasi dan harapan yang berkaitan dengan kebutuhan warga di lingkungan Kelurahan Bulang Lintang."*⁷⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasme yang cukup baik dalam mengikuti kegiatan diskusi politik. Kehadiran masyarakat tidak hanya bertujuan untuk mendengarkan informasi, tetapi juga untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi sehingga dapat menjadi perhatian bagi calon pemimpin daerah.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Zaleha salah seorang masyarakat pemilih yang menyatakan:

*"Saya mengikuti kegiatan diskusi politik karena ingin mengetahui secara langsung program yang ditawarkan oleh calon kepala daerah. Dengan mengikuti kegiatan tersebut saya menjadi lebih memahami visi dan misi calon sehingga dapat menentukan pilihan dengan lebih yakin."*⁷⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat di Pulau Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam mengikuti kegiatan diskusi politik sebagai sarana untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Sobur selaku Ketua RT Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 01 Juni 2026

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Zaleha selaku Masyarakat pemilih Kelurahan Bulang Lintang pada tanggal 01 Juni 2026

program, visi, dan misi calon kepala daerah. Melalui diskusi tersebut, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik sehingga memiliki keyakinan dalam menentukan pilihan pada saat Pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa diskusi politik menjadi salah satu bentuk partisipasi politik yang mendukung masyarakat dalam mengambil keputusan secara sadar dan berdasarkan informasi yang diperoleh.

Selain sebagai sarana memperoleh informasi, diskusi politik juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Dalam kegiatan tersebut masyarakat menyampaikan harapan terkait pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, fasilitas pendidikan, serta berbagai kebutuhan lain yang dianggap penting bagi kemajuan Kelurahan Bulang Lintang. Dengan adanya ruang komunikasi tersebut, masyarakat merasa lebih dilibatkan dalam proses demokrasi yang berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Pulau Bulang Lintang cukup aktif melakukan diskusi politik, baik dalam lingkungan keluarga, pertemuan warga, maupun kegiatan sosial di masyarakat. Diskusi yang dilakukan umumnya membahas jadwal pelaksanaan Pilkada, visi dan misi pasangan calon, program kerja calon kepala daerah, serta harapan masyarakat terhadap pemimpin yang akan terpilih. Selain itu, Ketua RT, Ketua RW, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda sering menjadi tempat masyarakat bertanya atau berdiskusi mengenai informasi Pilkada sehingga membantu masyarakat memperoleh informasi yang lebih jelas. Temuan ini menunjukkan bahwa tokoh masyarakat berperan sebagai sumber informasi sekaligus fasilitator dalam diskusi politik di lingkungan masyarakat.

Tabel 4.19 Ringkasan Temuan

No	Aspek	Temuan
1	Bentuk diskusi politik	Dilakukan dalam keluarga, pertemuan warga, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

2	Materi diskusi	Jadwal Pilkada, visi dan misi calon, program kerja, serta isu yang berkembang di masyarakat.
3	Peran tokoh masyarakat	Menjadi tempat bertanya, memberikan penjelasan, dan meluruskan informasi mengenai Pilkada.
4	Tujuan diskusi	Menambah pengetahuan dan membantu masyarakat menentukan pilihan secara sadar.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam diskusi politik menunjukkan adanya partisipasi politik yang tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan hak pilih, tetapi juga melalui pertukaran informasi dan pandangan mengenai Pilkada. Diskusi yang berlangsung di lingkungan masyarakat membantu warga memperoleh informasi yang lebih lengkap, mengurangi kesalahpahaman, dan meningkatkan pemahaman terhadap proses demokrasi. Kehadiran tokoh masyarakat sebagai pihak yang dipercaya juga membuat diskusi politik berlangsung lebih terarah dan kondusif.

Jika dikaitkan dengan teori partisipasi politik Huntington dan Nelson, keterlibatan dalam diskusi politik merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang menunjukkan keterlibatan warga negara dalam proses politik di luar pemberian suara. Melalui diskusi, masyarakat memperoleh informasi, bertukar pendapat, dan membentuk pertimbangan politik sebelum menentukan pilihan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Pulau Bulang Lintang telah berpartisipasi dalam proses tersebut melalui diskusi bersama tokoh masyarakat dan sesama warga.

Keterlibatan dalam diskusi politik memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat karena membantu warga memahami informasi mengenai Pilkada, mengenal visi dan misi pasangan calon, serta menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan yang lebih rasional. Dengan

demikian, diskusi politik menjadi salah satu sarana yang mendukung terwujudnya partisipasi politik yang lebih sadar, aktif, dan bertanggung jawab dalam Pilkada Tahun 2024 di Pulau Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam.

E. Faktor Pendukung Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Faktor pendukung merupakan kondisi yang mempermudah tokoh masyarakat dalam menjalankan perannya sebagai pendidik politik, motivator politik, dan mediator politik untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Tahun 2024 di Pulau Bulang Lintang.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan peran tersebut.

1. Kepercayaan Masyarakat terhadap Tokoh Masyarakat

Ibu Ida Lela, salah satu informan dari kalangan masyarakat umum, mengungkapkan:

*"Kalau Pak Ketua RT yang bilang, kita pasti percaya. Beliau sudah bertahun-tahun tinggal di sini dan selalu bantu warga. Jadi kalau beliau bilang penting untuk memilih, ya kita turut saja."*⁸⁰

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat masih menaruh kepercayaan yang tinggi kepada Ketua RT, Ketua RW, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Kepercayaan tersebut memudahkan tokoh masyarakat dalam menyampaikan informasi, memberikan motivasi, serta mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Hubungan yang baik antara tokoh masyarakat dan warga menyebabkan informasi mengenai Pilkada lebih mudah diterima dan dipercaya

2. Komunikasi yang Baik antara Tokoh Masyarakat dan Warga

Komunikasi yang terjalin melalui pertemuan warga, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, dan interaksi sehari-hari menjadi sarana yang efektif dalam

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ida Lela selaku Warga pemilih Kelurahan Bulang Lintang tanggal 01 Juni 2026.

menyampaikan informasi mengenai Pilkada. Melalui komunikasi yang intensif, masyarakat lebih mudah memperoleh informasi mengenai tahapan Pilkada, jadwal pemungutan suara, serta pentingnya menggunakan hak pilih.

3. Kerja Sama dengan Penyelenggara Pemilu

Hasil penelitian menunjukkan adanya koordinasi antara tokoh masyarakat dengan penyelenggara pemilu, seperti KPPS, Ketua RT, dan Ketua RW, dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kerja sama tersebut membantu mempercepat penyebaran informasi mengenai tahapan Pilkada dan memudahkan penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat selama proses pemilihan.

4. Tingginya Kesadaran Politik Sebagian Masyarakat

Sebagian masyarakat telah memiliki kesadaran akan pentingnya menggunakan hak pilih sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Kesadaran tersebut memudahkan tokoh masyarakat dalam memberikan pendidikan politik dan motivasi karena masyarakat bersedia menerima informasi dan ikut berpartisipasi dalam Pilkada.

Tabel 4. 20 Ringkasan Temuan

No	Faktor Pendukung	Temuan Penelitian
1	Kepercayaan masyarakat	Tokoh masyarakat dipercaya sehingga informasi dan ajakan lebih mudah diterima.
2	Komunikasi yang baik	Informasi Pilkada disampaikan melalui pertemuan warga, kegiatan sosial, dan

		komunikasi sehari-hari.
3	Kerja sama dengan penyelenggara pemilu	Koordinasi antara RT, RW, tokoh masyarakat, dan KPPS memperlancar penyampaian informasi.
4	Kesadaran politik masyarakat	Sebagian masyarakat telah menyadari pentingnya menggunakan hak pilih dalam Pilkada.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa kepercayaan masyarakat, komunikasi yang efektif, kerja sama dengan penyelenggara pemilu, dan kesadaran politik masyarakat merupakan faktor utama yang mendukung keberhasilan tokoh masyarakat dalam menjalankan perannya. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan sehingga memudahkan penyampaian informasi, pemberian motivasi, dan penyaluran aspirasi masyarakat selama tahapan Pilkada.

Menurut teori peran Biddle (1986), seseorang dapat menjalankan perannya dengan baik apabila memperoleh dukungan dari lingkungan sosial serta adanya harapan masyarakat terhadap kedudukannya. Dalam penelitian ini, tingginya kepercayaan masyarakat dan komunikasi yang baik menunjukkan bahwa tokoh masyarakat memperoleh legitimasi sosial untuk menjalankan perannya sebagai pendidik politik, motivator politik, dan mediator politik. Dukungan tersebut membuat perilaku tokoh masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat terhadap status sosial yang mereka miliki.

Faktor-faktor pendukung tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat karena mempermudah penyebaran informasi Pilkada, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih, memperkuat komunikasi antara masyarakat dan penyelenggara pemilu, serta membantu menciptakan pelaksanaan Pilkada yang lebih tertib dan kondusif di Pulau Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam.

F. Faktor Penghambat Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Faktor penghambat merupakan berbagai kondisi yang membatasi atau mengurangi efektivitas tokoh masyarakat dalam menjalankan perannya sebagai pendidik politik, motivator politik, dan mediator politik pada Pilkada Tahun 2024 di Pulau Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan beberapa faktor penghambat sebagai berikut.

1. Kondisi Geografis Wilayah Kepulauan

Pulau Bulang Lintang merupakan wilayah kepulauan sehingga akses menuju beberapa lokasi masih dipengaruhi oleh kondisi transportasi laut dan cuaca. Keadaan ini menyebabkan penyampaian informasi serta pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tidak selalu berjalan secara optimal. Selain itu, kondisi geografis juga dapat memengaruhi kehadiran masyarakat pada saat kegiatan Pilkada maupun hari pemungutan suara.

2. Rendahnya Kesadaran Politik Sebagian Masyarakat

Kedua, rendahnya literasi politik sebagian warga. Tingkat pendidikan yang masih rendah pada sebagian warga menyebabkan pemahaman mereka tentang proses demokrasi dan manfaat berpartisipasi dalam Pilkada masih terbatas. Ibu Zaleha, salah satu informan warga, mengungkapkan:

*"Jujur, saya pilih karena disuruh Pak RT. Soal programnya siapa, saya kurang tahu. Yang penting orang yang saya percaya bilang baik, ye saya ikut."*⁸¹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang menganggap Pilkada kurang penting atau kurang memiliki minat untuk mengikuti perkembangan politik. Kondisi ini menyebabkan tokoh masyarakat perlu melakukan pendekatan yang lebih intensif agar masyarakat bersedia memperoleh informasi dan menggunakan hak pilihnya.

3. Kesibukan Masyarakat dalam Bekerja

⁸¹Hasil wawancara dengan Ibu Zaleha selaku Warga pemilih Kelurahan Bulang Lintang tanggal 01 juni 2026.

Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan atau memiliki pekerjaan yang menyita waktu. Kesibukan tersebut menyebabkan tidak semua warga dapat mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, atau pertemuan yang berkaitan dengan Pilkada. Akibatnya, penyampaian informasi oleh tokoh masyarakat tidak selalu dapat menjangkau seluruh warga secara langsung.

4. Penyebaran Informasi yang Belum Merata

Meskipun tokoh masyarakat telah berupaya menyampaikan informasi mengenai Pilkada, masih terdapat masyarakat yang terlambat memperoleh informasi atau kurang memahami tahapan Pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi belum sepenuhnya merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 4. 21 Ringkasan Temuan

No	Faktor Penghambat	Temuan Penelitian
1	Kondisi geografis	Wilayah kepulauan, transportasi, dan cuaca memengaruhi penyampaian informasi serta partisipasi masyarakat.
2	Rendahnya kesadaran politik	Sebagian masyarakat masih kurang peduli terhadap Pilkada dan informasi politik.
3	Kesibukan masyarakat	Aktivitas pekerjaan membuat sebagian warga tidak dapat mengikuti sosialisasi atau kampanye.
4	Penyebaran informasi belum merata	Tidak semua masyarakat menerima informasi Pilkada secara bersamaan dan lengkap.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa faktor penghambat tersebut saling berkaitan dalam memengaruhi efektivitas peran tokoh masyarakat. Kondisi geografis dan kesibukan masyarakat membatasi intensitas komunikasi, sedangkan rendahnya kesadaran politik dan penyebaran informasi yang belum merata menyebabkan sebagian masyarakat kurang aktif mengikuti

tahapan Pilkada. Oleh karena itu, tokoh masyarakat perlu melakukan pendekatan yang lebih beragam dan berkelanjutan agar informasi politik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Jika dikaitkan dengan teori peran Biddle (1986), pelaksanaan peran tidak hanya dipengaruhi oleh status sosial seseorang, tetapi juga oleh kondisi lingkungan tempat peran tersebut dijalankan. Dalam penelitian ini, tokoh masyarakat telah berupaya menjalankan perannya sebagai pendidik politik, motivator politik, dan mediator politik. Namun, efektivitas peran tersebut dipengaruhi oleh hambatan eksternal seperti kondisi geografis, kesibukan masyarakat, rendahnya kesadaran politik, dan penyebaran informasi yang belum merata. Dengan demikian, meskipun harapan masyarakat terhadap tokoh masyarakat tetap tinggi, pelaksanaan peran belum dapat berjalan secara maksimal karena adanya faktor-faktor lingkungan yang membatasi.

Faktor-faktor penghambat tersebut berdampak pada tingkat partisipasi politik masyarakat karena dapat mengurangi akses terhadap informasi, membatasi keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan Pilkada, dan memengaruhi penggunaan hak pilih. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat tetap berupaya mengatasi hambatan tersebut melalui komunikasi langsung, koordinasi dengan penyelenggara pemilu, dan pendekatan kepada masyarakat. Upaya tersebut membantu menjaga partisipasi politik masyarakat tetap berada pada tingkat yang cukup baik, meskipun masih diperlukan peningkatan sosialisasi dan pemerataan informasi pada pelaksanaan Pilkada berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, tokoh masyarakat di Pulau Bulang Lintang berperan sebagai pendidik politik, motivator politik, dan mediator politik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2024. Keberhasilan peran tersebut didukung oleh tingginya kepercayaan masyarakat terhadap tokoh lokal. Meskipun tingkat partisipasi menurun dibanding Pilkada 2020, Kecamatan Bulang tetap menjadi kecamatan dengan tingkat partisipasi tertinggi di Kota Batam, sehingga peran tokoh masyarakat tetap dinilai signifikan dalam mendukung partisipasi politik masyarakat.

Pertama, tokoh masyarakat di Pulau Bulang Lintang menjalankan tiga peran utama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2024, yaitu sebagai pendidik politik, motivator politik, dan mediator politik. Peran sebagai pendidik politik diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi informal, penyampaian informasi mengenai prosedur pemilihan, serta penjelasan mengenai pentingnya Pilkada bagi pembangunan daerah. Peran sebagai motivator diwujudkan melalui keteladanan sikap, penyediaan transportasi menuju TPS, dan ajakan langsung kepada warga untuk menggunakan hak pilih. Sementara peran sebagai mediator diwujudkan melalui fungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan penyelenggara Pilkada dan dalam menjaga keharmonisan sosial selama berlangsungnya proses demokratis.

Kedua, tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Bulang pada Pilkada 2024 mengalami penurunan dari 83,65% pada Pilkada 2020 menjadi 72,28% pada Pilkada 2024. Meskipun angka ini masih jauh di atas rata-rata partisipasi Kota Batam (46,76%), penurunan tersebut mengindikasikan adanya sejumlah faktor penghambat efektivitas peran tokoh masyarakat. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi geografis kepulauan yang membatasi mobilitas, meningkatnya orientasi pragmatis sebagian warga, melemahnya kepercayaan terhadap efektivitas Pilkada, serta adanya praktik politik uang.

Ketiga, modal sosial berupa kepercayaan masyarakat dan jaringan sosial yang dimiliki tokoh masyarakat merupakan aset yang sangat strategis dalam mendorong partisipasi politik di wilayah kepulauan. Efektivitas peran tokoh masyarakat sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen tokoh itu sendiri

dalam menjalankan fungsi sosial-politiknya secara konsisten dan bertanggung jawab. Peningkatan kapasitas tokoh masyarakat melalui pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan menjadi kebutuhan yang mendesak.

Keempat, kondisi geografis kepulauan yang terpencil mempertegas posisi strategis tokoh masyarakat sebagai penghubung utama antara penyelenggara pemilu dan warga pemilih. Tanpa kehadiran dan peran aktif tokoh masyarakat, sosialisasi Pilkada di wilayah kepulauan seperti Pulau Bulang Lintang tidak akan dapat berjalan secara efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam

KPU Kota Batam disarankan untuk mengoptimalkan program sosialisasi Pilkada dengan melibatkan secara aktif tokoh masyarakat setempat sebagai mitra strategis. Program sosialisasi perlu dirancang secara khusus untuk wilayah kepulauan dengan mempertimbangkan keterbatasan akses transportasi dan komunikasi. KPU perlu memberikan pembekalan dan pelatihan bagi tokoh masyarakat mengenai proses Pilkada secara berkala, tidak hanya pada saat menjelang pemilihan tetapi juga di luar periode pemilu, agar pengetahuan dan kapasitas tokoh masyarakat terus terbaru dan akurat.

2. Bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam

Bawaslu Kota Batam disarankan untuk memperkuat keterlibatan tokoh masyarakat dalam pengawasan Pilkada di wilayah kepulauan, termasuk melalui program pelatihan pengawas pemilu berbasis komunitas. Bawaslu juga perlu meningkatkan upaya pencegahan praktik politik uang di wilayah kepulauan dengan melibatkan tokoh masyarakat sebagai mitra pencegahan, disertai dengan program pendidikan pemilih yang menekankan pada bahaya dan dampak negatif politik uang bagi kualitas demokrasi.

3. Bagi Pemerintah Kota Batam

Pemerintah Kota Batam disarankan untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur komunikasi dan informasi di wilayah kepulauan terpencil, termasuk Pulau Bulang Lintang, sebagai prasyarat penting bagi terwujudnya demokrasi yang inklusif. Ketersediaan akses internet dan sinyal telekomunikasi yang memadai akan memungkinkan warga di wilayah kepulauan mendapatkan informasi yang lebih luas dan berimbang tentang kandidat dan proses pemilihan. Pemerintah juga perlu mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat kepulauan untuk mengurangi kerentanan warga terhadap praktik politik uang.

4. Bagi Tokoh Masyarakat di Pulau Bulang Lintang

Para tokoh masyarakat di Pulau Bulang Lintang disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka tentang sistem kepemiluan, regulasi Pilkada, dan hak-hak warga pemilih agar dapat memberikan informasi yang akurat. Kerja sama antar tokoh masyarakat dari berbagai kategori perlu diperkuat untuk memaksimalkan efektivitas sosialisasi dan mobilisasi politik. Tokoh masyarakat juga perlu berkomitmen untuk menjaga independensi dan integritas dalam menjalankan peran sosialisasi politik, serta secara konsisten menolak dan mencegah praktik politik uang dalam komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Almond, Gabriel A., dan Sidney Verba. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press, 1963.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Huntington, Samuel P., dan Joan M. Nelson. *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge: Harvard University Press, 1976.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Parsons, Talcott. *The Social System*. New York: Free Press, 1951.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Artikel

Biddle, Bruce J. "Recent Developments in Role Theory." *Annual Review of Sociology* Vol. 12 (1986): 67–92.

McClosky, Herbert. "Political Participation." Dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*. New York: Macmillan, 1968.

Jurnal

Abdillah, Farid, dan Baktiawan Nusanto. "Peran Tokoh Agama dalam Mempengaruhi Afiliasi Politik Masyarakat dalam Pilkada 2024." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 2025.

Kamuli, S., dkk. "Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu 2024." *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2025.

Oci, Y. "Upaya KPU Kota Serang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Serentak 2024." *Journal of Public Administration*, 2025.

Syabana, M. Sahal Ali, dan Suyono. "Komunikasi Politik Tokoh Masyarakat dalam Menghadapi Pemilu 2024." *Jurnal Komunikasi Politik*, 2023.

Aditya, Fariz, dan Raja S. Pratama. "Peran Tokoh Masyarakat dalam Mempengaruhi Perilaku Memilih Warga." *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 2025.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Azhari, Muhammad. Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah. Skripsi. Universitas Negeri Makassar, 2021.

Rahman, Andi. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah. Skripsi. Universitas Hasanuddin, 2022.

Makalah Seminar

Tim Pengabdian Civitas Akademika IAIN Lhokseumawe. "Penguatan Peran Politik Masyarakat dalam Pemilihan." Dalam *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat*. Lhokseumawe: IAIN Lhokseumawe, 2024.

Sumber Lain

Komisi Pemilihan Umum Kota Batam. Rekapitulasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Kecamatan Bulang. Batam: KPU Kota Batam, 2024.

Komisi Pemilihan Umum Kota Batam. Data Partisipasi Pemilih Pilkada Kota Batam Tahun 2024. Batam: KPU Kota Batam, 2024.

Komisi Pemilihan Umum Kota Batam. Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Bulang Tahun 2024. Batam: KPU Kota Batam, 2024.

Komisi Pemilihan Umum Kota Batam. Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Kota Batam Tahun 2024. Batam: KPU Kota Batam, 2024.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Pulau Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam.

Nama Peneliti : Sabrina Janneti
NPM : 221160002
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama :
Umur / Jenis Kelamin :
Pekerjaan / Jabatan :
Kategori informan :
Tanggal & Tempat :

B. PEDOMAN WAWANCARA – TOKOH MASYARAKAT (Informan Kunci)

1. Peran dan Posisi Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana peran Bapak/Ibu sebagai tokoh masyarakat dalam kegiatan politik di Pulau Bulang Lintang, khususnya pada saat pelaksanaan Pilkada 2024?
2. Apakah Bapak/Ibu secara aktif mengajak atau memotivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024? Jika ya, bagaimana caranya?

2. Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik

1. Upaya atau kegiatan apa saja yang Bapak/Ibu lakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 di Pulau Bulang Lintang?
2. Apakah ada kerja sama antara tokoh masyarakat dengan pemerintah kelurahan atau KPU setempat dalam sosialisasi Pilkada 2024? Bagaimana bentuk kerja samanya?
3. Media atau saluran komunikasi apa yang digunakan untuk mensosialisasikan pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada kepada masyarakat Pulau Bulang Lintang?

3. Faktor Penghambat Partisipasi Politik

1. Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat di Pulau Bulang Lintang enggan atau tidak berpartisipasi dalam Pilkada 2024?

2. Apakah kondisi geografis (kepulauan/hinterland) menjadi hambatan bagi masyarakat untuk datang ke TPS? Bagaimana cara mengatasinya?

3. Apakah rendahnya tingkat pendidikan atau akses informasi politik mempengaruhi partisipasi masyarakat? Apa yang dilakukan tokoh masyarakat untuk mengatasinya?

4. Pengaruh Tokoh Masyarakat terhadap Pilihan Politik

1. Apakah pengaruh tokoh masyarakat di Pulau Bulang Lintang cukup besar dalam menentukan arah pilihan politik warga? Bagaimana hal itu terjadi?

2. Bagaimana Bapak/Ibu memastikan bahwa dorongan partisipasi yang diberikan bersifat netral dan tidak memihak salah satu calon?

5. Evaluasi dan Harapan

1. Bagaimana Bapak/Ibu menilai tingkat partisipasi masyarakat Pulau Bulang Lintang pada Pilkada 2024 dibandingkan pemilihan sebelumnya?

2. Apa harapan Bapak/Ibu ke depan terkait peran tokoh masyarakat dan partisipasi politik warga di Pulau Bulang Lintang pada pemilihan yang akan datang?

C. PEDOMAN WAWANCARA – MASYARAKAT (Informan Utama)

1. Pengetahuan dan Kesadaran Politik

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kecamatan Bulang? Dari mana informasi tersebut didapat?

2. Apakah Bapak/Ibu menggunakan hak pilih pada Pilkada 2024? Apa alasan Bapak/Ibu hadir atau tidak hadir ke TPS?

2. Pengaruh Tokoh Masyarakat

1. Apakah ada tokoh masyarakat (seperti ketua RT/RW, tokoh adat, pemuka agama, atau tokoh pemuda) yang mengajak atau mendorong Bapak/Ibu untuk ikut memilih pada Pilkada 2024?

2. Seberapa besar pengaruh ajakan tokoh masyarakat tersebut terhadap keputusan Bapak/Ibu untuk datang ke TPS?

3. Apakah tokoh masyarakat setempat memberikan informasi yang memadai mengenai tata cara pemilihan dan pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada?

3. Hambatan Partisipasi

1. Apa saja kendala yang Bapak/Ibu hadapi untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2024 (misalnya jarak ke TPS, kesibukan pekerjaan, kurangnya informasi, dan lain-lain)?

2. Apakah lokasi geografis Pulau Bulang Lintang yang terpisah dari pusat kota menjadi faktor yang memengaruhi keikutsertaan Bapak/Ibu dalam Pilkada?

4. Harapan Masyarakat

1. Apa yang perlu dilakukan oleh tokoh masyarakat agar lebih banyak warga Pulau Bulang Lintang mau berpartisipasi dalam Pilkada di masa mendatang?

2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara paling efektif untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di wilayah kepulauan seperti Pulau Bulang Lintang?

TRANSKRIP WAWANCARA

Identitas Informan 1

1. Nama : Ahmad Sobur
2. Umur : 51 Tahun
3. Status : Sudah Menikah

4. Pendidikan : AKADEMIK/DIPLOMA III/ SERJANA MUDA

5. Jabatan : Ketua RT

Hasil Wawancara

1. **Peneliti:** Bagaimana peran Bapak sebagai Ketua RT dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan di Pulau Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam?

Informan: Ya. Mengundang warga kebalai pertemuan (gedung serbaguna) yang ada di lingkungan, untuk menyampaikan informasi yang di dapat dari pihak penyelenggara pemilu kelurahan (PPS), mengenai bulan dan tanggal akan di selenggarakannya Pilkada. Dan menginformasikan kepada warga bahwa pihak PPS akan melakukan COKLIT (pencocokan dan penelitian data) kerumah-rumah warga. Sebelum menetapkan DPT (Daftar pemilihan tetap) Pilkada 2024.

2. **Peneliti:** Apakah Bapak sebagai Ketua RT turut berperan aktif dalam mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada 2024 kepada warga di lingkungan RT? Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan?

Informan: Disebut berperan aktif tidak juga. Karena seorang RT di beri batasan-batasan atau aturan oleh KPU daerah mengenai keterlibatan apart RT dalam Pilkada. Yang intinya ketua RT harus bersikap netral, memberi kebebasan pada warganya. Untuk memilih pemimpinnya dalam hal ini Wali Kota dan Gubernur sesuai hati nuraninya.

3. **Peneliti:** Upaya konkret apa saja yang Bapak lakukan sebagai Ketua RT untuk mendorong warga agar tidak golput dan aktif berpartisipasi dalam Pilkada 2024?

Informan: Memberi pemahaman sekaligus pencerahan kepada warga, mengenai partisipasi Pilkada dengan cara mengizinkan tim sukses dari masing-masing calon melakukan sosialisasi dengan warga langsung.

4. **Peneliti:** Menurut Bapak apa saja faktor utama yang menyebabkan warga di lingkungan RT tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024?

Informan: Faktor utama penyebab warga tidak menggunakan hak pilih adalah Popularitas calon pemimpin, janji yang terlalu muluk-muluk, jarak tempat pemilihan (TPS) yang jauh, kurangnya sosialisasi kepada calon pemilih

5. **Peneliti:** Apakah ada koordinasi antara Ketua RT dengan pihak kelurahan atau panitia pemungutan suara (PPS/KPPS) terkait persiapan dan pelaksanaan Pilkada 2024 di Pulau Bulang Lintang?

Informan: Ada koordinasi antara RT dan pihak kelurahan (panitia pemungutan suara) dari mulai petugas pemutakhiran data pemilu (PPDP) yang di tunjuk oleh PPS kelurahan, sosialisasi pemilihan KPPS, Penentuan tempat TPS dan sebagainya.

6. **Peneliti:** Apakah pernah ada tekanan dari pihak tertentu agar Bapak/Ibu sebagai Ketua RT mengarahkan pilihan warga kepada calon tertentu? Bagaimana cara Bapak menyikapinya?

Informan: Tidak menutupi kenyataan, tekanan itu ada. Sebagai RT harus bersifat terbuka, netral dan memberi penjelasan serta argument yang tidak menyinggung perasaan untuk menentukan pilihannya.

7. **Peneliti:** Bagaimana Bapak menilai tingkat partisipasi warga di lingkungan RT pada Pilkada 2024? Apakah sudah memuaskan dibandingkan pemilihan sebelumnya?

Informan: Tingkat partisipasi kurang memuaskan di sebabkan karena beberapa faktor misalnya popularitas calon pemimpin, janji yang terlalu muluk-muluk dan tidak masuk akal dari tim sukses masing-masing calon dan juga jarak tempat pemilihan dan cuaca saat pemilihan.

TRANSKRIP WAWANCARA

Identitas Informan 2

1. Nama : Gani
2. Umur : 45Tahun

3. Status : Sudah Menikah

4. Pendidikan : SMP

5. Jabatan : Ketua RW

Hasil Wawancara

1. **Peneliti:** Bagaimana peran dan fungsi Bapak, sebagai Ketua RW dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan di Pulau Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam?

Informan: Melayani dan mengayomi masyarakat di lingkungan misalnya, melayani masyarakat dalam administrasi pemerintahan, menandatangani surat pengantar untuk pembuatan KTP, KK, Akte kelahiran, catatan kepolisian (SKCK), pengantar nikah, keterangan pindah, keterangan tidak mampu, domisili usaha, dan sebagainya. Dalam kehidupan sosial misalnya menghimbau masyarakat untuk bergotong royong, menyelesaikan pertikaian atau sengketa di masyarakat lingkungan, dan mengupayakan ketertiban.

2. **Peneliti:** Apakah Bapak, sebagai Ketua RW turut berperan aktif dalam mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada 2024 kepada warga di lingkungan RW? Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan?

Informan: Berperan aktif. Biasanya saya bersamapara RT di lingkungan sebagai perpanjangan tangan dari pihak kelurahan dalam hal ini PPS untuk mensosialisasikan masalah Pilkada ini.

3. **Peneliti:** Upaya konkret apa saja yang Bapak, lakukan sebagai Ketua RW untuk memastikan warga di wilayah RW menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024?

Informan: Mengizinkan para tim sukses masing-masing kandidat untuk mengajak dan mensosialisasikan Pilkada sesuai aturan yang berlaku di Pilkada

4. **Peneliti:** Menurut Bapak apa saja faktor utama yang menyebabkan warga di wilayah RW tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024?

Informan: Faktor utama adalah, cuaca dan jarak tempat pemilihan, popularitas kandidat, banyak janji yang tidak ditepati oleh pemimpin sebelumnya, kurangnya sosialisasi dari PPS, dan Tim sukses.

5. **Peneliti:** Apakah Bapak dilibatkan secara aktif oleh KPU Kota Batam atau panitia pemungutan suara (PPS) dalam proses pemutakhiran data pemilih dan sosialisasi Pilkada 2024?

Informan: Tidak dilibatkan secara aktif. KPU Kota Batam sudah menunjuk PPS Kelurahan. PPS menunjuk PPDP (petugas pemutakhiran data pemilu), dan KPPS di masing-masing TPS.

6. **Peneliti:** Apakah pernah ada tekanan dari pihak tertentu agar Bapak sebagai Ketua RW mengarahkan pilihan warga kepada calon tertentu? Bagaimana cara Bapak menyikapinya?

Informan: Tekanan itu ada tapi kita tanggap dengan santai aja, Pilkada ini merupakan pesta demokrasi kebebasan memilih dari pihak penekan pun tahu batas dan aturan.

7. **Peneliti:** Bagaimana Bapak, menilai tingkat partisipasi warga di wilayah RW pada Pilkada 2024? Apakah sudah memuaskan dibandingkan pemilihan sebelumnya?

Informan: Tingkat partisipasinya kurang memuaskan karena berberapa faktor yaitu, janji yang terlalu muluk-muluk dan tidak masuk akal dari tim sukses masing-masing calon.

TRANSKRIP WAWANCARA

Identitas Informan 3

1. Nama : Rahim

2. Umur : 65 Tahun
3. Status : Sudah Menikah
4. Pendidikan : SD
5. Jabatan : Tokoh Adat

Hasil Wawancara

1. **Peneliti:** Apakah Bapak, sebagai tokoh adat turut berperan dalam mendorong masyarakat Pulau Bulang Lintang untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2024? Bagaimana bentuk keterlibatan tersebut?

Informan: Turut mendorong biasanya dalam mendukung kegiatan RT setempat, misalnya di berkesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam pertemuan warga, sekaligus memberi pandangan mengenai partisipasi Pilkada.

2. **Peneliti:** Menurut Bapak, apa saja faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat Pulau Bulang Lintang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024?

Informan: Faktor yang menyebabkan kurangnya warga menggunakan hak pilihnya. Pigur pemimpin yang kurang di senangi warga

3. **Peneliti:** Menurut Bapak, apakah pemerintah dan penyelenggara pemilu sudah cukup melibatkan tokoh adat dalam proses sosialisasi Pilkada di wilayah kepulauan seperti Pulau Bulang Lintang?

Informan: Penyelenggara pemilu kurang melibatkan tokoh-tokoh adat, bahkan tidak melibatkan sama sekali, makanya tokoh adat lebih sering dimanfaatkan oleh tim sukses untuk mengajak warga mendukung salah satu calon di Pilkada.

4. **Peneliti:** Bagaimana Bapak sebagai tokoh adat menjaga netralitas dalam mendorong partisipasi masyarakat, agar tidak terkesan memihak salah satu calon kepala daerah?

Informan: Menghindari dan menolak secara halus ajakan kampanye dari tim sukses salah satu calon dan menyatakan dukungan pada calon tertentu.

TRANSKRIP WAWANCARA

Identitas Informan 4

1. Nama : Abu Bakar
2. Umur : 69 Tahun
3. Status : Sudah Menikah

4. Pendidikan : SD

5. Jabatan : Tokoh Agama

Hasil Wawancara

1. Peneliti: Bagaimana peran Bapak sebagai tokoh agama dalam kehidupan sosial masyarakat di Pulau Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam?

Informan: Memberi bimbingan keagamaan pada seluruh lapisan masyarakat sebagai contoh yang sudah berjalan di Bulang Lintang. Seperti, Latihan baca Al-berjanji pada remaja masjid, mengisi ceramah pada pengajian rutin, praktek mengurus jenazah, taklin manyit sampai tahlil, memberi nasehat-nasehat keagamaan.

2. Peneliti: Apakah Bapak sebagai tokoh agama turut berperan aktif dalam mendorong masyarakat Pulau Bulang Lintang untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024? Bagaimana bentuk keterlibatan tersebut?

Informan: Tokoh agama dalam masa-masa Pilkada ajang silaturahmi (tempat bersilahturahmi) para pasangan calon dengan tujuan minta doa restu sekaligus dukungan, karena para calon memahami besarnya pengaruh tokoh agama dalam mensukseskan cita-citanya menjadi pemenang dalam Pilkada. Tapi bagi tokoh agama yang bijak pengaruhnya, digunakan untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

3. Peneliti: Menurut Bapak apa saja faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat Pulau Bulang Lintang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024?

Informan: Faktor penyebab masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Adanya sikap pesemis, mereka beranggapan milih tak milih sama saja, tak akan merubah kehidupan mereka.

4. Peneliti: Menurut Bapak apakah pemerintah dan penyelenggara pemilu sudah cukup melibatkan tokoh agama dalam proses sosialisasi Pilkada di wilayah kepulauan seperti Pulau Bulang Lintang?

Informan: Pemerintah dan penyelenggara pemilu tidak melibatkan tokoh agama, mereka sudah dibentuk oleh KPU dengan struktur dan perundang-undangnya, sendiri beserta tahapan-tahapan pemilu.

5. **Peneliti:** Apakah pernah ada tekanan dari pihak tertentu agar tokoh agama ikut mempengaruhi pilihan politik masyarakat? Bagaimana Bapak menyikapinya?

Informan: Tekanan itu selalu ada, bahkan iming-iming yang mengiurkan, tapi kita sadari kita sebagai tokoh agama, harusnya jadi suritauladan dan bagi masyarakat kita dianggap tekanan ini adalah ujian dan kita kembalikan pada perundang-undangan Pilkada yang berlaku.

6. **Peneliti:** Bagaimana Bapak menilai tingkat partisipasi masyarakat Pulau Bulang Lintang pada Pilkada 2024? Apakah sudah mencerminkan kesadaran politik yang baik?

Informan: Tingkat partisipasi masyarakat Pulau Bulang Lintang, pada Pilkada 2024 sudah mencerminkan kesadaran politik yang baik, terbukti pelaksanaan Pilkada 2024 diselenggarakan KPU daerah. Berjalan dengan lancar dan sukses tidak di temukan temuan-temuan pelanggaran pemilu oleh PPK Kecamatan maupun PPL Kelurahan.

TRANSKRIP WAWANCARA

Identitas Informan 5

1. Nama : Idas Rizal.
2. Umur : 43Tahun
3. Status : Sudah Menikah

4. Pendidikan : SMP

5. Jabatan : Tokoh Pemuda

Hasil Wawancara

1. **Peneliti:** Bagaimana peran Bapak sebagai tokoh pemuda dalam kehidupan sosial masyarakat di Pulau Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam?

Informan: Peran saya menjadi tokoh pemuda adalah, membina dan mengarahkan pemuda kepada hal-hal yang positif, membimbing, menasehati, memberi pencerahan dan tempat mengadu pemuda serta memberi solusi dalam menyelesaikan masalah.

2. **Peneliti:** Apakah Bapak sebagai tokoh pemuda turut berperan aktif dalam mendorong masyarakat, khususnya pemilih muda, untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2024 di Pulau Bulang Lintang? Bagaimana bentuk keterlibatan tersebut?

Informan: Pemilih muda biasanya kurang peduli terhadap hak pilihnya, makanya perlu diberi pengetahuan, penjelasan terhadap politik.

3. **Peneliti:** Apa faktor-faktor yang menurut Bapak membuat pemilih muda di Pulau Bulang Lintang enggan atau tidak tertarik untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024?

Informan: Faktor-faktor yang membuat pemilih muda tidak tertarik menggunakan hak pilihnya adalah:

- a. Malas dan tidak peduli terhadap politik
- b. Pesimis
- c. Kurang paham
- d. Nerves (gugup)

4. **Peneliti:** Menurut Bapak apa saja hambatan utama yang dihadapi masyarakat Pulau Bulang Lintang dalam berpartisipasi pada Pilkada 2024, khususnya bagi kelompok pemuda?

Informan: Hambatan utama yang dihadapi dalam perpartisipasi bagi kelompok pemuda. Kurang pahamnya cara pelaksanaan di TPS, hal ini perlu ada sosialisasi sebelum pelaksanaan pencoblosan di karenakan banyak pemilih pemuda.

5. **Peneliti:** Apakah ada kerja sama antara tokoh pemuda dengan tokoh masyarakat lainnya (tokoh adat, tokoh agama, Ketua RT/RW) dalam mendorong partisipasi warga pada Pilkada 2024? Bagaimana bentuk kerja samanya?

Informan: Kerja sama antar tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya dalam mendorong partisipasi warga pada Pilkada 2024:

- a. Mengadakan sosialisasi berupa teknik pencoblosan kertas surat suara di TPS, yang diselenggarakan oleh PPS.
- b. Dilibatkannya pemuda sebagai anggota KKPS, petugas PPDP, PPL dan saksi partai atau saksi calon.

6. **Peneliti:** Bagaimana Bapak sebagai tokoh pemuda menjaga netralitas dalam mendorong partisipasi masyarakat, agar tidak terkesan memihak atau mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah?

Informan: Sebagai tokoh pemuda dalam menjaga netralitas dalam mendorong partisipasi masyarakat supaya tidak terkesan memihak salah satu calon kepala daerah biasanya bersifat terbuka, dalam arti menerima semua kunjungan kampanye dari semua calon kepala daerah

7. **Peneliti:** Bagaimana Bapak menilai tingkat partisipasi masyarakat, khususnya kalangan pemuda, pada Pilkada 2024 di Pulau Bulang Lintang? Apakah sudah memuaskan?

Informan: Partisipasi kalangan pemuda dalam Pilkada 2024 di Pulau Bulang Lintang sudah cukup memuaskan dengan di buktikan keterlibatannya para pemuda dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, mereka mendominasi kepesertaannya dalam KKPS, dan Saksi-saksi calon kepala daerah

TRANSKRIP WAWANCARA

Identitas Informan 6

1. Nama : Awie
2. Umur : 45ahun
3. Status : Sudah Menikah
4. Pendidikan : SD
5. Jabatan : Masyarakat Yang Tidak Ikut Memilih

Hasil Wawancara

1. **Peneliti:** Apakah Bapak mengikuti Pilkada Tahun 2024?

Informan: Tidak, saya tidak mengikuti Pilkada Tahun 2024.

2. **Peneliti:** Apa alasan Bapak tidak menggunakan hak pilih?

Informan: Pada hari pemungutan suara saya sedang melaut sehingga tidak sempat datang ke TPS.

3. **Peneliti:** Apakah Bapak mendapat informasi atau ajakan dari tokoh masyarakat?

Informan: Ye, Ketua RT dan tokoh masyarakat sudah mengingatkan warga agar datang ke TPS.

4. **Peneliti:** Bagaimana pendapat Bapak tentang peran tokoh masyarakat?

Informan: Menurut saya peran mereka sudah baik karena selalu memberikan informasi dan mengajak masyarakat untuk memilih.

5. **Peneliti:** Apa saran Bapak agar partisipasi masyarakat meningkat?

Informan: Sosialisasi perlu dilakukan lebih awal dan masyarakat yang bekerja di laut perlu terus diingatkan agar dapat mengatur waktu untuk memilih.

TRANSKRIP WAWANCARA

Identitas Informan 7

1. Nama : Zunaidah
2. Umur : 45ahun
3. Status : Sudah Menikah
4. Pendidikan : SD
5. Jabatan : Masyarakat Yang Tidak Ikut Memilih

Hasil Wawancara

1. **Peneliti:** Ibu mengikuti Pilkada Tahun 2024?

Informan: Tidak, saye tidak mengikuti Pilkada Tahun 2024.

2. **Peneliti:** Mengapa Ibu tidak datang ke TPS?

Informan: Saat hari pemungutan suara saya sedang sakit sehingga tidak dapat datang ke TPS.

3. **Peneliti:** Apakah Ibu menerima informasi mengenai Pilkada?

Informan: iye, saya menerima informasi dari Ketua RT dan tokoh agama.

4. **Peneliti:** Bagaimana menurut Ibu peran tokoh masyarakat?

Informan: Tokoh masyarakat sudah cukup aktif mengingatkan warga untuk menggunakan hak pilih.

5. **Peneliti:** Apa harapan Ibu untuk Pilkada berikutnya?

Informan: Semoga masyarakat semakin sadar pentingnya memilih dan tokoh masyarakat terus memberikan edukasi kepada warga.

TRANSKRIP WAWANCARA

Identitas Informan 8

1. Nama : Syukur Andilah
2. Umur : 38Tahun
3. Status : Sudah Menikah
4. Pendidikan : SMA
5. Jabatan : Anggota KPPS
6. No. TPS : TPS 01

Hasil Wawancara

1. Peneliti: Bagaimana tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai anggota KPPS dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di TPS wilayah Pulau Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam?

Informan: Tugas dan tanggung jawab KPPS. Anggota KPPS terdiri dari 7orang 1 orang diantaranya adalah ketua KPPS, dan masing-masing anggota KPPS mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan pencoblosan dibilik suara TPS sesuai dengan buku panduan KPPS yang diterbitkan oleh KPU.

2. Peneliti: Bagaimana bentuk nyata peran tokoh masyarakat yang Bapak amati dalam mendorong partisipasi pemilih di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara Pilkada 2024?

Informan: Peran tokoh masyarakat dalam mendorong partisipasi pemilih dilingkungan TPS, sebagai pengawas sukarela atau sering di sebut pemantau pemilu yang bertugas diluar area TPS menyasikan jalan nya proses pemungutan suara, menginformasikan yang tidak bisa hadir ke TPS dikarnakan halangan masalahnya sakit kepada KPPS.

3. Peneliti: Bagaimana tingkat kehadiran pemilih di TPS Bapak pada Pilkada 2024 dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya? Apakah mengalami peningkatan atau penurunan?

Informan: Tingkatan kehadiran pemilih di TPS pada Pilkada 2024 tidak terlepas dari data partisipasi. Apabila jumlah hadir atau pemantauan meningkat maka partisipasi pemilih juga meningkat.

4. **Peneliti:** Berdasarkan pengalaman Bapak sebagai anggota KPPS, apa saja faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih di TPS pada Pilkada 2024 di Pulau Bulang Lintang?

Informan: Faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih di TPS pada Pilkada 2024 di Bulang Lintang adalah tingkat popularitas calon kepala daerah, kemudian ketatnya persaingan para calon, sehingga tim pemenangan dari masing-masing calon kepala daerah saling melakukan kecurangan, misalnya melakukan serangan fajar (politik uang), serta kurangnya dorongan partisipasi dari tokoh masyarakat.

5. **Peneliti:** Menurut Bapak, seberapa efektif peran tokoh masyarakat dalam membantu KPPS meningkatkan partisipasi pemilih di Pulau Bulang Lintang pada Pilkada 2024?

Informan: Peran tokoh masyarakat dalam membantu KPPS meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di Pulau Bulang Lintang sudah cukup efektif, terlihat dengan secara sukarela memantau jalannya proses pemungutan suara di TPS, menginformasikan pemilih yang berhalangan hadir kepada KPPS, sehingga KPPS bisa mendatangi rumah pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

6. **Peneliti:** Menurut Bapak, apa langkah paling efektif yang perlu dilakukan oleh KPPS bersama tokoh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Pulau Bulang Lintang pada pemilihan mendatang?

Informan: Langkah yang paling efektif yang perlu dilakukan oleh KPPS bersama tokoh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Pulau Bulang Lintang pada pemilihan mendatang yaitu dengan cara meningkatkan sosialisasi kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, meningkatkan

pelayanan KPPS kepada pemilih di TPS, sehingga pemilih merasa dihormati, dilayani, dan merasa nyaman dalam menggunakan hak pilihnya.

TRANSKRIP WAWANCARA

Identitas Informan 9

1. Nama : Zaleha
2. Umur : 41 Tahun
3. Status : Sudah Menikah
4. Pendidikan : SD
5. Kategori : Masyarakat Pemilih

Hasil Wawancara

1. **Peneliti:** Apakah Ibu mengetahui adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kecamatan Bulang? Dari mana Ibu mendapatkan informasi tersebut?

Informan: Saya mengetahui adanya pemilihan daerah, pertama saksi dari perangkat kelurahan seperti pak RW, pak RT, terus dari media sosial juga sampai kita juga mengetahui kapan bulan, hari, tanggalnya, pemungutan suara.

2. **Peneliti:** Apakah Ibu menggunakan hak pilih pada Pilkada 2024? Jika ya, apa yang mendorong Ibu untuk datang ke TPS?

Informan: Saya menggunakan hak pilih saya pada Pilkada 2024, berdasarkan kesadaran politik, bahwa saya harus memilih kepala daerah berdasarkan hati saya sendiri.

3. **Peneliti:** Seberapa besar pengaruh ajakan atau dorongan dari tokoh masyarakat tersebut terhadap keputusan Ibu untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilih?

Informan: Ajakan dan dorongan tokoh masyarakat untuk datang ke TPS cukup berpengaruh, mereka selalu memperingatkan untuk datang ke TPS, sesuai surat undangan yang di terima dari KPPS, sampai hari pencoblosan pun mereka mengumumkan dan mengundang melalui pengeras suara di masjid.

4. **Peneliti:** Selain ajakan dari tokoh masyarakat, faktor apa saja yang mendorong Ibu untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2024?

Informan: Selain ajakan dari tokoh masyarakat yang mendorong saya untuk berpartisipasi di Pilkada 2024 adalah faktor kesadaran berpolitik, saya harus menggunakan hak pilih, saya untuk memilih kepala daerah sesuai dengan hati dan harapan saya kedepan.

5. **Peneliti:** Menurut Ibu, apakah tokoh masyarakat di Pulau Bulang Lintang sudah menjalankan perannya dengan baik dalam mendorong warga untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2024?

Informan: Tokoh masyarakat di Pulau Bulang Lintang, saya rasa sudah menjalankan dengan baik dalam menjalankan warga untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Mereka berperan dan turut berpartisipasi sesuai dengan jabatan dan bidangnya masing-masing.

TRANSKRIP WAWANCARA

Identitas Informan 10

1. Nama : Ida Lela
2. Umur : 49 Tahun
3. Status : Sudah Menikah
4. Pendidikan : SD
5. Kategori : Masyarakat Pemilih

Hasil Wawancara

1. **Peneliti:** Apakah Ibu mengetahui adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kecamatan Bulang? Dari mana Ibu mendapatkan informasi tersebut?

Informan: Ya, saya mengetahui adanya Pilkada 2024. Informasi tersebut saya peroleh dari Ketua RT, tokoh masyarakat, serta undangan memilih yang dibagikan oleh petugas penyelenggara pemilu kepada masyarakat.

2. **Peneliti:** Apakah Ibu menggunakan hak pilih pada Pilkada 2024? Jika ya, apa yang mendorong Ibu untuk datang ke TPS?

Informan: Ya, saya menggunakan hak pilih. Saya datang ke TPS karena merasa memiliki tanggung jawab sebagai warga negara untuk ikut serta dalam memilih pemimpin daerah. Saya juga berharap pemimpin yang terpilih dapat memperhatikan kebutuhan masyarakat.

3. **Peneliti:** Seberapa besar pengaruh ajakan atau dorongan dari tokoh masyarakat tersebut terhadap keputusan Ibu untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilih?

Informan: Ajakan dari tokoh masyarakat cukup berpengaruh karena mereka sering mengingatkan warga tentang jadwal pemungutan suara dan pentingnya menggunakan hak pilih. Hal tersebut membuat saya semakin yakin untuk datang ke TPS.

4. **Peneliti:** Selain ajakan dari tokoh masyarakat, faktor apa saja yang mendorong Ibu untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2024?

Informan: Faktor lainnya adalah keinginan untuk memilih pemimpin yang dapat membawa perubahan bagi daerah, serta kesadaran bahwa suara masyarakat sangat penting dalam proses demokrasi.

5. **Peneliti:** Menurut Ibu, apakah tokoh masyarakat di Pulau Bulang Lintang sudah menjalankan perannya dengan baik dalam mendorong warga untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2024?

Informan: Menurut saya, tokoh masyarakat sudah cukup baik dalam menjalankan perannya. Mereka aktif memberikan informasi dan mengajak warga untuk menggunakan hak pilih sehingga masyarakat lebih peduli terhadap pelaksanaan Pilkada.

TRANSKRIP WAWANCARA

Identitas Informan 11

1. Nama : Rukiah
2. Umur : 63 Tahun
3. Status : Sudah Menikah
4. Pendidikan : SD
5. Kategori : Masyarakat Pemilih

Hasil Wawancara

1. **Peneliti:** Apakah Ibu mengetahui adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kecamatan Bulang? Dari mana Ibu mendapatkan informasi tersebut?

Informan: Ya, saya mengetahui adanya Pilkada tahun 2024 di Kecamatan Bulang. Informasi tersebut saya dapatkan dari Ketua RT, tokoh masyarakat, petugas penyelenggara pemilu, serta melalui media sosial dan pengumuman yang disampaikan kepada masyarakat.

2. **Peneliti:** Apakah Ibu menggunakan hak pilih pada Pilkada 2024? Jika ya, apa yang mendorong Ibu untuk datang ke TPS?

Informan: Ya, saya menggunakan hak pilih pada Pilkada 2024. Yang mendorong saya datang ke TPS adalah kesadaran bahwa memilih merupakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain itu, saya ingin ikut menentukan pemimpin yang dianggap mampu membawa kemajuan bagi daerah dan masyarakat.

3. **Peneliti:** Seberapa besar pengaruh ajakan atau dorongan dari tokoh masyarakat tersebut terhadap keputusan Ibu untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilih?

Informan: Menurut saya, ajakan dari tokoh masyarakat cukup berpengaruh. Tokoh masyarakat sering mengingatkan warga tentang pentingnya menggunakan

hak pilih dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Dengan adanya dorongan tersebut, masyarakat menjadi lebih termotivasi untuk datang ke TPS.

4. **Peneliti:** Selain ajakan dari tokoh masyarakat, faktor apa saja yang mendorong Ibu untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2024?

Informan: Selain ajakan dari tokoh masyarakat, faktor yang mendorong saya adalah keinginan untuk ikut menentukan masa depan daerah, rasa tanggung jawab sebagai warga negara, serta harapan agar pemimpin yang terpilih dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat.

5. **Peneliti:** Menurut Ibu, apakah tokoh masyarakat di Pulau Bulang Lintang sudah menjalankan perannya dengan baik dalam mendorong warga untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2024?

Informan: Menurut saya, tokoh masyarakat sudah menjalankan perannya dengan cukup baik. Mereka aktif memberikan informasi mengenai Pilkada, mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih, dan mengingatkan warga agar datang ke TPS pada hari pemungutan suara. Hal tersebut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2024.

NAMA-NAMA INFORMAN

1. Nama : Ahmad Sobur
Umur : 51 Tahun
Status : Sudah Menikah
Pendidikan : AKADEMIK/DIPLOMA III/ SERJANA MUDA
Jabatan : Ketua RT
2. Nama : Gani
Umur : 45 Tahun
Status : Sudah Menikah
Pendidikan : SMP
Jabatan : Ketua RW
3. Nama : Rahim
Umur : 65 Tahun
Status : Sudah Menikah
Pendidikan : SD
Jabatan : Tokoh Adat
4. Nama : Abu Bakar
Umur : 69 Tahun
Status : Sudah Menikah
Pendidikan : SD
Jabatan : Tokoh Agama
5. Nama : Idas Rizal
Umur : 43 Tahun
Status : Sudah Menikah
Pendidikan : SMP
Jabatan : Tokoh Pemuda

6. Nama : Awie
Umur : 45 Tahun
Status : Sudah Menikah
Pendidikan : SD
Jabatan : Masyarakat Yang Tidak Ikut Memilih

7. Nama : Zunaidah
Umur : 48 Tahun
Status : Sudah Menikah
Pendidikan : SD
Jabatan : Masyarakat Yang Tidak Ikut Memilih

8. Nama : Syukur Andila
Umur : 38 Tahun
Status : Sudah Menikah
Pendidikan : SMA
Jabatan : KPPS

9. Nama : Zaleha
Umur : 41 Tahun
Status : Sudah Menikah
Pendidikan : SD
Jabatan : Masyarakat Pemilih

10. Nama : Ida Lela
Umur : 49 Tahun
Status : Sudah Menikah
Pendidikan : SD
Jabatan : Masyarakat Pemilih

11. Nama : Rukiah
Umur : 63 Tahun
Status : Sudah Menikah
Pendidikan : SD
Jabatan : Mayarakat Pemilih

DOKUMENTASI



Foto Bersama Pak Lurah (M. Irwan, S.IP)



Peneliti sedang mewawancarai Pak RW (Gani)



Peneliti sedang mewawancarai Pak RT (Ahmad Sobur)



Peneliti sedang mewawancarai Tokoh Agama (Abu Bakar)



Peneliti sedang mewawancarai Tokoh Adat (Rahim)



Peneliti sedang mewawancarai Anggota KPPS (Syukur Andila)



Peneliti sedang mewawancarai Tokoh Pemuda (Idas Rizal)



Peneliti sedang mewawancarai Masyarakat Pemilih (Zaleha)



Peneliti sedang mewawancarai Masyarakat Pemilih (Ida Lela)



Peneliti sedang mewawancarai Masyarakat Pemilih (Rukiah)



**Peneliti sedang mewawancarai Masyarakat tidak Memilih
(Zunaidah)**



**Peneliti sedang mewawancarai Masyarakat tidak Memilih
(Awie)**